

**RELASI KUASA DI BALIK KONTESTASI WACANA
PEMILIHAN GUBERNUR SULSEL 2018, PADA
HARIAN RADAR MAKASSAR DAN RAKYAT SULSEL**

***POWER RELATIONBEHIND CONTESTATION DISCOURSE OF
SOUTH SULAWESI GOVERNOR ELECTION IN 2018 AT
DAELY RADAR MAKASSAR AND RAKYAT SULSEL***

RAHMA AMIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

**RELASI KUASA DI BALIK KONTESTASI WACANA PEMILIHAN
GUBERNUR SULSEL 2018, PADA HARIAN RADAR MAKASSAR
DAN RAKYAT SULSEL**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

RAHMA AMIN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

TESIS

**RELASI KUASA DI BALIK KONTESTASI WACANA PEMILIHAN
GUBERNUR SUL-SEL 2018 PADA HARIAN RADAR MAKASSAR
DAN RAKYAT SUL-SEL**

Disusun dan diajukan oleh

RAHMA AMIN

Nomor Pokok P1600216008


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **27 Juli 2018**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.
Ketua

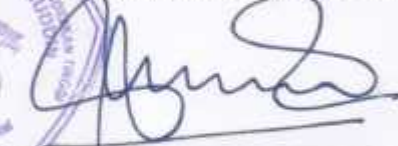

Dr. Sawedi Muhammad, MA.
Anggota

Ketua Program Studi
Ilmu Sosiologi,


Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Amin

Nomor Mahasiswa : P1600216008

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan

Rahma Amin

PRAKATA

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kekuatan dan kebesarannya yang melimpah kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tidak terukur diberikan oleh-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita, Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam yang telah menjadi suri tauladan bagi segenap umat untuk tetap istiqomah di atas ajaran Islam hingga akhir zaman.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.Si pada program Studi Sosiologi penelitian ini tidaklah mudah, namun inilah yang penulis coba lakukan meski itu berat. Dengan meneliti institusi sendiri, penulis mesti menelisik dan mengungkap segala sesuatu yang sebagian adalah luka diri sendiri dan orang-orang terdekat. Maka semakin dalam penelitian ini, semakin perih luka-luka yang dirasakan. Sempat terlintas untuk menghentikan dan mengganti topik penelitian yang lain, namun keyakinan penulis bahwa ilmu pengetahuan perlu kejujuran dan keberanian menjadi dasar yang menguatkan penulis penelitian ini harus selesai.

Selesainya penelitian ini, penulis merasa wajib untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Rahmat Muhammad, M.Si dan Bapak Dr. Sawedi Muhammad, MA selaku dosen pembimbing yang tidak hentinya memberikan semangat,

bimbingan dan juga keteguhan sikap agar penulis menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada penguji, Dr.M.Ramli AT,M.Si, kepada Dr.Suparman Abdullah,M.Si dan kepada Dr.H.Muhammad Farid,M.Si, yang memberikan penajaman demi penyempurnaan penelitian ini. Kepada seluruh staf pengajar Sosiologi Pascasarjana Unhas, dua tahun berguru bukanlah ilmu sedikit yang kalian beri. Sehingga wajib bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih atas itu.

Penulis juga harus berterimakasih kepada para informan penelitian ini, yang tidak bisa peneliti sebut satu-persatu, yang bersedia memberikan informasi secara terbuka. Sebagian besar informan adalah sahabat-sahabat terbaik, yang juga terus memberikan dorongan agar penelitian ini bisa diselesaikan. Tak lupa juga kepada institusi harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang telah memberikan momentum dan akses kepada penulis untuk belajar, bukan hanya tentang jurnalistik dan dunia riset, namun juga kehidupan.

Terkhusus ucapan terimakasih untuk keluarga besar penulis. Kepada ibu tercinta, Bajati dan ayah Muh.Amin yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan memberikan dukungan moral dan materi sehingga penelitian ini bisa penulis rampungkan. Kepada suami yang begitu pengertian, Jufri Dahlan, SE. terima kasih untuk segala pengertian motivasi, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Kepada kedua putri, malaikat kecil ku, Meera Amita Gayatri dan

Maisya Radina Widyaningtias tangis dan tawa mu adalah semangat ibu hingga bisa sampai pada titik ini. Kepada nenek Aminah, kedua adik penulis, Ramli Amin dan Dzulhijjah Amin terimakasih atas dukungan kalian. Teman-teman Sosiologi Pascasarjana Unhas angkatan 2016, kalian semua hebat, sukses untuk kalian. Tanpa keberadaan nama-nama di atas sulit bagi penulis menyelesaikan tesis ini.

Semoga upaya untuk membuka diri sendiri, dorongan dari pembimbing, dan juga keberanian dari para informan penelitian ini untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, bisa diterima sebagai sebuah diskursus yang sehat. Bukan hanya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi medium pendewasaan bagi peneliti dan juga subyek yang diteliti.

Makassar, 12 Juli 2018

Penulis :

RAHMA AMIN

ABSTRAK

RAHMA AMIN. *Relasi Kuasa di Balik Kontestasi Wacana Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 di Harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Sawedi Muhammad).

Tesis ini bertujuan memahami relasi kuasa di balik kontestasi wacana di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang menyebabkan terjadinya pembelahan berita terkait pasangan calon yang berfaga di Pilgub Sulsel.

Untuk menggali permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif. Pertama-tama dilakukan analisis pembingkai terhadap berita yang cenderung memihak atau pun kontra terhadap salah satu kandidat guna mengetahui pola kontestasi wacana dan aktor-aktornya. Berikutnya, dilakukan kajian etnografi ruang redaksi guna mengetahui relasi kuasanya termasuk di tiap-tiap bagian internal perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan kedua media ini menjadikan kontestasi wacana sebagai mekanisme kontrol atau swasensor atas pemberitaan mereka. Temuan ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kepemilikan modal di tangan segelintir orang telah berdampak buruk bagi independensi media terkait perannya dalam proses demokratisasi. Dalam penelitian ini, kuasa ekonomi politik di balik praktik swasensor ini diperkaya dengan dimensi permainan kuasa di antara individu wartawan dan praktik swasensor yang telah menjadi habitus harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel. Praktik swasensor itu dilakukan demi melayani kepentingan kapital dan kepentingan "raja-raja kecil" yang berkuasa di jajaran redaksi. Tesis ini juga menyertakan diskusi teoretik tentang integrasi pendekatan ekonomi politik kritis dengan kajian budaya media.

Kata kunci: relasi kuasa, kontestasi wacana, media, ekonomi politik, kajian budaya



ABSTRACT

RAHMA AMIN. *Power relation behind Contestation Discourse of South Sulawesi Governor Election in 2018 at Daily Radar Makassar and Rakyat Sulsel* (supervised **Rahmat Muhammad** and **Sawed Muhammad**)

This thesis aimed to understand the power relation behind the contestation discourse in people's daily by Radar Makassar and Rakyat Sulsel that cause the occurrence of news division related to the candidates who competed in South Sulawesi governor election.

This research used research qualitative method. The research began with framing analysis to the news that have tendency to take side on certain candidates or counter one candidate to identify the pattern of contestation discourse and the actors. Further, the ethnography analysis of editorial room to find out the power relation, including the internal parts of each company.

Results research show that both media make the contestant discourse as controlling mechanism or self-censorship on their news publication. These findings have completed previous research that capital ownership in the hand of small numbers of persons has given bad impact for the media independence related to its role in democratization process. In addition, political economic power behind this self-censorship enriched with dimensions of power game between individual journalists and self-censorship practices that has become habit of the daily Radar Makassar and Rakyat Sulsel. Self-censorship practice is done to serve capital interests and the interest of the "little kings" in power in the editorial rank. This thesis also encloses theoretical discussion about the integration between critical political economic approach and media cultural analysis.

Keywords: power relation, contestation discourse, media, political economics, cultural analysis.



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	vii
BAB 1.	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian	13
B. Tinjauan Teori dan Konsep	19
1. Pilgub 2018 dan Dinamika Politik Sulsel	27
2. Kuasa dalam Regulasi Wacana	33
3. Dirkursus Media dalam Proses Politik	49
C. Kerangka Fikir dan Hipotesis	54
BAB III	

METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	58
C. Objek Penelitian	59
D. Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data	64
G. Tahap-Tahap Penelitian dan Jadwalnya	72
BAB IV	
GAMBARAN UMUM	76
A. Gambaran Umum Harian Rakyat Sulsel	76
B. Gambaran Umum Harian Radar Makassar	83
C. Ideologi Media dan Posisi Pemilik Saham	88
BAB V	
HASIL DAN PEMBAHASAN	94
A. Dirkursus Pilgub Sulsel Harian Rakyat Sulsel Dan Radar Makassar	94
1. Pemihakan dan Pembelahan Berita	100
2. Aktor di Ruang Redaksi Atas Pembelahan Berita	125
a. Aktor di ruang harian Rakyat Sulsel	125
b. Aktor di ruang harian Radar Makassar	136
B. Kekuatan Ekonomi dan Balik Pemberitaan	145
C. Strategi Tim Kerja Pemenangan Kandidat	158

1. Tim Paslon NH-Aziz	158
2. Tim Pemenangan Agus-TBL	160
3. Tim Pemenangan NA-ASS	163
4. Tim Pemenangan IYL-Cakka	165
BAB IV	
PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran dan Rekomendasi	176
DAFTAR PUSTAKA	180
LAMPIRAN	187

DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
2.1	Teori dan Pendekatan Penelitian	21
2.2	Empat Kekuasaan Menurut John B Thamsom	41
2.3	Kekuasaan dan Kontra Kekuatan Media Menurut Curran	44
3.1	Metode Analisis Fairclough	67
3.2	Jadwal dan Rencana Penelitian	75
4.1	Komposisi Saham Awal Rakyat Sulsel	78
4.2	Komposisi Perubahan Saham Harian Rakyat Sulsel	82
4.3	Komposisi Saham Radar Makassar	86
5.1	Arah Pemberitaan Paslon di Pilgub Sulsel	99
5.2	Peran Aktor di Meja Redaksi	144
5.3	Strategi Tim Media Paslon di Media	168

DAFTAR BAGAN

BAGAN:		Halaman
2.1	Kerangka Fikir	55
3.1	Kerangka Analisis Wacana Fairclough	67
4.1	Struktur Pimpinan Rakyat Sulsel	82
4.2	Struktur Pimpinan Radar Makassar	87
5.1	Proses Produksi Berita di Ruang Redaksi	124
5.2	Periode Pemasangan Iklan Paslon di Radar Makassar	153
5.3	Periode Pemasangan Iklan Paslon di Rakyat Sulsel	159
5.4	Perbedaan Strategis Kandidat di Media	170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem politik Indonesia yang berubah di era reformasi, memberikan angin segar bagi kebebasan pers meliputi, media cetak, elektronik dan lainnya. Sebagai salah satu sarana untuk mengungkapkan pikiran secara lisan dan tulisan sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 28 di mana kebebasan pers dijamin merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memerankan diri dalam setiap momen perpolitikan di tanah air, termasuk seluruh momen penting seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perkembangan politik di Indonesia, media merupakan suatu realitas dan bagian dari kehidupan modern yang banyak memberikan manfaat. Kehadiran media bukanlah suatu ruang vakum, media bisa menjadi wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik, merekonstruksikan realitas dan menanamkan ideologi tertentu. Media menjadi alat untuk melegitimasi eksistensi dan struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Tetapi sebaliknya media pun bisa menjadi alat untuk mendelegitimasi kekuasaan, membongkar kemandekan politik dan menjatuhkan kekuasaan yang otoriter. Dalam kurung waktu 15 tahun terakhir,

bangsa Indonesia merayakan kebebasan bermedia, kecenderungan media sebagai alat kapital memudahkan orang yang memiliki modal untuk menaruh kepentingannya di atas media, baik kepentingan ideologi (dalam arti luas), modal, partai politik maupun komunitas. (Sudibyo,2013).

Padahal media massa sebagai lembaga yang netral , bersifat mandiri(*independent*) sedapat mungkin melakukan fungsinya menyajikan informasi dengan tidak berpihak dan tergantung pada kelompok tertentu di masyarakat, termasuk di dalamnya para elit-elit politik. Sebab hanya dengan melepaskan diri dari segala campur tangan kepentingan, media baru akan mampu memberikan ruang aspirasi untuk segala kebutuhan informasi bagi masyarakat. Olehnya media sebagai insan dan lembaga pers berkewajiban mencari, menulis, dan menyajikan fakta-fakta dari sebuah peristiwa kepada khalayak, tanpa mereduksi dan menambah informasinya. Kinerja wartawan agar tetap profesional dan ideal dalam menjalankan tugasnya, sebenarnya telah di atur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 2 tentang Pers.(Kusumaningrat dan Purnama, 2012).

Pada Pasal 1 UU Pers secara terang menyebutkan wartawan Indonesia bersikap independen, yang dimaksud independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk perusahaan pers. Sedang akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika

peristiwa terjadi, sementara berimbang diartikan kalau semua pihak mendapat kesempatan setara dan tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.(UU Pers).

Melalui kekuatan yang sangat besar, yakni dapat membuat institusi lain menjadi lebih kuat. Melalui kemampuannya dalam mengemas berita dan menyebarkan pesan ke banyak orang secara serentak di berbagai tempat sekaligus, media justru menjadi alat propaganda untuk memenuhi kepentingan ekonomi politik tertentu, akibatnya roh media yang harusnya independen menjadi hilang. Hal ini sering terjadi dalam momen Pilkada, di mana media dianggap sebagai sarana yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik para pemilik kepentingan. Tidak sedikit para elit politik yang memesan kolom-kolom tertentu pada media yang untuk memasang foto-foto kegiatan para kandidat menjelang pemilihan kepala daerah.

Payung hukum yang mengatur mengenai kebebasan pers telah tercederai, jika melihat realita pemberitaan pada sejumlah media lokal di Makassar. Ambil contoh kontestasi pemilihan Gubernur Sulsel yang akan dihelat pada Juni 2018 mendatang, di mana terjadi pembelahan pemberitaan politik yang terbit pada harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel, dalam menginformasikan sejumlah kandidat atau figur bakal calon yang digadang-

gadang akan maju pada pertarungan merebut kursi orang nomor satu di Sulsel itu.

Teks pemberitaan tersebut dapat kita lihat misalnya pada halaman 8 rubrik politik yang dimuat harian Radar Makassar edisi Senin 28 Agustus lalu dengan judul “PPP Ogah Usung YL”. Berita terkait dukungan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) di Pilgub menggambarkan tidak akan mengusung figur yang berasal dari klan Yasin Limpo(YL), dimana yang dimaksud adalah Ichsan Yasin Limpo(IYL) adik kandung dari Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo(SYL). Diketahui IYL adalah figur bakal calon yang sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan diri untuk ikut bertarung merebut kursi orang nomor satu di Sulsel itu. Dalam teks berita yang memakai Sekretaris DPW PPP Sulsel, Muhammad Nasrun sebagai narasumber utama dalam berita tersebut bercerita, kalau PPP tidak akan membuat kesalahan dengan mengusung klan YL di Pilgub. Sebab terang Muhammad saat PPP mengusung SYL pada Pilgub 2013 lalu seolah jasa partai terlupakan dan tidak ada kontribusi sedikit pun dari SYL untuk partai berlambang kakba itu selama menjabat Gubernur Sulsel. Sedang berita dengan isu yang sama juga dimuat beberapa hari sebelumnya di harian Rakyat Sulsel dengan judul “Amir Pastikan PPP Dukung IYL-Cakka” di halaman tiga rubrik Pilkada 2018 yang diterbitkan pada Jumat 11 Agustus 2017. Amir Uskara selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat(DPP)

PPP dalam berita itu memastikan tidak akan mengusung kandidat lain di Pilgub di luar dari IYL-Caka(Andi Mudzakkar).

Teks berita lainnya yang menggambarkan keterbelahan antara kedua media tersebut adalah, ketika Harian Rakyat Sulsel menerbitkan berita yang berjudul “Ada Skenario Jegal Punggawa di Pilgub” yang *hedline* pada Senin 21 Agustus 2017. Nurdin Halid sebagai rival kuat IYL diberitakan berupaya menjegal mantan Bupati Gowa dua periode itu di Pilgub, dengan berupaya merebut rekomendasi usungan PAN dan PPP. Juru Bicara IYL, Risky Vatmala Passalo, mengatakan, sebagaimana yang dimuat dalam berita tersebut kalau IYL dengan peluang kemenangan yang besar memenangkan pertarungan jauh-jauh hari telah melihat akan ada upaya dari lawan politik untuk menjegal IYL.

Berbanding terbalik dengan berita yang terbit dua hari kemudian di Harian Radar Makassar pada Rabu 23 Agustus 2017 di halaman pertama. Berita yang berjudul “Jalan IYL-Cakka Makin Terjal” itu seolah memberikan pembelaan kepada bakal calon gubernur (Bacagub) Nurdin Halid kalau tidak ada upaya pihak NH menjegal kandidat siapapun. Loncatnya dukungan PPP yang sebelumnya disematkan kepada IYL oleh karena konflik internal (dualisme partai) yang terjadi di tubuh DPP PPP. Keterbelahan isi pemberitaan pada kedua media tersebut kembali terjadi ketika Rakyat Sulsel memuat *headline* berita pada halaman pertama yang terbit Jumat 22

September 2017, dengan judul “Kekuatan Besar Jegal Punggawa”, lalu pembelaan berita harian Rakyat Sulsel terhadap IYL itu dibalas lagi oleh harian Radar Makassar pada Senin 25 September 2017 dengan judul “Risman : Siapa yang Jegal IYL ?”. Risman adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel yang dijadikan narasumber dalam berita itu. Secara teks berita tersebut seolah ingin memberikan pesan kepada pembaca bahwa tidak ada pihak yang berupaya menjegal IYL di Pilgub. Beralihnya dukungan PAN kerana IYL tidak mampu mencukupinya jumlah kursi usungan dari partai lain, sebagai syarat untuk maju melalui jalur partai politik di kontestasi Pilgub yang dihelat pada Juni 2018 mendatang.

Bila dalam banyak pemberitaan politik yang terbit di harian Rakyat Sulsel terkait Pilgub Sulsel lebih condong dan memihak kepada IYL, maka lain halnya berita politik yang naik di harian Radar Makassar. Figur bacagub yang juga merupakan Pelaksana Tugas(Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid lebih punya tempat di Harian Radar Makassar dengan pemberitaan yang cenderung positif terkait pencalonannya di Pilgub Sulsel.

Teks berita lainnya yang pernah dimuat di Harian Rakyat Sulsel di halaman utama pada Selasa 1 Agustus dengan judul “Hanura Condong ke IYL”, berbanding terbalik dengan teks berita yang terbit di Harian Radar Makassar pada Selasa 29 Agustus 2017 berjudul “Koalisi Istana Berpeluang ke NH-Aziz”. Hanura yang masuk dalam koalisi istana termasuk partai yang

disebut bakal memberikan usungannya ke mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia(PSSI) itu. Tidak saja isu politik yang berkenaan dengan bacagub NH yang lebih diprioritaskan di Harian Radar Makassar. Ketimbang figur lainnya, isi bahkan konten berita yang disajikan pun cenderung positif dan mengagung-agungkan NH. 180 derajat berbeda jika disandingkan dengan konten berita yang membahas soal IYL. Di mana IYL cenderung diberitakan negatif atau berita yang diangkat memang sengaja menampilkan sisi buruk dari mantan Bendahara DPD I Golkar Sulsel itu. Misalnya saja berita yang muat pada Jumat 7 Juli di halaman utama Radar Makassar terkait peresmian posko pemenangan IYL di Jalan Hertasning ,pada Kamis 6 Juli yang banyak dihadiri Aparat Sipil Negara(ASN). Pemandangan keterlibatan ASN dalam peresmian itu dijadikan engel berita yang lalu esoknya diberi judul “ASN Mulai Berpolitik Praktis”.

Berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemui dan kajian literatur itulah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut terkait kontestasi wacana yang membuat kedua media tersebut terbelah dalam menyajikan pemberitaan terkait pertarungan kandidat di Pilgub Sulsel. Menariknya adalah kedua media tersebut masih sama-sama merupakan anak perusahaan dari media Fajar group yang memiliki *owner* yang sama. Peneliti memiliki kesimpulan awal bahwa pertarungan wacana di ruang redaksi, yang mempertemukan para aktor yang memiliki keragaman

ideologi, sangat penting diungkap guna memahami relasi kuasa dan kelindan kepentingan di balik pemberitaan figur di Pilgub Sulsel. Penulis meyakini bahwa ruang redaksi adalah tempat berbagai kepentingan tentang pemberitaan figur bakal calon yang ikut dalam kontestasi Pilgub Sulsel . Sekalipun keberadaan pemilik media tidak bisa diabaikan dalam mengontrol produksi teks, salah satunya melalui kebijakan yang menjadi acuan dasar dalam pemberitaan. Namun, dinamika internal di ruang redaksi juga bisa memunculkan “raja-raja kecil” yang bisa menentukan dalam mengkonstruksi teks sesuai kepentingannya masing-masing. Kontrol pemilik modal ataupun kekuatan ekonomi politik tidak bisa sepenuhnya mengendalikan produksi teks di media massa. Realitas sosial dalam produksi berita tidaklah begitu sederhana seperti penjelasan lewat teori pertentangan kelas, yang terlalu mengutamakan faktor ekonomi dan mengabaikan faktor-faktor lain. Ada ruang-ruang negosiasi, bahkan juga perlawanan.

Pendekatan yang memberi pengaruh besar terhadap studi wacana dalam ilmu politik adalah pendekatan post strukturalis, yang memandang kemunculan realitas sosial bukan karena keinginan sejarah, melainkan karena kepentingan dari pada kekuasaan. Dalam pendekatan ini, kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tidak produktif, yakni bekerja dengan cara menindas. Sebaliknya, kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat produktif yang dapat mengkontruksi dunia sosial melalui cara-

cara tertentu.(Marrienne dan Loise. 2007). Dalam memproduksi kekuasaan, aliran post strukturalis menempatkan peran penting wacana dalam pembentukan realitas sosial. Tanpa adanya produksi,akumulasi, sirkulasi, dan pemfungsian wacana, kekuasaan tidak dapat dengan sendirinya dibangun, dikonsolidasikan maupun diimplementasikan .

Wajah media yang dapat menggambarkan wacana pemberitaan pada harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel sebagai institusi bisnis sama halnya dengan korporasi, di mana dalam menjalankan operasinya dengan orientasi ke dalam (*inward looking*) untuk kepentingan sendiri. Sedangkan wajah media sebagai institusi sosial berorientasi ke luar (*Outward looking*) untuk kepentingan masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan dalam sebuah media, bisa muncul beragam perspektif yang saling bertolak belakang untuk satu kasus yang sama. Sehingga, misalnya dalam pemberitaan Radar Makassar tentang salah satu bakal calon sebagai sebuah organisasi media, sepenuhnya mendukung atau sebaliknya menolak. Tetapi, lebih tepat jika kita melihatnya dalam kaca mata, siapa wartawan kedua media tersebut yang mendukung dan siapa wartawan yang menentangnya, lalu bagaimana masing-masing agen ini berupaya mengonstruksi teks sesuai dengan keyakinan individualnya.

Sebagai orang dalam yang bekerja sebagai wartawan sekaligus penanggung jawab halaman politik di harian Radar Makassar, penulis

berharap bisa melakukan pengamatan secara etnografis terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian di ruang redaksi di media ini secara alamiah. Tujuannya untuk memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial di ruang redaksi Radar dalam memproduksi teks, apa kepentingan, dan motifnya begitu juga dengan pemberitaan seputar isu Pilgub Sulsel yang dimuat di harian Rakyat Sulsel. Penulis ingin pula membongkar struktur ekonomi politik yang mempengaruhi praktik sensor-diri yang telah menjadi budaya organisasi, bagaimana upaya sebagian wartawannya menyiasati budaya organisasi ini sehingga menciptakan keterbelahan sikap di ruang redaksi. Diharapkan, penelitian ini bisa memberikan masukan yang konstruktif guna membenahi praktik di ruang redaksi (*newsroom*).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud mengungkap konstruksi berita di harian Radar Makassar dan Harian Rakyat Sulsel menjelang kontestasi pemilihan Gubernur Sulsel yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang. Peneliti ingin mengetahui dinamika di ruang redaksi (*politics of newsroom*) dalam konstruksi teks berita mengenai wacana perhelatan di Pilgub, terutama terkait fenomena adanya teks pemberitaan yang terkesan memihak kepada salah satu kandidat . Penulis meyakini, dibalik konstruksi berita ini terdapat praktik kuasa, budaya ruang redaksi yang khas, selain juga kepentingan ekonomi politik yang mempengaruhinya.

Selama ini kajian teks media dengan tema politik di Pilkada sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah objek kajiannya yang lebih luas dengan melihat dan membandingkan pemberitaan pada dua media tersebut. Penelitian ini juga akan menyinggung adanya kontestasi wacana di ruang redaksi sendiri. Selain itu, pada umumnya teks di suatu media akan dianggap mewakili satu media, sehingga aspek kontestasi para pekerja media dalam mengkonstruksi teks ini jarang diperhatikan. Penulis bermaksud mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan tujuan menggambarkan dan memahami proses pertarungan wacana dan relasi kuasa di ruang redaksi dalam memberitakan kandidat yang bertarung di Pilgub. Termasuk apakah terdapat pengaruh atau campur tangan dari tim sukses para kandidat di kedua media tersebut dalam setiap pemberitaan yang dimuat. Tidak hanya terkait dengan kepentingan individu masing-masing wartawan, penulis meyakini, kontestasi ini bisa menyingkap budaya organisasi media yang terbentuk oleh proses sejarah panjang sejak pendirian media ini, selain juga kepentingan struktur ekonomi-politik di belakangnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, ada tiga rumusan masalah dalam studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi wacana dan relasi kuasa di ruang redaksi yang

menyebabkan terjadinya pembelahan berita pada harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel ?

2. Bagaimana kekuatan ekonomi, politik, budaya direproduksi dan dinegosiasikan oleh para aktor di ruang redaksi dalam memutuskan pemberitaan calon kandidat di Pilgub Sulsel.
3. Bagaimana strategi tim kerja pemenangan kandidat di Pilgub Sulsel mempengaruhi pemberitaan yang terbit pada kedua media tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kontruksi wacana dan relasi kuasa di ruang redaksi yang menyebabkan pembelahan berita pada harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel ?
2. Mengetahui kekuatan ekonomi, politik, budaya direproduksi dan dinegosiasikan oleh para aktor di ruang redaksi dalam memutuskan pemberitaan calon kandidat di Pilgub.
3. Mengetahui dan memahami strategi dari tim kerja pemenangan kandidat di Pilgub Sulsel dalam mempengaruhi pemberitaan yang terbit pada kedua media tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang rill sebagai bahan referensi

akademik di bidang ilmu sosiologi, utamanya dalam kajian sosiologi politik kaitannya dengan media massa.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai netralitas media massa, hingga bisa menghindari diri dari timbulnya ketidaknetralan media saat momen Pilkada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Konstruksi wacana pemberitaan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terbit di media cetak memang sudah menjadi kajian yang banyak diteliti sebelumnya. Bahkan dalam satu dekade terakhir ini fenomena yang menarik ketika kebebasan pers terbuka pasca 1998, semangat reformasi di bidang media makin tumbuh mempengaruhi sikap politik masyarakat dalam sistem perpolitikan di tanah air. Merujuk pada beberapa penelitian yang dilakukan maka terdapat beberapa penelitian yang terkait dalam permasalahan yang penulis coba angkat dalam penelitian ini. Meski secara spesifik penelitian-penelitian yang dilakukan itu memiliki keragaman tersendiri dan fokus yang berbeda.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dirkurusus relasi kuasa di balik kontestasi wacana Pilgub Sulsel pada media harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang menyebabkan lahirnya konten berita yang berbeda. Penulis sendiri menilai bahwa upaya media massa dalam mengkonstruksi berita dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat eksternal maupun dinamika internal. Berdasarkan paradigma kritis yang penulis anut, penelitian ini dimaksudkan untuk membongkar struktur di balik berita kedua media tersebut dalam memproduksi berita berkenaan dengan wacana di Pilgub

Sulsel. Dalam paradigma kritis, terdapat dua pendekatan mainstream yang dipakai untuk meneliti tentang konstruksi berita di media massa, yaitu ekonomi politik kritis dan cultural studies kritis.

Menurut McChesney (2001), pendekatan ekonomi-politik juga bisa fokus pada bagaimana sistem dan isi media mempengaruhi relasi kelas dan situasi politik dan ekonomi. Jadi, pendekatan ekonomi politik memiliki dua kaki, yaitu di satu sisi ingin mengetahui bagaimana situasi ekonomi politik mempengaruhi pemberitaan media, di sisi lain, juga bisa mengkaji tentang bagaimana pemberitaan media diarahkan untuk mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi, terutama dalam hal ini untuk melayani kepentingan kelas sosial tertentu.

Ekonomi politik media sebenarnya merupakan pertarungan bagaimana aspek-aspek ekonomi dan politik telah mempengaruhi produksi dan reproduksi budaya sebagai komoditas media massa. Pendekatan ekonomi politik media lebih melihat bagaimana konsepsi materialisme didistribusikan dan disirkulasikan dalam praktek pelaksanaan produksi kultural. Selain mempengaruhi produksi budaya berbau ideologis juga memproduksi pembaca secara massal dan secara khusus berdasarkan kondisi demografinya yang dipakai untuk dijual kepada pengiklan. (Subiakto dan Ida, 2014).

Berikutnya, pendekatan ekonomi politik juga dipakai untuk mengkaji aspek

yang mempengaruhi produksi berita media massa di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Studi dari Sudibyo dan Patria(2013), misalnya, menjelaskan bagaimana pemilik modal dan pemerintah berkaleborasi untuk mengontrol televisi di Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Kontrol tersebut diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 32/2002 tentang penyiaran, yang mengatur tentang kepemilikan frekuensi media televisi. Aturan tersebut dianggap membuka peluang simbiosis mutualisme antara pemerintah dan pebisnis.

Pendekatan ekonomi politik media juga muncul dalam penelitian Zulhasri Nasir (Maryani, 2011) yang meneliti perubahan struktur media masa Indonesia dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi. Berdasarkan temuan penelitiannya, Nasir menyimpulkan bahwa kebebasan media dan faktor modal menjadi penting dalam internalisasi perubahan struktur media. Selain itu dari faktor eksternal ditemukan bahwa kuasa politik, ekonomi dan teknologi merupakan faktor yang kuat dalam mempengaruhi perubahan struktur media. Selain menemukan faktor eksternal dan internal yang sangat mempengaruhi struktur media, Nasir juga mengungkapkan bahwa struktur dan aktor serta interaksi di antara keduanya merupakan faktor penting dalam restrukturisasi.

Riza Darma Putra(2013) yang menelusuri tentang headline politik dan politik headline dalam harian Fajar dan Tribun sebagai media cetak yang

memiliki oplah terbanyak di Makassar. Dalam kajiannya itu Riza mencoba mengkaji mengapa berita politik dijadikan sebagai *headline* oleh Fajar dan Tribun Timur, yang kedua adalah ada kecenderungan pemberitaan headline politik Fajar dan Tribun Timur, dan ketiga Riza mencoba menelaah kebijakan redaksi Dafar dan Tribun Timur dalam penentuan headline politik dan yang terakhir melihat faktor yang berpengaruh terhadap penentuan headline politik. Hasilnya penelitian tersebut menunjukkan alasan dipilihnya politik sebagai headline karena nilai beritanya, selain itu juga karena dimintai oleh pembaca. Kecenderungan pemberitaan headline Fajar dan Tribun Timur lebih mengarah pada politik sebagai arena *struggle of power*. Faktor yang mempengaruhi penentuan headline politik adalah faktor internal yaitu kebijakan redaksi, serta dalam konteks tertentu pemilik modal. Sementara faktor eksternal lebih kepada kepentingan elit politik.

Penelitian mengenai dinamika politik media massa di era Orde Baru juga pernah dilakukan oleh Krishna Send dan David T. Hill (2011). Send dan Hill menyimpulkan bahwa pers di masa ini selain dikendalikan secara politik, juga tumbuh menjadi kerajaan bisnis pers yang sukses secara ekonomi. Dengan tumbunya ekonomi dalam negeri, beberapa perusahaan surat kabar memperoleh pinjaman bank pemerintah yang cukup substansial. Pada tahun 1972 surat kabar harian terkemuka, Kompas misalnya, meminjam 75 persen dari modal yang diperlukan untuk membangun sebuah kantor percetakan

baru, yang memungkinkan mereka mempersingkat waktu produksi cetak.(Eriyanto,2009).

Berbeda dengan kajian ekonomi politik, *cultural studies* beranggapan bahwa konstruksi berita di media massa tidak diterminisasi oleh ekonomi, namun merupakan proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak faktor, baik internal media(ruang redaksi atau organisasi) maupun juga faktor eksternal. Dalam padangan *cultural studies*, keberadaan media tidak bisa dilepaskan dari kepentingan(ideologi). Pendekatan budaya media kritis ini pada prinsipnya ingin mengkaji tentang bagaimana berita di media massa dikonstruksi(Gamson,1993), dan bagaimana terjadinya perbedaan antara realitas sosial dan realitas di dalam media. Contoh studi dengan pendekatan ini adalah yang dilakukan Wijayanto(2015) yang mencoba melakukan penelitian etnografi di lingup media yang lebih spesifik. Wijayanto memilih mengamati paraktik jurnalisme di ruang redaksi koran Kompas dalam kurung Januari hingga Oktober 2014, yang kemudian diikuti dengan wawancara mendalam terhadap para aktor di koran ini. Wijayanto mengemukakan bahwa “rasa” dalam bahasa Jawa adalah roso merupakan nilai penting dalam kebudayaan ini, menjadi dasar bagi praktik swasensor di harian Kompas.

Stuart Hall sebagai orang yang diasosiasikan dengan aliran studi kultural

melihat media sebagai instrument kekuasaan kelompok elit, dan media berfungsi menyampaikan pemikiran kelompok yang mendominasi masyarakat, terlepas apakah pemikiran itu efektif atau tidak. (Morissan, 2013). Berbagai norma, ide, nilai dan bentuk-bentuk pemahaman dalam masyarakat yang membantu mereka menginterpretasikan realitas merupakan bagian dari ideology suatu budaya (*Cultural Ideologi*). Menurut Hall dalam Morissan, 2013 Ideologi mengacu pada :

“Those images, concept and premises which provide the framework though which we represent, interprec, understand, and”make sense”of some aspect of social existence(Segala gambaran, konsep, dan gagasan yang menjadi dasar pijakan yang kita gunakan untuk menyajikan, menginterpretasikan, mengerti dan “menerima” aspek-aspek keberadaan masyarakat”.

Studi baik dengan yang menggunakan pendekatan ekonomi politik maupun pendekatan budaya di Indonesia belum banyak menjelaskan tentang keterbelahan sikap ruang redaksi. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, sikap ruang redaksi media dalam kasus harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel dalam kontestasi wacana Pilgub Sulsel 2018 ternyata tidak tunggal. Terdapat pro dan kontra kedua media tersebut dalam memberitakan figur atau kandidat tertentu yang berlaga di Pilgub Sulsel, di mana wujudnya bisa dilihat dari teks berita terkait persoalan ini.

Jika benar bahwa produksi berita di ruang redaksi dikendalikan sepenuhnya oleh kepentingan ekonomi politik pemilik media, bagaimana

menjelaskan adanya keterbelahan sikap ini ? Demikian halnya, jika budaya organisasi yang dominan dalam mempengaruhi arah kepentingan kedua media tersebut, bagaimana pula menjelaskan keterbelahan sikap ini. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggabungkan beberapa pendekatan, yaitu analisis wacana kritis dan etnografi ruang redaksi seperti yang dikemukakan Fairclough dan Wodak dalam analisis wacana yang ditulis Marianne dan Louse(2007). Pendekatan etnografi media ini diharapkan bisa menggambarkan praktik sehari-hari di ruang redaksi dalam mengkonstruksi berita. Sedangkan analisis wacana kritis diharapkan bisa membongkar struktur ekonomi-politik, budaya dibalik konstruksi teks.

Sementara itu, dari aspek teoritis, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan perspektif baru dalam kajian media. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, kajian tentang media massa, pada umumnya menganggap teks berita sebagai representasi dari suatu media dan belum banyak yang mengungkap tentang dinamika kontestasi antar aktor dalam penyusunan teks itu dan relasi kuasa di belakangnya. Diharapkan, secara teoritis penelitian ini bisa memberikan sumbangan pada kajian ilmiah, dan perbaikan teori baru tentang aspek-aspek yang ada dalam media massa.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

Kerangka teori digunakan untuk menjelaskan dan menghubungkan konsep- konsep kunci penelitian. Selain itu , teori digunakan

untuk menemukan permasalahan riset , untuk mencari formulasi data yang hendak disajikan, menarasikan hasil temuan dan membangun argumentasinya. Teori juga digunakan untuk menjelaskan fokus penelitian sehingga dapat menghasilkan jawaban yang jelas dan tepat, berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitiannya.(Silalahi,2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme (Interpretatif) yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas “*Socially Meaningful Action*” melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam *setting* yang alamiah, agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.(Agus, 2006). Sementara teori yang dianggap penulis cocok untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah teori konstruktivisme ekonomi politik(Golding dan Murdock). Konsep mengenai konstruktivisme sendiri diperkenalkan oleh sosiolog interpretative,Peter L Berger.

Bagi Berger, realitas tidak dibentuk secara alamiah,tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Melainkan dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang menurutnya bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Sebuah teks berupa berita tidak bisa disamakan seperti sebuah kopi dari realitas, ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda.

wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dilihat dari bagaimana mereka mengkontruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita.(Eriyanto,2002).

Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsep tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Kondisi inilah yang coba diahami pada penelitian mengenai keterbelahan dua media dalam memproduksi wacana terkait Pilgub Sulsel. Sehingga mengapa dalam pemberitaan bakal calon kandidat di Pilgub kerap kali bertolak belakang antara teks berita yang muat di harian Radar Makassar dan harian Rakyat Sulsel, oleh sebab adanya sudut pandang yang berbeda dari masing-masing wartawan dalam mengkontruksi realita. Kondisi inilah yang coba dipahami dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme.

Teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui matriks di bawah ini :

Teori dan Pendekatan Penelitian

Paradigma	Konstruksionis
Teori	<ol style="list-style-type: none">1. Eving Goffman2. Peter L. Berger
Model	<ol style="list-style-type: none">1. Model Murray Edelman2. Model Robert N. Entman3. Model William A. Gamson

Tabel : 2.1

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian tersendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Seperti bagaimana pandangan konstruksionis melihat fakta atau peristiwa yang dianggap sebagai hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif, hadir oleh karena dihadirkan dari subjektifitas wartawan. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal diambil, ada dan menjadi bahan dari berita, melainkan dikonstruksi. Di mana wartawan membentuk dunia mereka sendiri. (Eriyanto. 2002). Sebut misalnya, tahapan proses verifikasi faktual berkas dukungan KTP pasangan IYL-Cakka oleh KPU, di banyak media sosial tersebar informasi tentang satu juta dukungan KTP IYL-Cakka yang diserahkan ke KPU dianggap tidak memenuhi syarat. Keesokan harinya terbit berita di haria

Rakyat Sulsel edisi Selasa, 28 November 2017 yang berjudul “Dukungan Rakyat ke IYL-Cakka Mulai Diganggu”. Peristiwa seperti ini dimaknai oleh media adalah sebuah upaya dari rival politik untuk menjegal pasangan IYL-Cakka melaju ke Pilgub. Pemaknaan seperti ini dapat disebut sebagai kontruksi dari wartawan.

Oleh pandangan kontruksionis, media tidak dilihat sebagai saluran yang bebas, melainkan sebagai subjek yang mengkontruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Berbeda dari pemikiran kaum positivis yang melihat media sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita . Pandangan seperti ini, tentu saja melihat media bukan sebagai agen melainkan hanya saluran. Media dilihat sebagai sarana yang netral.(Eriyanto. 2002). Sementara secara etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Pendekatan kontruksionis menilai aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media.

“.....Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang ia lihat. Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu-umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu-adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkontruksi realitas.....”.(Eriyanto.2012 :32)

Pandangan ini sejalan dengan realitas yang terjadi pada pemberitaan harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel, di mana kedua media ini sama-

sama menunjukkan adanya keberpihakan kepada salah satu bakal calon yang menyatakan diri siap bertarung di Pilgub 2018 nanti. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dihimpung oleh peneliti, mayoritas pemberitaan yang dimuat di harian Rakyat Sulsel lebih condong ke pasangan IYL-Cakka, sementara Radar Makassar lebih menunjukkan keberpihakannya kepada NH-Aziz.

Analisis framing yang menjadi bagian dari paradigma kontruksionis juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa ,aktor, kelompok atau apa saja) yang dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut tentu saja melalui proses kontruksi. Bagaimana dan dengan cara apa peristiwa ditekankan dan ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan, luput, atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan. (Sobur.2009). *Framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana,khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik,kebijakan dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengumpamakan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*Strps of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.(Sobur. 2009).

“Secara sosiologis konsep frame analysis memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya. Skemata interpretasi itu disebut frames, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan member label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi.....Konsep framing dari para konstruksionis dalam literatur sosiologi ini memperkuat asumsi mengenai proses kognitif individual-penstrukturan representasi kognitif dan teori proses pengendalian informasi- dalam psikologi.” Ervin Goffman (Sobur, 2009 :163).

Framing juga dianggap sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing oleh Todd Gitlin, adalah sebuah strategis bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Frame adalah prinsip dari seleksi, penekanan, dan presentasi dari realitas. Ada dua aspek dalam *framing*, Pertama memilih fakta/realitas. Proses pemilihan fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan : apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Akibatnya pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat

tertentu:penempatan yang mencolok(menempatkan di headline depan,atau bagian belakang) ,pengulangan, pemakaian gratis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan,pemakaian label tertentu kita menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan ,asosiasi terhadap symbol budaya ,generalisasi ,simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok,gambar,dan sebagainya.(Eriyanto. 2002). Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi penonjol,lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok,mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Framing, kata Entman(Sobur.2009), memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Frames, menurutnya menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Politisi mencari dukungan dengan memaksakan kompetisi satu sama lain. Mereka bersama jurnalis membangun frame berita. Dalam konteks ini, lanjut Entman, framing memainkan peran utama dalam mendesak kekuasaan politik,dan frame

dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak-ia menunjukkan identitas para aktor atau interest yang berkompetisi untuk mendominasi teks. Namun Entman menyayangkan, banyak teks berita dalam merefleksikan permainan kekuasaan dan batas wacana atas sebuah isu, memperlihatkan homogenitas *framing* pada satu tingkat analisis, dan belum mempersaingkannya dengan *framing* yang lain.

G.J. Aditjodro dalam Sobur(2009:165-166) mengatakan :

“Proses framing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian meja cetak. Reporter di lapangan menentukan siapa yang diwawancarai. Redaktur, dengan atau tanpa berkonsultasi dengan redaktur pelaksana, menentukan apakah laporan si reporter akan dimuat ataukah tidak, dan menentukan judul apa yang akan diberikan..... Bahkan proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tetapi juga pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi-sisi informasi yang ingin ditonjolkannya, (sambil menyembunyikan sisi-sisi lain), sambil mengaksentuasikan kesahihan padangannya dengan mengacu pada pengetahuan, ketidaktahuan dan perasaan para pembaca.”

Ada beberapa hal yang dijadikan premis disini. Pertama, studi ini menyepakati bahwa praktik kekuasaan tidak terpusat ke dalam aparatus negara atau institusi-institusi politik saja sebagaimana pandangan kaum Hobbesian. Tetapi, memahami kekuasaan dalam konteks mikroanalisis sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Foucault. Karena itu, kerangka berpikir yang dipakai dalam studi ini meminjam beberapa konsep pokok dari Foucault tentang praktik kekuasaan dan *discourse*. Kedua, karena studi ini

melihat politik dalam kerangka analisis mikro, maka studi ini akan menyajikan bagaimana kerja politik keseharian dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat pada level yang paling dasar, yakni individu. Oleh sebab itu, konsep-konsep yang dipinjam dari pemikiran Foucault tidak lain akan sangat berkontribusi dalam menjelaskan proses terbentuknya kuasa di balik wacana media.

1. Pilgub 2018 dan Dinamika Politik di Sulsel

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perombakan, tonggaknya ketika masa pemerintahan Soeharto lengser pada tahun 1998, oleh sebuah demonstrasi besar-besaran yang menuntut penegakan demokratisasi di Indonesia. Pasca runtuhnya rezim Soeharto, Indonesia memasuki masa politik baru yakni masa Reformasi. Masa Reformasi ini sering juga disebut sebagai fase liberalisasi politik. Liberalisasi politik ini mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai dengan terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Contohnya, pada tataran masyarakat akar rumput (*grass root*), ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atau praktek penjarahan kolektif.

Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik.

Hingga kemudian pada tahun 2015 lalu untuk kali pertamanya Indonesia menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di 254 daerah dalam waktu yang bersamaan. Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya pilkada serentak: Pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Kedua, untuk memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme. (Perluden: 2015).

Sebanyak 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang telah menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2015 lalu. Selanjutnya Pilkada serentak tahap kedua juga dilaksanakan pada Februari 2017 di 7 provinsi, di 76 kabupaten, dan 18 kota. Meski pilkada serentak yang hadir di bawah payung hukum Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 belum mampu sepenuhnya menecapai ketiga tujuan yang disebutkan di atas, namun mekanisme pemilihan kepala daerah masih diadopsi saat ini dengan akan dihelatnya Pilkada serentak tahap ketiga pada Juni 2018 di 17 provinsi, 115

kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. (PresidenRI.go.id).

Provinsi Sulsel di mana termasuk di dalamnya daerah yang akan menggelar hajatan pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada 2018 mendatang, telah terjadi banyak pergolakan dan dinamika politik. Setidaknya ada empat nama besar yang masuk sebagai bursa calon kandidat terkuat dengan tingkat elektabilitas tertinggi di Pilgub berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Selasa, 13 Juli 2017 lalu. Dalam survei yang dilakukan pada 18-24 Mei 2017, empat kandidat tersebut adalah Nurdin Abdullah, Ichsan Yasin Limpo, Nurdin Halid, dan Agus Arifin Nu'mang. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, empat kandidat tersebut selalu unggul dari simulasi dengan total 27 kandidat bakal calon gubernur. Dengan simulasi empat kandidat saja, elektabilitas Nurdin Abdullah menempati urutan pertama dengan 17,40 persen. Kemudian, disusul Ichsan Yasin Limpo dengan 14,69 persen; Nurdin Halid 13,27 persen, dan Agus Arifin Nu'mang 11,21 persen. Analisis temuan survei ini menyimpulkan, keempatnya merupakan figur yang berpotensi menjadi kandidat kuat dalam Pilkada Sulsel 2018. (Robertus. Kompas.com).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri secara resmi telah meluncurkan jadwal tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

serentak 2018. Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 4 disebutkan tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Sementara kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai pada 14 Juni 2017 lalu, kemudian disusul pembentukan PPK dan PPS yang akan dimulai pada 12 Oktober 2017. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017. KPU akan mulai melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017. (Kompas.com).

Berdasarkan data pemilih tetap (DPT) pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 lalu, total pemilih Sulsel sebanyak 6.323.711, dengan jumlah pemilih laki-laki 3.065.094 orang, lebih sedikit dari jumlah pemilih perempuan sebanyak 3.258.617 orang. (KPU.go.id). Data pemilih ini oleh KPU Sulsel diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 679 ribu pada Pilgub Sulsel mendatang. Berdasarkan berita yang dimuat di harian Radar Makassar pada Senin 31 Juli 2017, dengan judul "Jumlah Pemilih Sulsel Melonjak 679 Ribu", KPU Sulsel memprediksi jumlah pemilih pada Pilgub 2018 mendatang naik sekitar 10 persen dari data DPT saat Pilpres 2014. (Radar Makassar).

" Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif menjelaskan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kemungkinan akan bertambah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya. Berdasarkan data Pilpres tahun 2014, sebanyak 6,4 juta pemilih. Jumlah ini diprediksi meningkat menyusul bertambahnya penduduk Sulsel. "Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi kemungkinan

peningkatan mencapai 7,2 juta. Tapi kami akan tetap menunggu proses data pemutakhiran yang ada. Tapi data itu akan fainal setelah proses pemutakhiran. DPT itu pun masih bisa merubah, karena DPT sampai tahapan pemilih masih ada 2 sampai 3 bulan. Maka masih ada kesempatan yang belum terdaftar untu mendaftar," tuturnya. Artinya jika KPU memprediksi jumlah pemilih bakal naik dari 6,4 juta menjadi 7,2 juta, sebanyak 678 ribu pemilih baru yang akan menggunakan hak suara mereka pada Pilgub mendatang. Lanjut Iqbal pada PKPU tahun ini ada beberapa perubahan yang signifikan. Khususnya yang berkaitan dengan kampanye. Teruntuk waktu lama kampanye, dijelaskan Iqbal dari Pilkada sebelumnya yang hanya sekitar 90 hari berubah meningkat menjadi kurang lebih 120 hari. "Jadi ada kenaikan jumlah lama kampanye. Itu maksudnya supaya Paslon ini lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat langsung," tuturnya. Selain itu petugas ad hoc juga akan bertambah. "Tapi kalau kita melihat kemungkinan dari jumlah TPS yang ada, maka memang itu ada penambahan. Yang pertama karena kecamatan kita di Sulawesi Selatan kan bertambah, tadinya 306 menjadi 307. Kemudian PPS kita di Sulsel kan bertambah, tadinya 323 menjadi 3040-an lebih. Ini tentunya akan berimplikasi pada tenaga yang akan kita rekrut," ungkap Iqbal Latif saat ditemui usai melakukan sosialisasi PKPU di Kantor KPUD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (27/7). Dalam aturan PKPU Pilkada serentak 2018, paslon dimungkinkan untuk memproduksi alat peraga kampanye dengan bata - batas yang ditentukan. Menurut Iqbal pada umumnya APK hanya bisa digandakan maksimal 50 persen yang diproduksi oleh KPU. "Tapi itu nanti bisa dia lakukan harus ada koordinasi dan kesepakatan dengan KPU," jelasnya.

Pada pertengahan Juli lalu Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Selatan bersama KPU Setempat juga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan gubernur tahun 2018. Dalam perjanjian tersebut, disepakati alokasi anggaran sebesar Rp456 miliar, meningkat dibanding Pilgub 2013 senilai Rp318 miliar. Pencairan anggaran dibagi dua tahap. Pada tahap I di tahun 2017 senilai Rp77 miliar lebih, tahap

Il pada tahun depan senilai Rp379 miliar lebih. Untuk Pilgub 2018, KPU Sulsel sebenarnya mengajukan usulan anggaran senilai Rp470 miliar. Namun setelah rasionalisasi di Pemprov, nilainya berkurang menjadi Rp460 miliar. Adapun Rp456 merupakan angka final usai diverifikasi oleh Inspektorat tingkat provinsi. Dalam salah satu berita online yang dikutip Metrotvnews.com Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif menerangkan :

".....Iqbal mengungkapkan, anggaran pilgub akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan, yang dimulai pada Agustus mendatang. Anggaran ini diperkirakan cukup untuk pilkada dengan maksimal tujuh pasangan calon gubernur. Masing-masing tiga pasangan calon dari partai politik dan tiga dari jalur perseorangan. Nantinya, anggaran akan disebar kepada KPU Kabupaten/kota. Pada 12 daerah yang juga menggelar pemilihan bupati atau wali kota, akan mendapatkan jatah total Rp86 miliar. "Sisanya kita kelola untuk pengadaan logistik, bimtek dan kegiatan lainnya. Kami harap mampu memenuhi kebutuhan sesuai mekanisme yang akuntabel dan transparan," ujar Iqbal....."

Meski anggaran tersebut dipersiapkan untuk membiayai enam hingga tujuh pasang calon, namun diprediksi Pilgub Sulsel hanya akan diikuti tiga atau empat kandidat saja, melihat konstalasi politik dan jumlah kursi partai politik yang ada di DPRD Sulsel. DPRD Sulsel memiliki 85 anggota yang terbagi ke dalam 10 fraksi. Jumlah anggota DPRD Sulsel periode 2014-2018 ini bertambah 10 orang dibandingka dengan periode sebelumnya, 2009-2014, yang berjumlah 75 orang. Penambahan kursi terjadi karena pertambahan penduduk Sulawesi Selatan. Berikut adalah jumlah perolehan kursi dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel.(Wikipedia) :Fraksi Golkar (18

kursi), Demokrat(11 kursi), Gerindra (11 kursi), PAN (9 kursi), NasDem(7 kursi), PPP(7 kursi), PKS (6 kursi), Hanura(6 kursi), PDI-P(5 kursi), dan Fraksi Ummat Bersatu yang terdiri atas gabungan partai PKB, PKPI, dan PBB(5 kursi).

2. Kuasa dalam Regulasi Wacana

Studi wacana dalam politik sangat dipengaruhi oleh pendekatan post strukturalis, yang memandang kemunculan realitas sosial bukan karena keinginan sejarah, melainkan karena kepentingan dari kekuasaan. Dalam pendekatan ini, kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tidak produktif, yakni bekerja dengan cara menindas. Sebaliknya, kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat produktif yang dapat mengkonstruksi dunia sosial melalui cara-cara tertentu.(Jorgensen dan Louse, 2007).

Dalam memproduksi kekuasaan, pendekatan post strukturalis menempatkan peran penting wacana dalam proses pembentukan realitas sosial. Tanpa adanya produksi, akumulasi, sirkulasi dan pemfungsian wacana, kekuasaan tidak dapat dengan sendirinya dibangun, dikonsolidasikan maupun diimplementasikan. Pengetahuan yang hadir dalam wacana tidak dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang obyektif. Pengetahuan memberikan klaim kebenaran bagi agen kekuasaan melalui

penciptaan ukuran kriteria-kriteria dan prosedur-prosedur. Dengan klaim kebenaran ini, kekuasaan akan dapat mengontrol penerima wacana yang disebarkannya.

Dengan demikian pendekatan wacana, yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah memahami wacana bukanlah sebagai medium netral di luar subyek penyebar wacana. Pemegang kekuasaan memproduksi wacana di bawah kondisi dan kepentingan tertentu untuk meraih kontrol. Bahasa sebagai alat wacana dianggap sebagai representasi yang berperan pula dalam membentuk jenis-jenis subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu maupun strategi-strategi di dalamnya. Bahasa dalam suatu wacana menjadi representasi, karena wacana tersusun dalam sebuah tatanan bahasa yang masuk akal. Tatanan ini disebut dengan *structure discoursif*. (Sobur, 2009). Struktur inilah yang membentuk cara seseorang mempersepsikan suatu obyek. Struktur diskursif yang berbeda dapat membuat sebuah obyek yang sama, dipersepsikan secara berbeda. Perbedaan cara pandang ini dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan akan melahirkan aksi yang berbeda pula.

Dalam sejarah pengetahuan, Foucault (2002) mengkaji wacana dengan memperhatikan aspek pengetahuan bahasa, dan bagaimana penggunaan bahasa diartikulasikan dalam praktik sosial. Wacana dimaknai sebagai “motor

penggerak” pengetahuan, dimana kuasa terdapat di dalamnya. Kajian wacana Foucault menekankan pada relasi kekuasaan. Artinya kuasa dibangun, diterapkan, dan dipelihara melalui regulasi wacana. Kekuasaan terlaksana melalui wacana, dan wacana selalu berakar pada kekuasaan.

Kemampuan wacana membangun klaim kebenaran membuat wacana mampu melestarikan ataupun mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Pengkonstruksian dunia sosial tidak hanya disusun oleh satu wacana, tetapi oleh banyak wacana. Meskipun demikian akan selalu ada wacana dominan yang berperan besar mengkonstruksi realitas. Pola hubungan yang terbangun akibat dominasi wacana itu dapat disebut dengan hubungan hegemonik.(Eni.2010) Dalam pola hubungan hegemonik, kelompok yang berkuasa memproduksi wacana yang dapat membuat seseorang, komunitas, masyarakat ataupun sebuah kelas sosial dapat dikontrol. Kemampuan ini muncul karena wacana yang diproduksi mampu menginternalisasi, sehingga menjadi sebuah konsensus kebenaran yang harus dijalankan.

Meskipun ada wacana dominan yang mampu menghegemoni, namun penulis tidak sepakat dengan cara pandang hegemoni akan bersifat statis. Hal ini karena tatanan sosial tidak dibangun hanya oleh satu wacana melainkan beragam. Karena manusia mempunyai kapasitas untuk

merefleksikan dan membandingkan wacana. Hal inilah yang mengakibatkan masing-masing wacana akan saling berinteraksi. Dengan demikian, hegemoni tidak hanya sebuah proses dominasi, tetapi juga proses negosiasi yang melahirkan konsensus tentang makna. Dalam negosiasi tersebut, masing-masing wacana dapat saling meniadakan, namun juga dapat saling mendukung. Unsur-unsur yang menentang wacana dominan akan membekali pengikutnya dengan sumber daya untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, hegemoni tidak akan pernah berlangsung stabil, namun senantiasa berubah dan tidak pernah selesai. Konsensus yang dibangun selalu berkaitan dengan masalah derajat keseimbangan hubungan antar wacana yang tidak stabil. Wacana dominan akan berdampak serius. Pertama, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu obyek harus dibaca dan dipahami karena wacana tersebut memberikan pilihan yang tersedia dan siap pakai. Pandangan yang lebih luas menjadi terhalang karena dibatasi oleh batas-batas diskursif tersebut. Kedua, batas-batas yang diciptakan oleh struktur diskursif bukan hanya membatasi pandangan kita, tetapi juga menyingkirkan wacana lain yang tidak dominan. (Hamad, 2004).

Dengan demikian, penulis menempatkan perhatian terhadap wacana sebagai bagian utama dalam analisis politik. Dalam pendekatan ini, wacana dipandang sebagai sebuah bentuk praktik sosial yang berada dalam hubungan dialektis dengan realitas sosial yang lain. Wacana dapat

mengkonstruksi dunia sosial, namun produksi wacana juga dipengaruhi oleh dunia sosial misalnya pergolakan politik yang semakin dinamis di Pilgub Sulsel akan berimplikasi pada kualitas pendewasaan demokrasi yang termanifestasi lewat proses pilkada.

Wacana sendiri adalah istilah yang dipakai oleh berbagai disiplin ilmu, mulai dari politik, sosiologi, linguistic, psikologi, komunikasi dan sebagainya. Setiap disiplin ilmu tersebut terkadang berbeda dalam konsepsi dan pendekatan yang dipakai. Definisi mengenai wacana dalam Eryanto (2005:2) antara lain:

- a. Collin Concise English Dictionary, 1999. Wacana adalah (1) komunikasi verbal, ucapan, percakapan; (2) sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau tulisan; (3) sebuah unit teks yang digunakan oleh linguis untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat.
- b. Roger Fowler, 1977. Wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya, kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.
- c. Foucault, 1972. Wacana kadangkala sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), kadangkala sebagai sebuah

individualisasi kelompok pernyataan dan kadangkala sebagai praktik regulative yang dilihat dari sejumlah pernyataan.

Dalam analisis wacana pendekatan Foucault, kuasa tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan(Halwati.2013).

"Untuk mengetahui relasi kuasa/pengetahuan dikonstruksi, dapat dilakukan analisis wacana menurut Foucault yang meliputi analisis arkeologi pengetahuan yang memungkinkan penyelidikan peristiwa- peristiwa wacana, pernyataan yang dibincangkan dan dituliskan. Foucault melengkapi perangkat analisis dengan genealogi kuasa untuk mengungkap keterkaitan antara pengetahuan dan kuasa. Analisis wacana mengacu pada pemikiran Michel Foucault meliputi metode analisis genealogi kuasa dan analisis arkeologi pengetahuan. Dalam analisis genealogi kuasa, tugas genealog adalah memeriksa rangkaian wacana terbentuk; analisis hubungan kesejarahan antara kuasa dengan wacana"(Foucault, 1994:387 dalam Halwati. 2013).

Proses genealogi adalah memeriksa serangkaian wacana terbentuk, analisis hubungan kesejarahan antara kuasa dengan wacana dan bukan menyelidiki suatu konspirasi melalui kesadaran aktor-aktornya (Ritzer, 2003: 78-80). Suatu teks di media massa dapat dilihat adanya keterjalinan antar teks dengan teks sebelumnya. Teks berfungsi dalam kaitannya dengan situasi awalnya. Teks-teks yang terlibat di media massa meninggalkan jejak-jejak di belakang yang menentukan kaitannya dengan teks sebelumnya. Arkeologi pengetahuan memungkinkan penyelidikan peristiwa-peristiwa wacana, pernyataan-pernyataan yang dibincangkan dan dituliskan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui analisis kearsipan suatu teks. Menurut Foucault, objek kajian penelitian ini terletak pada arsip (dokumen), yang merupakan akumulasi dari keberadaan wacana. Arkeologi adalah analisis wacana dalam bentuk kearsipannya. Arkeologi menggambarkan wacana-wacana sebagai praksis-praksis yang dikhususkan dalam elemen sebuah arsip. (Halwati.2013)

Berbicara kekuatan media dan komunikasi, pendekatan Manuel Castells mengundang banyak perhatian besar belakangan ini. Dalam bukunya yang berjudul *Communication Power*, Castells mendefinisikan kekuasaan komunikasi sebagai bentuk kekuatan jaringan. (Fuchs.2015 :13) :

“The relational capacity that enables a social actor to influence asymmetrically the decisions of other social actor(s) in ways that favor the empowered actor’s will, interests, and

values". Power is associated with coercion, domination, violence or potential violence, and asymmetry."

Sementara Giddens dalam teori struktuttrasi melihat kekuasaan tidak selalu memaksa, keras dan asimetris didistribusikan. Oleh karena itu menjadi mungkin untuk memahami dan menganalisis situasi dan sistem sosial di mana kekuasaan lebih simetris didistribusikan. Misalnya situasi dan sistem demokrasi partisipasif. Keakuasaan sebagai kapasitas transformatif tampaknya memang menjadi aspek fundamental dari semua masyarakat. Ini juga berarti bahwa ada perbedaan besar antara pendekatan Giddens dan Castells dalam teori strukturasi. Gagasan Castells tentang kekuasaan adalah bahwa ia melihat koersif, kekerasan, hubungan kekuasaan dominatif sebagai hubungan dasar masyarakat sepanjang sejarah, geografi dan budaya. Selanjutnya, Castells menolak "gambar naif dari manusia didamaika masyarakat, utopia normatif yang mendustakan dengan observasi sejarah.

Sementara John B. Thampson dalam Fuchs (2015) membedakan empat bentuk kekuasaan:

Empat Kekuasaan Menurut John B Thamsom

Jenis Kekuasaan	Definisi	Sumber	Lembaga
<p>Kekuata Ekonomi</p>	<p>Kekuatan ekonomi bersasal dari manusia kegiatan produktif yaitu, aktivitas prihatin dengan penyediaan sarana subsisten melalui ekstrasi baku bahan dan mereka transformasi menjadi barang yang bisa dikonsumsi dan dipertukarkan dalam pasar.</p>	<p>Sumber Material dan Keuangan</p>	<p>Lembaga Ekonomi</p>
<p>Kekuatan Politik</p>	<p>Kekuasaan politik “Batang dari aktivitas mengkoordinasikan individu dan mengatur pola interaksi mereka</p>	<p>Wewenang</p>	<p>Lembaga Politik (misalnya negara</p>
<p>Kekuasaan</p>	<p>Kekuasaan koersif</p>	<p>Fisik dan</p>	<p>Paksaan</p>

Koersif	melibatkan penggunaan atau memaksa penggunaan terancam, dari kekuatan fisik untuk menundukkan atau menaklukkan lawan	Bersenjata	Lembaga (polisi militer, lembaga carceral ,dll)
Kekuatan Simbolik	Kekuoatan simbolik adalah kapasitas untuk campur tangan dalam peristiwa, untuk mempengaruhi tindakan orang lain dan memang untuk membuat peristiwa,dengan cara produksi dan transmisi bentuk simbolik	Sarana Informasi	Kultural lembaga (Gereja, sekolah,univer sitas, media dan lain-lain)

Tabel : 2.2

“...The problem of Thompson’s approach is that the media’s power is reduced to the symbolic dimension and that the relationship of violence and power is unclear. Symbolic power is an important dimension of the media: the media not only have form,

<17> but also communicate content to the public, which allows attempts to influence the minds of the members of the public. But ideology is not the only aspect of the media, the media are rather a terrain where different forms of power and power struggles manifest themselves: the media have specific structures of private or public ownership that tend to be concentrated. There are attempts to politically control and influence the media and the media often have political roles in elections, social movement struggles, etc. Violence is a frequent topic in media content. The media are not just a realm of symbolic power, but rather material and symbolic spaces, where structures and contradictions of economic, political, coercive and symbolic power manifest themselves.” (Fuchs. 2015 :13)

Seperti definisi kekuasaan yang dipaparkan Thamsan, Couldry juga melihat kekuasaan pada dimensi simbolik dan budaya media. Di mana ia melihat kekuatan media sebagai konsentrasi di lembaga-lembaga media yang memiliki kekuatan simbolik dalam mengkonstruksi realitas. Sementara James Curran mengidentifikasi 11 dimensi kekuasaan media dan 7 dimensi media kontra-daya. Dimensi tersebut lalu diklasifikasi menjadi tiga kekuatan media yakni, kekuatan media yang ekonomi, kekuasaan politik dalam media dan kekuatan media dalam budaya. Curran menekankan bahwa kekuatan media yang tidak hanya simbolik, tetapi multidimensi. Perbedaan tiga alam masyarakat (ekonomi, politik, budaya) memungkinkan kita untuk mengklasifikasi bentuk kekuatan media. Berikut kekuasaan dan kontra kekuatan di media menurut Curran dalam Fuchs (2015) :

Kekuasaan dan Kontra Kekuatan Media Menurut Curran

Dimensi	Bentuk Kekuatan Kekuasaan Media	Bentuk Kontra Kekuatan Media
Kekuatan Media yang Ekonomi	<p>Media dimiliki secara pribadi, biaya operasi yang tinggi, pengaruh perusahaan berkonsentrasi melalui iklan.</p> <p>Tekanan pasar untuk menghasilkan homogeny (sering tidak dikritis)dengan lebar menarik;</p> <p>konten yang menarik bagi konsumen kaya;</p> <p>distribusi yang tidak merata sumber daya ekonomi (uang) memungkinkan elit ekonomi yang pengaruh</p>	<p>Media akar rumput, dana masyarakat untuk media alternatif ; media public alternatif.</p> <p>Kekuatan staf (misalnya kritis jurnalisme,investigasi pelaporan).</p> <p>Kekuatan konsumen (misalnya dengan dukungan dari media alternative dalam bentuk donasi).</p>

	dan kontrol media)	
Kekuatan Media yang Politik	Negara sensor media; PR besar (Politik dan ekonomi organisasi) hasil lobi birokrasi aparatur yang bertujuan untuk mempengaruhi media; distribusi yang tidak merata sumber daya politik(pengaruh kekuasaan, politik hubungan)memungkinkan ekonomi elit lebih berpengaruh pada dan kontrol media.	Regulasi media yang menahan kualitas, pelaporan yang adil,keragaman,kebebabsan berekspresi,berkumpul dan pendapat;sumber berita alternatif Distribusi keadaan sumber dari lebih kuat untuk kurang kuat
Kekuatan media budaya	Fokus pada konten lembaga prestise,selebriti dan orang lain yang memiliki reputasi tinggi;ideology dominan mempengaruhi media	Pencitraan kontra organisasi yang mengembangkan kontra-wacana dan beroperasi media mereka sendiri.

	<p>dominan tingkat tertentu;distribusi yang tidak merata sumber daya(reputasi prestise)memungkinkan ekonomi lebih berpengaruh pada dan kontrol media</p>	
--	--	--

Tabel : 2.3

Antonio Gramsci memberikan defenisi Marxis klasik terhadap lahirnya sebuah kelas. Sumbangannya yang nyata terlihat pada analisisnya mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Ia mengambil contoh munculnya kelas kapitalis dan membedakan tiga fese perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase yang pertama adalah fase ekonomi-korporasi, sedang yang ketiga adalah fase hegemonik. Fase pertama ; ketika seorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain,seorang pengusaha dengan pengusaha lain, dan sebagainya ; namun pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok professional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu,namu mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain ke dalam kelas yang sama. Fase

kedua ; fase di mana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas- namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum dengan kelompok yang berkuasa. Fase ketiga, adalah fase hegemoni, di mana orang menjadi sadar bahwa kepentingan perusahaannya, dalam perkembangan di masa sekarang dan mendatang, melampaui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi, dan kepentingan itu dapat dan harus menjadi kepentingan dari kelompok yang rendah. Ini adalah tahap yang murni politik. (Roger. 2004).

Sebagai sebuah konsep, relasi kuasa atau kekuasaan selalu hadir dalam setiap hubungan antara manusia atau antar kelompok sosial. Dalam setiap relasi selalu ada hubungan kekuasaan. Banyak pemikir yang mengajukan teori sosial ini, baik dari dalam wacana politik atau sosiologi. Dalam penelitian ini konsep tentang relasi kekuasaan yang akan ikut digunakan adalah yang diajukan Michel Foucault. Kuasa dalam pandangan Foucault tidak dimiliki melainkan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Strategi kuasa berlangsung di mana-mana dan merupakan bagian dari setiap hubungan yang terjadi, tidak semata dikaitkan dengan orang atau lembaga tertentu khususnya aparat negara. (Ritzer.2009).

Berbeda dengan konsep hegemoni Gramsci, yang melihat hegemoni sebagai perlawanan terhadap sumber kekuasaan yang tunggal, bagi Foucault kuasa itu bukan milik penguasa, akan tetapi kuasa itu menyebar seperti di tangan LSM, media, ilmuan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Jadi dengan pendekatan ini, kita bisa melihat bahwa di dalam tubuh media massa, kekuasaan itu tidak tunggal, tetapi tersebar luas, mulai dari pemilik media hingga wartawannya. Relasi yang dibangun oleh masing-masing agen ini akan menentukan kekuasaannya.

Salah satu konsep Foucault lainnya yang menarik untuk dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan menurutnya selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya dan hampir mustahil kekuasaan akan bertahan tanpa ditopang pengetahuan. Jadi, pengetahuan tidak hanya menampilkan secara samar relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada dalam relasi kuasa itu sendiri. (Foucault.2012).

Membongkar relasi kuasa ini dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan, karena setiap kekuasaan disusun, dimampatkan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Jadi wacana tertentu akan menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu,

yang berikutnya akan menghasilkan kuasa. Kebenaran dalam pengertian ini, tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga konsep abstrak, melainkan diproduksi. Karena pada dasarnya setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri dan dengannya masyarakat akan digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut.(Foucault.2012).

3. Diskursus Media dalam Proses Politik

Marx yang melatarbelakangi pemikiran kritis menyatakan bahwa media adalah tempat di mana pertarungan ideologi terjadi. Sementara Habermas sebagai salah satu pemikir dari aliran ini menegaskan bahwa media merupakan sebuah realitas di mana ideologi dominan dalam hal ini pemilik modal disebarkan kepada khalayak dan membentuk apa yang disebutnya sebagai kesadaran palsu(*false consciousness*). Kesadaran ini merupakan kesadaran yang terbentuk atas dasar kepentingan kelompok dominan sehingga kepentingan mereka tetap terjaga. Media dalam prakteknya adalah ruang di mana ideologi dipertarungkan untuk mendapat tempat dalam benak khalayak. Siapa yang bertarung dalam kehidupan media menjadi penting untuk dilihat kekuasaannya. Siapa yang mampu memanfaatkan kekuasaannya dalam mempengaruhi media ?seberapa besar kekuasaan tersebut bermain dalam praktek media tersebut ? Dengan kata lain media

tidak saja sekedar sebuah saluran komunikasi akan tetapi juga sebagai sebuah institusi yang telah menjadi bagian dari masyarakat dengan pertarungan ideologi di dalamnya.(Eni, 2011).

Awalnya media massa merupakan komponen yang dibutuhkan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah yang berkuasa atau negara. Fungsi tradisional media massa diposisikan sebagai “*watch dog*” kekuasaan bahkan diletakkan sebagai kekuatan the *fourth estate of democracy*, pilar keempat demokrasi di luar kekuatan eksekutif, legislative dan yudikatif . Dalam konteks itu, demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan pers, tujuannya tidak lain merupakan kekuatan kontrol terhadap kekuasaan. Perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi, dan komersialisasi media massa telah memunculkan pergeseran. Dewasa ini media massa sendiri telah menjadi kekuatan yang berpengaruh secara politik, ekonomi, dan budaya. Kekuatan media massa justru bisa menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi.

Studi James Curran dan Jean Seaton, mengungkapkan(Subiakto, 2014 :122) :

“Perjalanan industrialisasi dan globalisasi media massa di Inggris dan Amerika Utara. Mereka menyampaikan kritik terhadap liberalism media serta mengungkap bahayanya. Isi media massa tidak saja memiliki konsekuensi yang luas, tetapi juga mampu membentuk khalayak, menciptakan kelas, dan selera tertentu”.

Menurut dua peneliti ini liberalisme perkembangan media justru mendorong demokrasi. Pertama, Penerapan *free market* akan menghambat

kebebasan publisitas (*freedom to publish*). Menciptakan kondisi media sebagai bisnis yang membutuhkan modal besar. Mereka yang mampu mengelola dan memiliki media massa hanyalah orang yang bermodal kuat, sehingga bersifat elitis. Kedua, liberalisme dan pasar bebas juga mereduksi perputaran informasi publik, dan meningkatkan jumlah masyarakat yang tidak *well informed*. Hal ini dikarenakan semakin besarnya porsi penempatan isi hiburan atau *human interest*, sekaligus meminggirkan liputan *public affairs*, atau program yang mencerdaskan. Ketiga, *Fref market* menghambat partisipasi dalam debat public. Keempat, pasar cenderung mengabaikan debat yang rasional dan cerdas. Media yang berorientasi pada pasar cenderung membangkitkan informasi yang disimplifikasi, bersifat personal, tidak kontekstual, menekankan tindakan daripada melihat kompleksitas manusia. (Subiakto, 2014).

Analisis ini dikemukakan oleh Noam Chomsky yang khawatir pada gerak masyarakat kapitalis liberal, yang mulai “kong-kalingkong” dengan model propaganda baru. Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya senjata dan uang. Para elit kekuasaan dan elit bisnis berkaleborasi mengatur isi media. Akibatnya, menurut Chomsky kebebasan pers yang dijiwai demokrasi dan liberalisme, telah disusupi corong-corong propaganda segelintir orang. Setiap keping informasi telah disusupi

kepentingan tertentu. Setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis.(Subiakto dan Ida. 2014).

Chomsky menganalisa adanya konspirasi para elite yang melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Dengan menggunakan istilah “*manufacturing consent*”, tokoh kritis ini melihat media menjadi alat kepentingan politik, ekonomi, militer, dan kultur kalangan eksklusif. Menurutnya, para *gatekeeper* media menjadi pion politisi dan industriawan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, atas nama kepentingan bangsa, para pejabat mengatur pemberitaan sesuai keinginan mereka. Adapun atas nama pertumbuhan ekonomi, para pebisnis atau pedagang melakukan hal yang sama. Inilah yang disebut sebagai kekuatan ekonomi politik dalam pemberitaan di media.

Pendekatan ekonomi-politik media biasanya memusatkan perhatian pada bagaimana situasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi arah perkembangan industri media, ideologi media, serta pemberitaannya. Situasi ekonomi ini meliputi kepemilikan dan komersialisasi media, sedangkan kondisi politik bisa berupa mekanisme perundangan dan kebijakan pemerintah. Dalam pendekatan ini, ideologi dipandang sebagai subordinat dari ekonomi. Sedangkan untuk mengetahui determinasi ekonomi, pendekatan ini biasanya memiliki ciri khas bersifat historis. Menurut Henri Lefebvre dalam tulisannya yang berjudul “*The Production of Space*”,

ruang sosial merupakan produk sosial yang diproduksi secara sosial oleh pengguna ruang tersebut. Ruang sosial bentukan media menjadi semacam arena atau sarana pertukaran informasi dan pertukaran wacana. Tarik ulur ruang itu diperantai oleh media. Media memediasi ulang kedua realitas dan kedua ruang. Proses mediasi ini dapat berjalan cepat oleh karena melalui perantara digital.(Haryadi,2015).

Dalam hiruk pikuk kontestasi politik 2014, seperti yang ditulis Hariadi, media baik cetak, elektronik, maupun *new media* turut membawa sekaligus mencampuradukkan berbagai macam ruang. Ruang sosial tidak jarang digiring ke dalam ruang media berbasis elit. Kampanye dalam industri media televisi misalnya, para kandidat dengan berbagai jaringan media yang dimilikinya mengambil ruang-ruang sosial milik masyarakat secara instan, pragmatis, dan sporadis. Para capres mendadak akrab memotong pada bersama petani, menyapa nelayan, menggendong anak-anak di gang-gang sempit tepi sungai dan sebagainya. Kedua hal tersebut kemudian bersinergi dengan kepentingan oligarki secara simultan dan inheren melalui hubungan kausalistik. Media membutuhkan kapital dan oligarki memastikan adanya loyalitas publik secara besar. Keduanya kemudian bertemu dalam praktik jurnalisme. Pada taraf inilah kemudian, pemaknaan jurnalisme sebagai bentuk media pencerahan maupun media pendidikan berubah menjadi media untuk kepentingan penguasa atau pemilik modal.

Di tengah situasi ini, media sendiri juga saling berkompetisi satu sama lainnya untuk sekedar mempertahankan eksistensinya di dunia jurnalisme baik dalam memperebutkan iklan maupun juga segmen pembaca. Dana produksi maupun konsumsi yang besar juga menuntut mereka untuk survive. Bagi media cetak, tekanan ekonomi politik ini semakin tinggi dewasa ini di tengah menurunnya tren pembaca media cetak, dibandingkan media online atau media sosial. Penurunan tren pembaca ini, berarti juga penurunan oplah dan kue iklan. Tak mengherankan jika semakin banyak media cetak yang tutup akhir-akhir ini, termasuk juga di Indonesia. Dari gambaran ini, jelas terlihat bahwa siapa pihak (kelas) yang diuntungkan, dan siapa dirugikan dari dinamika ini akan menjadi bagian penting dalam kajian ekonomi politik. Seperti disebutkan Golding dan Murdock (1991), analisis ekonomi politik selalu berkenaan dengan produksi makna sebagai praktik kekuasaan, analisis tekstual, dan konsumsi media.

C. Kerangka Fikir dan Hipotesis

Slogan bahwa media idealnya harus independen dan tidak memihak pada kelompok dan kepentingan politik tertentu, utamanya dalam perhelatan Pilgub Sulsel 2018 mendatang patut kita uji kebenarannya dalam penelitian ini. Keterbelahan pemberitaan bakal calon Gubernur Sulsel yang terbit di media, antara harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel menunjukkan adanya sistem jaringan perilaku antar aktor politik dan aktor ekonomi

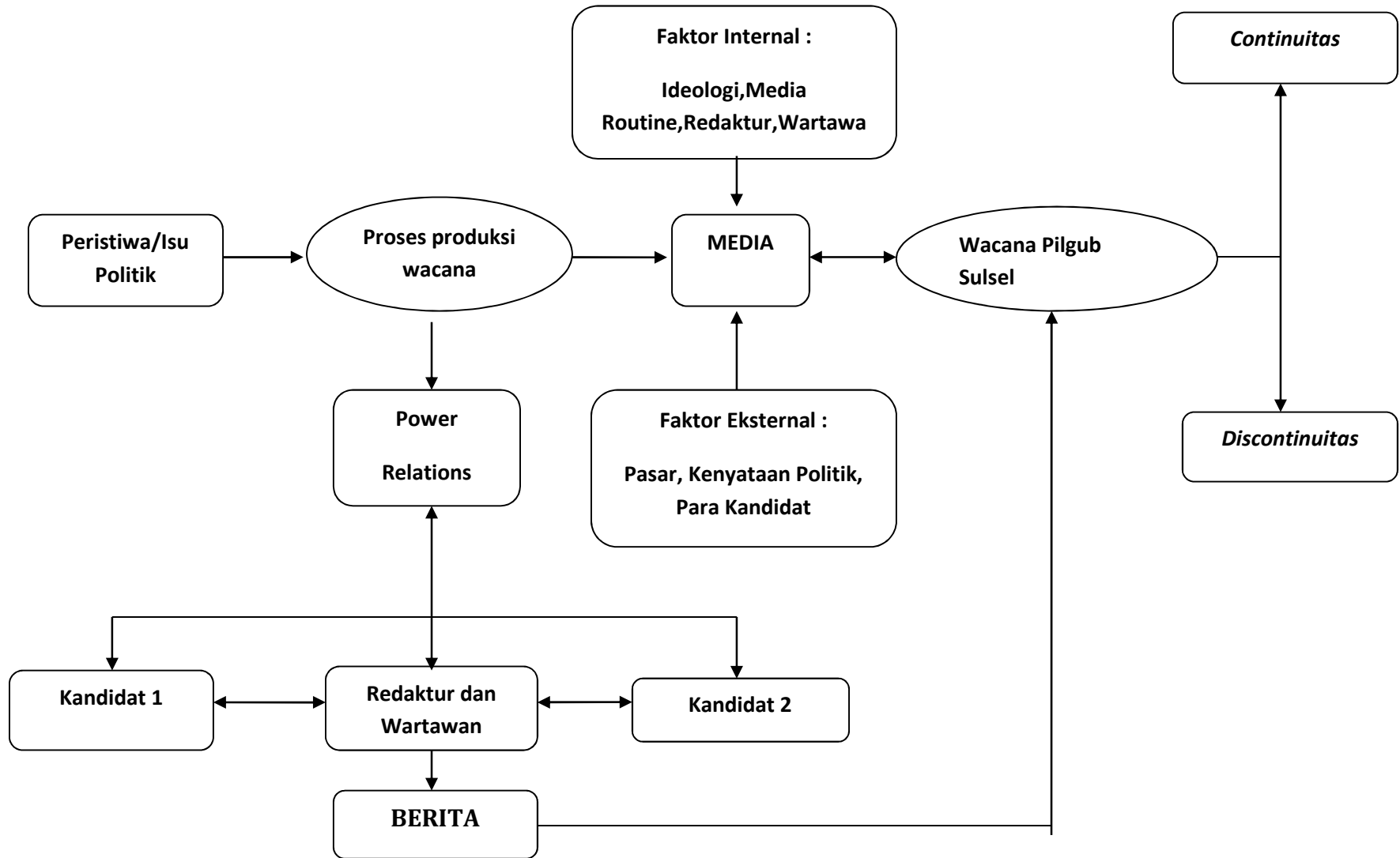
bertemu dalam satu kepentingan yang dapat mempengaruhi wacana pemberitaan pada kedua media tersebut. Aktor-aktor yang relevan dari jaringan kerja yang sama akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk mempengaruhi khalayak untuk menggolkan wacana utama yang mampu mewakili berbagai kepentingan mereka.

Seperti yang dikisahkan di bagian awal, dinamika ruang redaksi pada kedua media yakni Radar Makassar dan Rakyat Sulsel telah melahirkan wacana yang saling bertentangan. Ada teks yang bisa dibaca publik memihak pada salah satu calon kandidat tertentu di Pilgub. Dinamika ini menunjukkan bahwa ruang redaksi di sebuah media massa, yang menjadi lokus produksi teks telah menjadi medan laga yang mempertemukan banyak kepentingan. Dugaan penulis jejaring kekuasaan ini berlapis-lapis mulai dari kepentingan yang bersifat individual, organisasi, hingga ekonomi politik.

Secara umum, politik media dalam konteks ini dipahami sebagai jaringan hubungan antara aktor politik ataupun ekonomi, yang berkepentingan terhadap proses pengembangan wacana dalam sebuah tema tertentu dalam perhelatan di Pilgub Sulsel. Artinya masing-masing aktor akan saling terkait dalam sebuah korporasi tindakan yang relevan satu dengan yang lainnya. Selain campur tangan pemilik modal dan aktor politik, ruang redaksi di mana pemberitaan diproduksi ikut ambil bagian bagaimana wacana tersebut dikonstruksikan kepada khalayak atau pembaca. Berikut ini

adalah kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian ini :

Kerangka Berfikir



Uraian Rencana Kerja	2017																2018															
	Juli				Agustus				Sep				Okto				Nov				Des				Jan				Feb			
	Minggu Ke																															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Penelitian (Pengumpulan berita)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																				
Perencanaan									█	█	█	█	█	█	█	█																
Penelitian																	█	█	█	█	█	█	█	█								
Pengelolaan Data																					█	█	█	█								
Penyusunan Laporan																													█	█	█	█
Uraian Rencana Kerja	2017																2018															
	Juli				Agustus				Sep				Okto				Nov				Des				Jan				Feb			

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis sebagai metodologinya. Fokusnya diarahkan untuk mengetahui bagaimana cara aktor-aktor politik tersebut menanamkan kepentingannya kepada media sehingga mempengaruhi produksi berita, dinamika apa yang terjadi dalam ruang redaksi terkait produksi berita antara wartawan dan redaksi serta pola hubungan kekuasaan yang tercipta di dalamnya. Pendekatan ini dianggap dapat menjelaskan relasi kuasa di balik kontestasi pemberitaan harian Radar Makassar dan harian Rakyat Sulsel tentang pertarungan wacana pada Pilgub Sulsel, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal kedua media tersebut. Pendekatan kualitatif juga mampu menjelaskan kenapa kontestasi ini terjadi dan faktor politik-ekonomi-budaya yang melatarinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln dalam Agus Salim(2006),dimana penelitian kualitatif berupaya memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut.

Perspektif paradigma ini juga menekankan sifat holistik atau komprehensif, sehingga pada umumnya merupakan suatu *multi level analisis* atau tidak terbatas pada satu jenjang analisis saja. Misalnya, bila kita

melakukan analisis teks isi media, maka akan disebut tidak holistik jika tidak memperhatikan konteks struktur dan budaya di mana teks ini diproduksi dan juga dikonsumsi. Dalam hal ini, kriteria hasil penelitiannya adalah sejauh mana penelitian tersebut memperlihatkan konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan teks berita.

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Pada level metodologi dengan menggunakan paradigma kritis, peran penulis dalam penelitian ini sekaligus melaksanakan partisipasi dengan melakukan pengamatan terlibat (*Participatory observation*) dimana penulis melihat sendiri proses pengkonstruksian wacana terkait pemberitaan kandidat di Pilgub Sulsel dari waktu ke waktu di ruang redaksi. Seperti yang dikemukakan Deddy N. Hidayat (2002), penelitian dengan paradigma kritis memberi peluang pengamatan partisipatif.

Penulis menyadari dari awal memposisikan diri sebagai orang dalam dari subyek yang diteliti. Posisi ini di satu sisi akan memudahkan penulis melakukan pengamatan berperan serta maupun mengakses sumber-sumber informasi, terutama di harian Radar Makassar sebagai perusahaan tempat di mana peneliti bekerja. Namun, di sisi lain, hal ini bisa menimbulkan bias dalam penelitian, terutama dalam pengumpulan data wawancara. Olehnya itu, demi menghindari bias dalam mengumpulkan data pada kedua media tersebut peneliti memutuskan untuk kembali terlibat

dalam peliputan isu politik di lapangan, meskipun status peneliti bukan lagi sebagai reporter. Langkah ini diambil sebagai strategi peneliti akan kemungkinan munculnya bias dalam penelitian ini.

Peneliti akan kembali berbaaur dengan para awak media utamanya wartawan harian Rakyat Sulsel yang ditugaskan pada isu politik di Pilgub Sulsel. Dengan begitu peneliti akan lebih muda mendapatkan informasi bagaimana jurnalis tersebut membingkai sebuah berita, termasuk melihat bagaimana wartawan tersebut mendapat penugasan dari ruang redaksi di internal perusahaan. Sehingga durasi waktu ketika peneliti berada di ruang redaksi harian Radar Makassar setara dengan ketika peneliti berada di lapangan.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian diambil sampel teks berita tentang wacana Pilgub Sulsel yang diterbitkan oleh harian Radar Makassar dan harian Rakyat Sulsel. Kedua media dimaksud menarik untuk diteliti karena masing-masing memiliki karakteristik yang khas, baik dari segi kepemilikan (*media ownership*) maupun dari aspek produksi jurnalistiknya (*media contents*). Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah awak media yang terlibat dalam proses teks berita yang terbit di kedua media tersebut, termasuk petinggi, pengambil kebijakan dan pemilik perusahaan.

Sebagai media lokal yang beroperasi di Makassar dengan jumlah

pembaca yang cukup signifikan, harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel terbilang perusahaan yang perkembangannya cukup pesat jika dibandingkan dengan anak perusahaan Fajar Group yang lain. Dipimpin oleh *owner* yang sama menjadi salah satu ketertarikan peneliti untuk menelusuri lebih jauh penyebab mengapa produksi berita harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel mengalami keterbelahan dalam memberitakan bakal calon kandidat yang digadang-gadang maju pada Pilgub Sulsel Juni 2018 mendatang.

Kandidat bakal calon gubernur yang akan diteliti dalam melihat pertarungan wacana yang terbit pada kedua media tersebut dibatasi hanya dua kandidat yang dianggap paling sering diberitakan yakni, Ichsan Yasin Limpo(IYL) untuk harian Rakyat Sulsel di mana konten beritanya lebih positif sedangkan untuk berita yang terbit di Radar justru cenderung negatif. Berbanding terbalik dengan Nurdin Halid (NH) yang lebih punya tempat di Radar Makassar dengan pemberitaan yang positif. Olehnya dalam penelitian ini, tim sukses atau tim kerja kandidat akan ikut diwawancara untuk mendapatkan informasi bagaimana strategi kampanye yang dilakukan di masing-masing media yang menjadi objek dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber yakni data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder(*secondary data*). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap

wartawan yang terlibat dalam produksi pemberitaan di lapangan, termasuk redaktur, dan pemimpin media di kedua media yang mejadi objek penelitian ini. Aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi wacana berkenaan dengan pemberitaan politik Pilgub Sulsel yang dimuat di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel termasuk sumber data yang akan diwawancara oleh peneliti . Wartawan yang dipilih adalah yang pernah terlibat atau ditugaskan meliput isu politik seputar Pilgub Sulsel.

Pencarian data pada level ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi, dalam hal ini bagaimana proses produksi berita tentang wacana pemilihan Gubernur Sulsel yang menyebabkan keterbelahan pemberitaan, termasuk pertimbangan yang dipakai ketika menyusun teks tersebut, dan bagaimana kekuatan pemilik modal dan kepentingan politik diperhitungkan dalam menyusun teks. Sementara untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa teks berita bakal calon yang terbit di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang dikumpulkan selama masa sosialisasi kandidat di Pilgub Sulsel berlangsung. Data sekunder juga dapat berupa artikel, surat kabar, arsip organisasi/perusahaan, laporan-laporan, artikel yang bisa dijadikan sebagai sasaran pengumpulan data.

Akses penulis pada rekan-rekan wartawan dan redaktur pada kedua media ini, memungkinkan untuk memahami “sudut pandang dari dalam”, terutama dalam memahami dinamika kontestasi kepentingan di balik berita

atau artikel yang telah diterbitkan. Sebagaimana konsep analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini, pemingkakan telah dilakukan dalam pemilihan tema berita dan bagaimana mengemasnya kemudian. Kenapa peristiwa tertentu dianggap layak diberitakan di halaman depan atau di halaman belakang? Seberapa besar porsi pemberitaannya? Bagaimana sudut pandangnya? Pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian akan dikonfirmasi ke para pihak di redaksi di media yang diteliti, dalam tahap penelitian selanjutnya.

Sementara tipe wawancara yang akan peneliti gunakan adalah dengan sistem wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Tipe wawancara ini tidak memiliki *setting* wawancara dengan sekuensi pertanyaan yang direncanakan ketika akan mewawancarai informan. Dengan kata lain pewawancara dalam melakukan wawancara tidak terstruktur secara khas hanya mempunyai satu daftar atau beberapa poin pertanyaan tentang topik atau isu yang menjadi garis besar masalah yang akan ditanyakan (Silalahi, 2013). Tipe wawancara ini akan lebih memudahkan peneliti mengorek informasi dari informan dengan tidak terjebak pada susunan pertanyaan secara terstruktur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan Norman Fairclough (Hamad. 2004), maka langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan melewati beberapa tahapan :

1. Analisis Teks

Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisir berita-berita tentang dua kandidat yang dimuat di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel selama masa sosialisasi Pilgub Sulsel di mulai hingga penetapan pasangan calon oleh KPU dilakukan pada Januari 2018 mendatang. Teks tersebut kemudian akan dikelompokkan dalam beberapa kategori dan selanjutnya akan dilakukan analisis teks secara linguistic, dengan melihat kosakata, simantik dan tata kalimat.

2. Analisis *Discourse Practice*

Tahapan kedua merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks pada media dengan menggunakan wawancara mendalam (*deep interview*) terhadap pembuat berita, dan aktor-aktor yang terlibat dan mempengaruhi kontestasi wacana pada kedua media tersebut. Dalam hal ini wartawan, redaktur, pimpinan redaksi dan pengambil kebijakan di perusahaan, termasuk tim sukses para kandidat. Di sini peneliti akan memaparkan hasil wawancara maupun studi lapangan terkait media yang diteliti dan tim pemenangan kandidat yang menjadi sasaran penelitian.

3. Analisis *Sociocultural Discourse*

Tahapan ketiga didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana muncul. Dengan demikian studi literatur atau studi pustaka terhadap media akan dilakukan di level ini.

F. Teknik Analisis Data

Strategi riset ini menggunakan analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis (CDA)* model *Fairclough*. Melihat wacana sebagai sebuah praktik sosial, lebih daripada aktifitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Hal ini mengandung implikasi *pertama*, karena wacana sebagai bentuk dari tindakan, maka seseorang menggunakan bahasa sebagai tindakan pada dunia dan bentuk representasi ketika melihat dunia/realitas. *Kedua*, model ini mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial. Disini wacana terbagi oleh struktur sosial, kelas dan relasi sosial lain yang dihubungkan dengan relasi spesifik dari institusi tertentu seperti pada hukum, pendidikan, sistem atau klasifikasi. (Hamad,2004).

“CDA merupakan tipe wacana yang terutama sekali mempelajari bagaimana kekuasaan disalahgunakan, atau bagaimana dominasi serta ketidakadilan dijalankan dan diproduksi melalui teks dalam sebuah konteks sosial politik. Sebenarnya ada upaya untuk mengembalikan studi- studi budaya (*cultural studies* yang dikembangkan di inggris) ke akar-akar tradisinya sebagai studi kritis (*critical studies*)”. Dedy N.Hidayat dalam Eriyanto (2002).

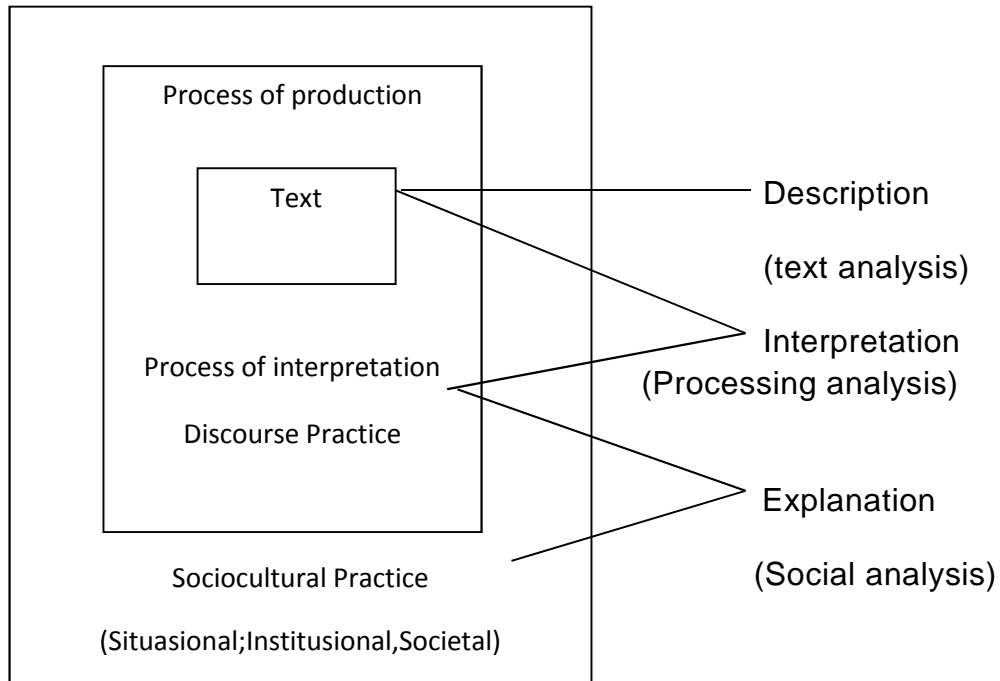
Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: teks, discourse practice dan sociocultural practice. Teks dianalisis secara linguistic, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Ia juga memasukkan unsur koherensi dan kohesivitas, bagaimana antar kalimat digabung sehingga membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis dipakai untuk melihat tiga hal berikut: pertama, ide rasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, bisa jadi membawa muatan ideologis tertentu. Kedua, relasi, analisis diarahkan pada bagaimana konstruksi hubungan wartawan dengan pembaca. Bagaimana sebuah teks disampaikan secara informal atau formal, terbuka atau tertutup. Ketiga, identitas yang merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca, serta bagaimana persoalan dan identitas ini hendak ditampilkan dalam teks.(Hamad.2004).

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks yang berbeda, sebagaimana pola kerja, bagan kerja dan rutinitas dalam menghasilkan berita. Teks berita diproduksi dengan cara yang spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang telah terstruktur dimana laporan wartawan di lapangan, atau dari sumber berita akan ditulis oleh editor dan sebagainya. Media yang satu mempunyai pola kerja dan kebiasaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Produksi teks berita semacam ini berbeda dengan ketika seorang penyair

menghasilkan teks puisi, yang umumnya dihasilkan oleh teks secara personal. Proses konsumsi teks bisa jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Konsumsi juga bisa dihasilkan secara personal ketika seseorang mengkonsumsi teks (seperti ketika menikmati puisi) atau secara kolektif (peraturan perundang-undangan dan sebagainya).

Sementara dalam distribusi teks tergantung pada pola, jenis teks dan bagaimana sifat institusi yang melekat dalam teks tersebut. Pemimpin politik (bupati), misalnya dapat mendistribusikan teks tersebut dengan mengundang wartawan dan melakukan konferensi pers untuk disebarluaskan ke khalayak. Hal berbeda mungkin dilakukan oleh kelompok pengrajin dan petani dalam mengorganisir pesan untuk disampaikan pada khalayak. Sedang *sociocultural practice* adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks disini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks masyarakat, budaya dan politik tertentu. Misalnya, politik media, ekonomi media atau budaya media yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkannya. Ketiga dimensi dimaksud dapat digambarkan dalam kerangka analisis wacana Fairclough, sebagai berikut :

Kerangka Analisis Wacana Fairclough :



Bagan 3.1

Kerangka pemikiran ini jika diterjemahkan dalam metode analisis sesuai konsep Fairclough bisa dilihat sebagai berikut :

Metode Analisis Fairclough

No.	Tingkatan Masalah	Level analisis	Metode penelitian
1.	Text	Mikro	Analisis Teks (model <i>framing</i> Gamson dan Modigliani,
2.	Discourse Practice	Meso	Observasi dan wawancara mendalam dengan pekerja media dibantu literature
3.	Sociocultural Practice	Makro	Literatur dikombinasikan dengan wawancara mendalam terhadap pekerja media, dan pemilik media

Tabel : 3.1

Pada level mikro, penggalian data dipusatkan pada teks artikel di dua media tentang pemberitaan figure di Pilgub. Teks-teks berita ini akan menjadi bahan utama. Untuk menganalisis teks ini, akan digunakan alat analisis pembingkai model Gamson dan Modigliani (1993). Pembingkai atau framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan ketika memilih isu dan menulis berita. Cara pandang ini akan menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan atau dihilangkan, yang secara tujuan akhirnya adalah menggiring pembacanya dalam membingkai suatu peristiwa tertentu.

Model Gamson dan Modigliani tentang pembingkai berdasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media terdiri dari paket penafsiran yang memiliki makna tertentu. Di dalam paket ini ada struktur rangka utama (*core frame*) dan simbol penyingkat (*condensing symbol*). Rangka utama membantu menyampaikan informasi untuk menunjukkan isu penting yang sedang dibicarakan, sedangkan struktur kedua mengandung dua substruktur, yaitu alat framing (*framing device*) dan alat alasan (*reasoning device*). Alat framing menghasilkan beberapa unsur simbolik, seperti *metaphor* (perumpamaan); *catchphrases* (slogan yang “harus” dikerjakan); *visual image* (gambar-gambar yang mendukung bingkai secara keseluruhan); dan *euphemism* (penghalusan arti). Sedangkan alat alasan terdiri dari *root* (memperlihatkan sebab-akibat); *appeal to principle* (logika atau tuntutan moral), dan *consequences* (kesimpulan berpikir).

Discourse Practice, memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks terbentuk melalui suatu praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Teks berita melibatkan praktik diskursus yang rumit dan kompleks. Praktik wacana inilah yang menentukan bagaimana teks tersebut terbentuk. Dalam pandangan Fairclough, terdapat dua sisi dari praktik diskursus tersebut, yakni produksi teks (di pihak media) dan konsumsi teks (di pihak khalayak). Faktor pertama dari pembentukan wacana ini adalah individu dari sang jurnalis tersebut, latar belakang pendidikan, perkembangan profesional, orientasi politik dan ekonomi para pengelolanya dan keterampilan mereka dalam memberitakan secara akurat. Begitu juga dengan produksi teks yang berhubungan dengan bagaimana pola dan rutinitas (media routine) pembentukan berita di meja redaksi. Proses ini melibatkan banyak tahapan dan banyak orang serta dari wartawan di lapangan, redaktur, editor bahasa sampai bagian pemasaran. Jadi discourse analisis ini banyak dipengaruhi oleh wartawan itu sendiri sehingga perlu adanya wawancara yang mendalam terhadap pembuat teks berita. (Eriyanto.2002).

Sociocultural Practice, analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau kotak kosong yang steril, tetapi sangat ditentukan faktor di luar dirinya. *Sociocultural practice* ini memang tidak berhubungan langsung

dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Fairclough membuat tiga level analisis pada *sociocultural practice*, yang meliputi level *situational, institutional dan social*, berikut uraiannya:

Situational, Konteks sosial, bagaimana teks itu di produksi diantaranya memperhatikan aspek situasional ketika teks tersebut di produksi. Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas/unik, sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Kalau wacana dipahami sebagai suatu tindakan, maka tindakan itu sesungguhnya adalah upaya untuk merespons situasi dan konteks sosial tertentu.

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusional organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dalam diri media sendiri, bisa juga kekuatan-kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi berita. Faktor institusi yang penting adalah yang berhubungan dengan ekonomi media. Produksi berita di media kini tidak mungkin bisa dilepaskan dari pengaruh ekonomi media yang sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Selain ekonomi media, faktor institusi lain yang juga berpengaruh adalah politik. Pertama, institusi politik yang mempengaruhi kehidupan dan kebijakan yang dilakukan oleh media. Kedua, institusi politik dalam arti bagaimana media digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Media massa bisa menjadi kekuatan yang

dominan yang ada dalam masyarakat untuk merendahkan dan memarginalkan kelompok lain, dengan menggunakan kekuatan media. Bentuk ekstrim dari elemen ini adalah suatu bentuk dalam mendukung salah satu kekuatan politik tertentu dan menggunakan media sebagai alat politiknya.

Faktor sosial juga sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Bahkan Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Dalam level sosial budaya masyarakat misalnya, turut menentukan perkembangan dari wacana media. Kalau aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks berita dibuat), aspek sosial lebih melihat pada konteks makro seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini menentukan siapa yang berkuasa, nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Bagaimana nilai dan kelompok yang berkuasa itu mempengaruhi dan menentukan media. Teks berita yang dibuat wartawan dari sistem politik otoriter tentu saja berbeda dengan teks dari wartawan yang dihasilkan dalam sistem politik liberal. Teks berita yang dihasilkan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang ditandai dengan persaingan dan perebutan modal tentu saja akan berbeda dengan teks berita dalam sistem ekonomi sosialisme.

G. Tahap-Tahap Penelitian dan Jadwalnya

Tahapan penelitian yang mengambil judul, relasi kuasa di balik kontestasi wacana pemilihan Gubernur Sulsel 2018, pada harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel ini pada dasarnya sudah berjalan, dengan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah berita yang terbit di kedua media tersebut. Dari pengamatan dan konten berita yang sudah tayang yang berhasil dikumpulkan penulis berupa kliping berita politik terkait pertarungan kandidat di Pilgub Sulsel, menunjukkan adanya keterbelahan pemberitaan menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Keterbelahan wacana di kedua media tersebut khususnya dalam memberitakan salah satu figur bakal calon, tepatnya IYL sudah lama terjadi, jauh sebelum sosialisasi Pilgub Sulsel dimulai. Bahkan sejak IYL masih menjabat sebagai Bupati Gowa pada saat itu, harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel sudah menjadi media yang sering kontradiktif dalam memberikan informasi kepada khalayak. Puncak keterbelahan kedua media tersebut makin tajam ketika IYL mensosialisasikan diri untuk maju di Pilgub, ditambah lagi rival klan YL yakni Nurdin Halid ikut mengkampanyekan diri sebagai bakal calon gubernur, pengganti kakak kandung IYL dikomandangkan. Sebagai kader Golkar dan mantan Bendahara DPD I Golkar Sulsel yang dipecat NH, IYL menjadi lawan dan momok terberat NH di Pilgub. Kondisi ini tidak saja terjadi di lingkaran pertarungan politik kedua

politisi tersebut, namun berimbang pula pada pemberitaan di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang seolah memihak pada salah satu kandidat. Radar Makassar condong ke NH, dan Rakyat Sulsel lebih memberi tempat kepada IYL.

Tahapan pengumpulan data oleh peneliti terkait pembelahan wacana mengenai pemberitaan Pilgub Sulsel kedua kandidat itu mulai dilakukan peneliti sejak Juni lalu. Dengan mengumpulkan sejumlah berita-berita yang diterbitkan Radar Makassar dan Rakyat Sulsel. Oleh peneliti waktu ini dianggap titik klimaks pembelahan pemberitaan yang terjadi pada kedua media tersebut. Apalagi di saat itu sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil perolehan tingkat elektabilitas dan popularitas beberapa bakal calon, termasuk IYL dan NH. Misalnya saja berita yang terbit di halaman 8 pada rubrik Radar Politik, Rabu 14 Juni 2017, berjudul “NH Ungguli IYL” berdasarkan hasil survey yang dirilis lembaga survei Poltraking. Dalam berita tersebut disebutkan NH memiliki tingkat elektabilitas 14,5 persen, sementara IYL masih di bawahnya yakni 13,35 persen.

Berbanding terbalik dengan berita yang disajikan harian Rakyat Sulsel pada hari yang sama dan dengan tema yang sama terkait hasil survei lembaga Polraking. Dalam berita yang berjudul “Popularitas IYL Tertinggi” dibanding dengan bacagub lain di Pilgub jelas menunjukkan keterbelahan kedua media tersebut dalam mengangkat isu pemberitaan. IYL yang memang punya tingkat popularitas lebih tinggi dari bacagub lainnya, karena

merupakan adik kandung SYL sengaja dijadikan isu utama atau engel dalam berita.

Waktu pengambilan atau pengumpulan data teks berita yang terbit pada kedua media tersebut dibatasi hanya pada saat jelang tahapan saja atau selama proses sosialisasi berlangsung hingga KPU menetapkan bakal calon pada Januari nanti. Alasannya, pada tenggang waktu tersebut pemberitaan terhadap para kandidat terkait wacana pencalonan figur di Pilgub yang berimplikasi pada *political branding* masing-masing kandidat dengan pola relasi yang melibatkan banyak aktor termasuk di dalamnya adalah peran media lokal.

Adapun proses pengamatan yang telah dilalui peneliti dan jadwal rencana penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Harian Rakyat Sulsel

Tepat tanggal 2 Mei tahun 2012 PT. Rakyat Sulsel Intermedia terbit untuk yang pertama kalinya di bawah naungan Fajar Group. Dikomandoi oleh SY sebagai Direktur Umum, koran dengan segmen politik ini berhasil mencetak sebanyak 5000 eksemplar dan terbit untuk 20 halaman setiap harinya. Koran ini menetapkan *tagline* “*the political news reference*” yang mengklaim sebagai koran politik pertama di Indonesia Timur. Menurunkan berita utama “keluarga Malaranggeng janji buka-bukaan”, dengan gambar utama kartun tiga Malaranggeng bersaudara yang sedang pentas music saat awal terbitnya.

Terbit perdana bertepatan dengan perhelatan pesta demokrasi pemilihan Gubernur Sulsel (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar yang saat itu sedang memasuki tahap sosialisasi, menjadi keuntungan tersendiri bagi harian Rakyat Sulsel meraup pundi-pundi . Pilgub Sulsel tahun 2013 kemudian disusul Pilwalkot Makassar tahun 2014 menjadi salah satu faktor perusahaan ini berkembang cukup pesat jika dibanding dengan anak perusahaan Fajar Group yang lain, di mana dituntut untuk bekerja keras saat awal didirikannya. Bagaimana tidak segmen politik yang menjadi jualan

perusahaan ini menjadi koran yang banyak dicari sebagai referensi untuk melihat konstalasi politik. Selain jumlah pembaca yang meningkat di awal-awal terbit, kondisi tersebut menjadi penarik para politisi, partai politik dan kandidat untuk menjalin kerjasama dalam bentuk iklan dan menjadi pelanggan surat kabar.

Fungsi utama didirikannya harian Rakyat Sulsel adalah menjadi perusahaan penyedia informasi politik. Memberikan pemenuhan hak dasar dan keingintahuan rakyat, utamanya Sulsel dalam hal berpolitik, memberikan gambaran umum peta perpolitikan yang terjadi di Sulsel kepada para pelaku politik, menjadi media pembelajaran tentang politik kepada pemilih pemula(pelajar SMU dan mahasiswa). Ditopang oleh modal yang cukup besar dalam mengembangkan perusahaan menjadi salah satu faktor koran ini tumbuh signifikan pada tahun pertamanya. Hal itu oleh karena selain saham Fajar Group, di harian Rakyat Sulsel juga dipegang oleh beberapa pemilik modal dari luar dengan komposisi saham yang cukup berimbang. Sehingga rasional jika di awal terbit Rakyat Sulsel mampu mencetak 5000 eksamplar, mengalahkan seluruh surat kabar anak perusahaan milik Fajar Group yang sudah lama menjadi sumber pemberitaan di kalangan pembaca Sulsel.

Informasi yang diperoleh peneliti dari internal perusahaan, komposisi saham di perusahaan koran harian Rakyat Sulsel pada awal terbit dipegang oleh empat pihak dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi Saham Awal Harian Rakyat Sulsel

Pemilik Saham	Prsentase
Fajar Group(SAH)	10 Persen
Jawa Pos	20 Persen
IYL	30 Persen
AH	40 Persen

Tabel 4.1

Sumber : Internal Perusahaan

Melewati perhelatan pesta demokrasi lima tahunan Pilgub Sulsel 2013, perlahan kondisi internal perusahaan Rakyat Sulsel tidak lagi semringah, terjadi penurunan baik segi oplah maupun jumlah halaman surat kabar dari 23 halaman menjadi sisa 16 halaman. Segmen politik yang diusung Rakyat Sulsel sebagai sumber referensi bacaan politik ternyata tidak mampu bertahan setelah melewati musim politik Pilgub Sulsel 2013 dan Pilwalkot Makassar tahun 2014. Memasuki tahun kedua, Rakyat Sulsel mengalami masalah keuangan yang cukup pelit. Modal besar saat awal terbit menjadi nol rupiah, bahkan utang usaha menjadi meningkat. Tidak hanya itu banyak beban untuk biaya jangka pendek yang menunggak, seperti biaya tarif listrik

dan air yang menunggak hingga berbulan-bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel, FP, berikut adalah ulasannya :

“ Saya bergabung di Rakyat Sulsel tahun 2014, sebelumnya saya di Pare Pos dari tahun 2012, sebagai karyawan Fajar tentu pemindahan saya dari awalnya di harian Fajar lalu dideportasi ke Pare Pos dan sekarang di Raksul siap dan menerima saja keputusan perusahaan, di mana pun saya ditempatkan.....Meskipun saya tidak dari awal berada di Raksul, namun sebagai karyawan Fajar Group tentu saya tahu betul setiap informasi dan perkembangan anak perusahaan Fajar yang lain, termasuk harian Raksul. Pertama dipindahkan di Raksul saya langsung diberi mandat sebagai Direktur Utama, dengan kondisi perusahaan saat ini dalam keadaan yang tidak stabil. Banyak utang dan biaya kebutuhan perusahaan yang tidak mampu diselesaikan oleh pimpinan terdahulu. Sehingga pada saat saya ditunjuk dan ditarik ke Raksul oleh pihak Fajar Group, banyak yang tidak menerima hingga akhirnya risinge..... Saya melihat ada hubungan yang tidak baik, sikap membangun kubu di bagian redaksi sangat kental. Hal yang pertama saya selesaikan adalah masalah internal perusahaan. Untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan saya terpaksa menggunakan uang pribadi, hingga kemudian tahun 2015-2016 kondisi Raksul mulai membaikKelemahan ada pada manajemen dan kontrol, banyak yang dicatat namun hanya sekedar catatan tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan, utang usaha meningkat.” FP menceritakan.

Lemahnya manajemen internal perusahaan menjadi salah satu faktor harian Rakyat Sulsel diterpa masalah cukup besar dari segi *financial*. Dari informasi yang coba dihimpun peneliti dalam tesis ini, kepemilikan saham di luar Fajar Group membuat internal perusahaan Rakyat Sulsel menjadi terbelah dan saling membangun kubu dari masing-masing pemilik saham. SY yang menjadi Direktur Utama Rakyat Sulsel saat awal didirikan diketahui

lebih condong kepada salah satu komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 30 persen, yakni Ichsan Yasin Limpo. Jejak keberpihakan itupun banyak diikuti oleh awak media di bagian redaksi seperti reporter, redaktur, bahkan hingga ke bagian manajemen yang lain. Karena keterbelahan orang-orang dalam internal perusahaan itulah, Fajar Group sebagai komisaris utama di Rakyat Sulsel bahkan tidak memiliki kendali untuk mengatur perusahaan hingga akhirnya mengalami kolaps.

Saran dan masukan dari komisaris utama Rakyat Sulsel banyak yang tidak digubris. Bahkan berita-berita mengenai klan Yasin Limpo(YL) dan keluarganya menguasai halaman di rubrik harian Rakyat Sulsel. Kondisi tersebut memancing kekecewaan dari SAH sebagai pemilik saham dari Fajar Group, hingga akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya koran harian Radar Makassar yang diprakarsainya. Dalam suatu kesempatan SAH menceritakan bahwa dirinya ingin memiliki perusahaan media, yang bisa ia kembangkan tanpa ada intervensi dan kepentingan selain kepentingan membangun perusahaan. Dan perusahaan itu adalah harian Radar Makassar yang mengudara sejak tahun April 2014 lalu.

Perombakan struktur pimpinan di perusahaan Rakyat Sulsel dengan pengangkatan FP sebagai Direktur Utama pada tahun 2015 oleh pihak Fajar Group membuat beberapa pihak kecewa hingga akhirnya mereka mengundurkan diri dari perusahaan. Tahun 2015 menjadi tahun di mana Rakyat Sulsel memulai kembali membangun perusahaan dari nol. Oplah

Rakyat Sulsel menurun menjadi 2.800 eksemplar dengan 16 halaman, terbit dari harii Senin hingga Sabtu. Yang tidak berubah adalah segmen isu politik yang menjadi topik utama pemberitaan Rakyat Sulsel.

IYL yang berlatar belakang politisi dengan kepemilikan saham sebesar 30 persen di harian Rakyat Sulsel, berhasil menjadikan koran ini sebagai alat propaganda untuk memuluskan setiap kepentingan politiknya di Sulsel, melalui berita-berita yang disajikan Rakyat Sulsel. Tidak terkecuali bagaimana berita-berita yang terbit di Rakyat Sulsel selama masa sosialisasi Pilgub Sulsel. Kondisi internal Rakyat Sulsel inilah yang menjadi latar belakang hadirnya koran Radar Makassar. SAH sebagai *owner* Rakyat Sulsel namun tidak punya kendali secara penuh untuk mengontrol berita-berita yang cenderung hanya menguntungkan pihak klan YL di Sulsel. Hampir setiap hari berita IYL dan keluarga-keluarganya memenuhi halaman di Rakyat Sulsel

Tahun 2017 terjadi perubahan komposisi saham di perusahaan Rakyat Sulsel. Jika awal terbitnya dikuasai empat pemilik saham, belakangan tersisa tiga pemilik saham setelah Jawa Pos menarik 20 persen total saham yang dimilikinya di Rakyat Sulsel. Sehingga komposisi saham per tahun 2017 seperti yang digambarkan dari table berikut :

Komposisi Perubahan Saham Harian Rakyat Sulsel

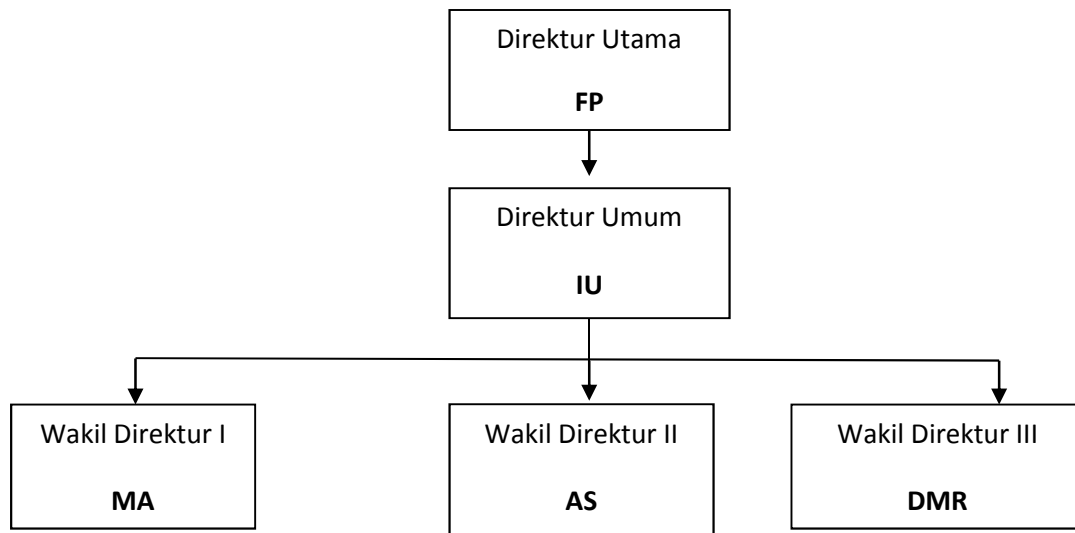
Pemilik Saham	Prsentase
Fajar Group(SAH)	30 Persen
IYL	30 Persen
AH	40 Persen

Tabel 4.2

Sumber : Internal Perusahaan

Struktur pimpinan perusahaan harian Rakyat Sulsel sendiri kerap kali mengalami perombakan, mulai dari stuktur pimpinan keredaksian hingga perubahan di unsur pimpinan manejemen yang lain di perusahaan. Per tahun 2017 struktur pimpinan bisa dilihat sebagai berikut:

Struktur Pimpinan Rakyat Sulsel



Bagan 4.1

Sumber : Internal Perusahaan

Sementara untuk struktur redaksi harian Rakyat Sulsel dapat digambarkan sebagai berikut :

Pimpinan Redaksi	: MA
Wakil Pimpinan Redaksi	: LK
Sekretaris Redaksi	: EHY
Kordinator Liputan	: DY
Redaktur Politik	: DY, RL dan MS
Reporter	: IK, AMM, FD, SM

B. Gambara Umum Harian Radar Makassar

Kehadiran koran harian Radar Makassar yang terbit perdana pada 2 April 2014 menambah sumber bacaan informasi di kalangan pembaca masyarakat Kota Makassar, Sulsel secara umum selama empat tahun terakhir dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai media baru. Didirikan oleh putra AW sebagai *carmen* Fajar Group, SAH sekaligus menjadi Direktur Utama dari perusahaan PT. Radar Makassar Intermedia. Berdirinya Radar Makassar diawali karena keinginan dari SAH yang mengimpikan memiliki surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Keinginan ini kemudian diungkapkan kepada sahabat-sahabatnya, dan mereka pun merespon dengan baik. Didirikanlah Radar Makassar dalam bentuk koran bulanan, untuk menguji tingkat penerimaan masyarakat serta melihat potensi pasar saat itu.

Komitmen Harian Radar Makassar dengan mengusung tagline “Informasi Bersih, Aktual dan Terpercaya” memiliki segmentasi umum yang menjadi pilihan Radar Makassar untuk melayani berbagai lapisan masyarakat, karena Harian Radar Makassar milik semua pembaca. Awal terbit ,Harian Radar Makassar terbit *non stop* dengan jumlah 20 halaman dengan beragam rubrikasi. Memiliki visi yang jelas dan tegas, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif sebagai sosial kontrol demi kemajuan bangsa dan negara. Terdepan dalam mengemas berita dan menyajikannya dengan akurat dan tidak tebang pilih dalam mempublikasikannya menjadi misi dari Harian Radar Makassar. Selain itu memposisikan diri sebagai koran nomor satu di Makassar dan Sulsel dalam menyajikan berita yang *up to date*.

Data pembaca Radar Makassar yang memiliki oplah sebanyak kurang lebih 1.500 hingga 2000 eksamplar diawal-awal terbit, dibaca oleh berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat umum, pengusaha, politisi, instansi pemerintahan, pegawai negeri sipil(PNS) dan lain-lainnya. Selain di Makassar peta atau presentase peredaran koran Harian Radar Makassar tersebar di beberapa kabupate/kota di Sulsel, dan beberapa kabupaten di Sulbar. Memasuki tahun ketiga, oplah harian Radar Makassar mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2018 total oplah Radar Makassar mencapai 8000 eksaplar, dan terbit dari Senin hingga Jumat sebanyak 16 halaman, dan Sabtu sebanyak 12 halaman.

Meningkatnya jumlah oplah Radar Makassar tidak terlepas dari kontribusi Moh. Ramdhan Pomanto(Danny) sebagai pemilik saham sebesar 10 persen. Sebagai orang yang memegang pucuk pemerintahan di Kota Makassar, Danny memanfaatkan kekuasaan itu untuk mendistribusikan koran Radar Makassar ke ketua-ketua RT/RW di Makassar melalui APBD yang telah mendapat persetujuan legislatif di DPRD Makassar. Kebijakan ini diambil bertujuan untuk ikut mencerdaskan para RT/RW di Makassar melalui informasi yang aktual. Memasuki tahun ke empat, Radar Makassar berkembang cukup pesat sebagai media baru di Sulsel. Hal itu dapat dilihat dari keberhasilan Radar Makassar mendirikan tiga perusahaan media yang menjadi anak dari grup PT Radar Makassar Intermedia. Ketiganya yakni, media online Inikata.com, Radar Sulbar, dan Radar Palopo.

Komposisi saham harian Radar Makassar sejak awal terbit hingga empat tahun umurnya tidak pernah mengalami perombakan. Kepimilikan saham tersebut seperti tabel di bawah ini :

Komposisi Saham Radar Makassar

Pemilik Saham	Prsentase
SAH	20 Persen
NA	10 Persen
AAIR	10 Persen
KAH	10 Persen
AH	50 Persen

Tabel 4.3

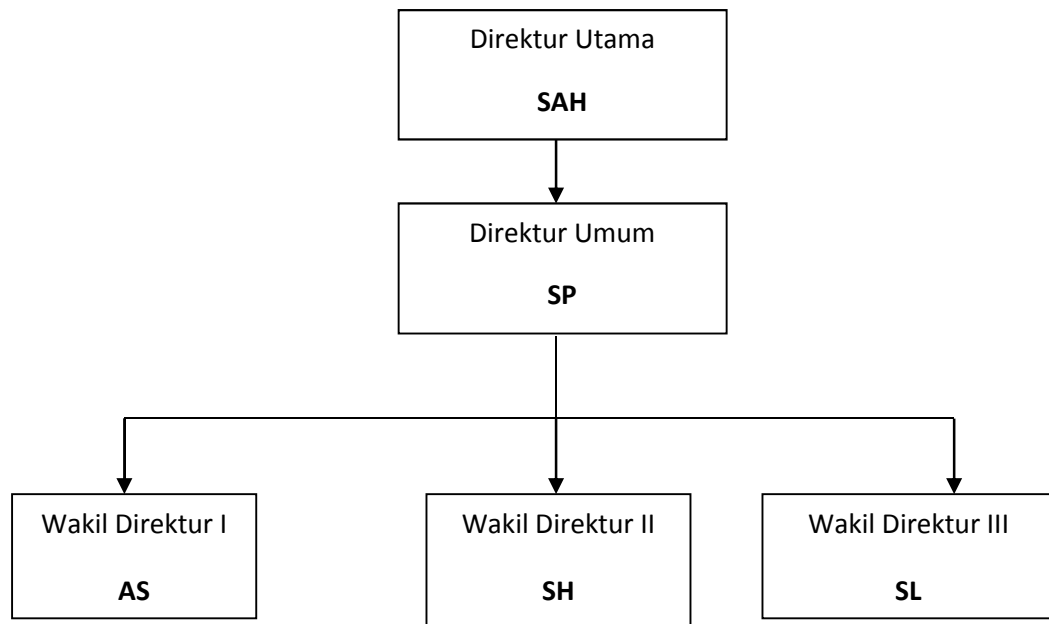
Sumber : Internal Perusahaan

Sejak terbit perdana hingga masuk tahun ke empat, Radar Makassar dalam perjalanannya tidak pernah diperhadapkan pada masalah yang berarti. SAH sebagai pemegang kontrol penuh terhadap Radar Makassar lebih leluasa mengatur arus pemberitaan. Kondisi itulah yang membedakan Radar Makassar dengan Rakyat Sulsel. Berikut hasil wawancara dengan SAH selaku Direktur Utama di koran ini :

“Salah satu alasan mengapa saya mendirikan Radar Makassar adalah, sejak dulu saya ingin memiliki media yang lepas dari kepentingan politik. Tidak dijadikan tameng untuk mengejar misi politik klan tertentu. Itu yang tidak bisa saya lakukan di Raksul....tetapi Raksul saat ini sudah berubah. Di Radar meski ada kepemilikan saham di luar Fajar Group, namun tidak ada kepentingan atau misi politik oleh klan tertentu. Bahkan pak Danny pun sejak awal menanamkan modalnya berpesan untuk terus memberikan kritikan melalui pemberitaan-pemberitaan.”

Struktur pimpinan perusahaan harian Radar Makassar mulai berdiri belum pernah mengalami pergantian pimpinan perusahaan maupun pimpinan. Terhitung Februari tahun 2018 struktur pimpinan bisa dilihat sebagai berikut :

Struktur Pimpinan Radar Makassar



Bagan 4.2

Sumber : Internal Perusahaan

Sementara untuk struktur redaksi harian Rakyat Sulsel dapat digambarkan sebagai berikut :

Pimpinan Redaksi : AS

Wakil Pimpinan Redaksi : WY

Sekretaris Redaksi : SN

Kordinator Liputan : FD
Redaktur : RA(Peneliti), FD, RK, CT
Reporter : FIS, KS, WY, DL, RT

C. Ideologi Media dan Posisi Pemilik Saham Mayoritas

Media massa hampir selalu berada dalam impitan dua kepentingan. Kepentingan pertama, bisnis, kepentingan kedua adalah idealisme.(Ali :2010). Di tengah dua kepentingan itu sangat sulit bagi konsumen pers mengharap sajian media massa yang tidak berpihak. Kondisi inilah yang juga tercermin dari pemberitaan dua media yakni Rakyat Sulsel dan Radar Makassar mengenai pasangan calon di Pilgub Sulsel 2018 yang cenderung memihak pada salah satu kandidat, hingga mengakibatkan pembelahan berita pada keduanya, di mana tidak dapat dilepas dari kepentingan kapitalisme media dan euforia publik di sisi lain.

Mencermati isi atau teks pemberitaan empat pasangan calon yang berlaga di Pilgub Sulsel dari periode Agustus hingga penetapan calon oleh KPU Sulsel, kecenderungan kedua media ini mempublikasikan(menyajikan berita) tidak lepas dari bagaimana kandidat menanamkan kepentingannya di media.Penyajian berita itu tidak terlepas dari ideologi media massa yang takluk di bawah cengkaman kapitalisme pers membentuk sikap dan perilaku pekerja pers yang memosisikan informasi semata-mata sebagai komoditas.

Dimensi ideologi, pemimpin dan organisasi yang menjadi dasar dalam pembentukan citra bagi pers, berkaitan satu dengan yang lain sehingga sukar ditelaah secara terpisah. Menurut Feith dalam Anwar (2010) ideologi pers hanya mungkin dipahami melalui komunikator yang bekerja di dalamnya. Juga dapat dipahami melalui partai atau pihak yang memiliki dan membiayai pers. Pemikiran ini tepat menggambarkan realitas pemberitaan di harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar. Keberpihakan media melalui sajian pemberitaan tidak bisa dilepas dari bagaimana kontribusi masing-masing kandidat dalam kerjasama melalui iklan ataupun menjadi sponsor utama pada kegiatan hari ulang tahun(HUT) Radar Makassar misalnya oleh Nurdin Halid yang menyalurkan dana ratusan juta rupiah. Begitu juga dengan posisi Ichsan Yasin Limpo sebagai pemilik saham di Rakyat Sulsel. Perbedaan ideologi, pemimpin dan organisasi (pemilikan) pers, akan terlihat perbedaan mengenai citra pers, kepribadian media dengan cara melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya. Dari sini pula akan terlihat bahwa pers mampu melayani kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Dimensi lain yang tidak mampu dijelaskan dari karya hasil penelitian yang pernah ada adalah pemilik dan pemimpin surat kabar. Sejauh ini tak ada satupun penelitian yang memberikan perhatian pada tipologi pemilik dan pemimpin surat kabar yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan ideology dan politik surat kabarnya. Hal inipulah yang tidak

mampu peneliti jangkau bagaimana peran dan bentuk intervensi pemilik saham terhadap berita-berita yang tayang. AH sebagai pemilik saham mayoritas di Rakyat Sulsel dan Radar Makassar bahkan memberikan kebebasan penuh kepada tim redaksi dalam merumuskan berita-berita yang akan disajikan kepada pembaca mengenai pemberitaan seputar kandidat di Pilgub Sulsel.

Dalam suatu kesempatan, AH sebagai pemilik Fajar Group mengundang seluruh pimpinan redaksi dan redaktur media yang berada di bawah asuhannya. Tidak ada perintah yang mengarah untuk membelah atau menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu dalam rapat tersebut. Kepada pimpinan redaksi dan redaktur, AH hanya menyampaikan agar media utamanya koran harian harus mampu bertahan ditengah geliat media online yang saat ini berkembang sangat pesat. AH menyerahkan sepenuhnya anak perusahaan miliknya dikelola pimpinan perusahaan, termasuk konten berita yang disajikan AH tidak ingin terlalu jauh mengintervensi. Yang terpenting bagi AH adalah perusahaan dapat berjalan dan menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terlepas bagaimana pimpinan perusahaan, redaksi dan awak media mencari jalannya agar media tetap berdiri sebagai saluran informasi. Sikap yang sama juga diperlihatkan oleh Moh.Ramdhan Pomanto sebagai bagian dari pemilik saham di Radar Makassar yang tidak mengintervensi pemberitaan menyangkut IYL-Cakka.

Padahal Danny sapaan Moh.Ramdhan Pomanto memiliki kedekatan dengan IYL dan menjadi rekan politiknya di Pilkada Sulsel.

SAH selaku *owner* dari Rakyat Sulsel dan Radar Makassar berdasarkan hasil wawancara dengannya mengaku memiliki tanggungjawab untuk membesarkan perusahaan yang diamanahkan padanya, serta perusahaan yang ia rintis sendiri. Pada momentum pemilihan gubernur SAH mengaku menjadi salah satu ladang pendapatan bagi perusahaan, utamanya Rakyat Sulsel yang segmennya politik. Berikut kutipannya :

“Pilkada tahun 2018 ini memang menambah penghasilan perusahaan. Tetapi durasinya tidak terlalu lama, mengingat dalam aturan PKPU media tidak diperkenankan untuk mensosialisasikan pasangan calon melalui pemasangan iklan. Sehingga kerjasama perusahaan dengan pasangan calon bukan lagi dalam bentuk iklan, tetapi kita taktisi dengan kerjasama melalui pemberitaan.

Hanya saja SAH mengaku tidak semua tawaran kandidat yang masuk ke perusahaan serta merta bisa diterima untuk menjalin kerjasama, utamanya Radar Makassar. Pengalaman Pilkada Kabupaten Takalar tahun 2016 lalu memberi pelajaran penting baginya. Menurutnya, akibat pembelaan dan keberpihakan berita yang dimuat di Radar Makassar kepada pasangan nomor urut satu, Bur-Nojeng saat Pilkada Takalar lalu yang begitu jor-joran, saat ini Radar Makassar kesulitan mendapatkan kerjasama kepada Bupati Takalar yang terpilih di pemilihan bupati lalu. Berikut adalah kutipannya :

“Dari pengalaman itu, Pilkada saat ini saya minta kepada unsur pimpinan perusahaan utamanya redaksi agar tidak menerima kerjasama kandidat jika nilainya kecil. Sebab bagaimanapun kecilnya kerjasama itu, perusahaan media bagaimanapun harus mampu memberi service kepada pengiklan. Sementara konsekuensinya adalah kandidat yang bekerjasama tidak ada jaminan akan menang di Pilkada, dan ketika yang menang adalah lawan dari pengiklan perusahaan maka kedepan kita akan sulit untuk mendapatkan kerjasama dengan pemerintahan setempat. Itu yang terjadi di Pilkada Takalar lalu,”

Atas pengalaman itulah yang kemudian menjadi pegangan bagi perusahaan di Radar Makassar, mengapa pada periode tertentu berita-berita yang dimuat terkait kandidat di Pilgub Sulsel mulai cair. Pemberitaan yang awalnya condong ke NH-Aziz belakangan kemudian berubah arah ke kandidat yang lain seperti Agus-TBL dan NA-ASS, meski intensitas pemberitaan keduanya tidak semassif NH-Aziz sebelumnya. Selain karena NH-Azis tidak mampu memenuhi nilai kontrak yang ditawarkan Radar Makassar untuk pengiklanan, NH-Aziz juga tidak bersedia membayar kontrak kerjasama dimuka. Tim media NH-Aziz mengingikan kerjasama itu dibayarkan setelah perhelatan pesta demokrasi lima tahunan, Pilgub Sulsel usai dihelat. Sementara pihak Radar Makassarpun menolak untuk itu, sebab dari pengalaman, banyak kandidat yang sudah tidak mau lagi melunasi kerjasama iklan setelah Pilkada usai, apalagi jika kandidat tersebut kalah.

Ideologi kedua media antara Radar Makassar dan Rakyat Sulsel tidak bisa dipahami sebagai media yang menganut ideologi dengan keberpihakan pada partai politik tertentu atau aliran politik yang sangat kuat, seperti yang

disampaikan oleh Herbert Feith (Anwar:2010) yang melihat bahwa di Indonesia terdapat lima aliran pemikiran politik yang berkembang dalam kurun 1945-1965, yakni (1) nasionalisme radikal, (2) Tradisionalisme Jawa (3) Islam, (4) sosialisme demokratik, dan (5) komunisme. Pola kelima aliran pemikiran politik itu digambarkan Feith memiliki konfigurasi dalam tatanan politik di Indonesia pada masa lalu. Pengelompokan dan aliran-aliran itu juga memasuki dunia persuratkabaran dengan seluruh dinamikanya, karena partai politik menerbitkan surat kabar.

Selain surat kabar yang diterbitkan oleh partai politik tersebut, juga terdapat beberapa surat kabar yang peranan dan pengaruhnya sangat penting dalam dinamika politik dan pers nasional. Surat kabar yang dimaksud itu bukanlah surat kabar partai, melainkan surat kabar yang independen (mandiri). Kendati demikian, surat kabar itu memiliki orientasi politik dan ideologi yang kuat, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan suatu kekuatan politik yang ada.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskursus Pilgub Sulsel Harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar

Bagian ini menganalisis diskursus pemberitaan mengenai pasangan calon (Paslon) di Pilgub Sulsel 2018 pada harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar. Pertama akan membahas pemberitaan yang cenderung memihak dan saling bertentangan kemudian disajikan di dua media tersebut oleh para wartawan di kedua media ini. Bagian berikutnya, akan membahas tentang fenomena di balik berita, berisi kisah-kisah tentang munculnya teks berita maupun berita yang tidak muncul. Diharapkan bagian ini bisa menjelaskan tentang proses konstruksi wacana yang menyebabkan terjadinya fragmentasi wacana.

Biasanya, konsep framing atau pemingkaian digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media (Eriyanto:2002). Sehingga bisa diketahui posisi dan sikap suatu media terhadap suatu realitas. Namun, pemingkaian juga bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan masing-masing wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, konsep pemingkaian dipakai untuk

menggambarkan sikap dari wartawan di media yang berbeda antara harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar. Asumsi dasar pembingkai adalah individu wartawan selalu menyertakan pengalaman hidup, pengalaman sosial, dan kecenderungan psikologisnya ketiga menafsirkan pesan yang datang kepadanya. Dalam hal ini, individu dibayangkan sebagai subyek yang aktif dan otonom. Sedangkan berita yang akan dianalisis adalah berasal dari tiga penulis yang memiliki perbedaan latar belakang personal dan profesional, posisi dalam struktur, dan wilayah penugasan pada kedua surat kabar ini.

Berita-berita di harian Rakyat Sulsel dengan bingkai mendukung maupun kontra terhadap salah satu paslon di Pilgub Sulsel ditulis oleh empat wartawan, di mana keempat wartawan politik Rakyat Sulsel masing-masing telah ditugaskan untuk mengawal setiap pemberitaan maupun isu-isu yang sedang berkembang dari empat Cagub-Cawagub. Keempat wartawan tersebut adalah FH, bertugas untuk meliput atau mengkonfirmasi setiap pemberitaan paslon Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman(NA-ASS), IK, bertugas mendampingi dan mengawal berita-berita paslon Ichsan Yasin Limpo-Andi Musakkar(IYL-Cakka), AAM ditugaskan dari redaksi untuk mendampingi paslon Agus Arifin Nu'mang-Tanri Badallamo(Agus-TBL) dan SM mengawal setiap kegiatan dari paslon Nurdin Halid-Aziz Kahar Musakkar(NH-Aziz).

Pemilihan empat wartawan ini diharapkan merepresentasikan keberagaman perspektif di Rakyat Sulsel terkait diskursus pemberitaan Pilgub Sulsel. Sesuai teori yang diajukan, penulis meyakini, konstruksi berita, selain dipengaruhi oleh budaya organisasi media dan kepentingan ekonomi politik media yang bersangkutan, juga akan dipengaruhi oleh kepentingan individu penulisnya. (Gamson dan Modigliani :1993). Oleh karena itu, sekalipun semua teks berita yang dianalisis ditulis oleh wartawan Rakyat Sulsel, diyakini teks-teks ini memiliki keragaman perspektif dan kepentingan. Berita di media biasanya melalui penyuntingan (*gate keeper*) oleh seorang editor sebagai palang pintu untuk menyeleksi semua informasi agar bobot dan kualitas berita dapat terjaga dengan baik di ruang redaksi(Haryadi :2015). Sehingga kemungkinan mengalami perubahan dari naskah awalnya dapat saja terjadi. Sekalipun demikian, penyuntingan di Rakyat Sulsel berdasarkan penuturan Redaktur Pelaksana, DY menjelaskan sebagai berikut :

“Tidak semua berita yang dikirimkan wartawan itu bisa naik. Tetap harus melalui penyaringan, di sinilah tugas dari seorang redaktur sebagai seorang penyunting berita. Namun biasanya berita-berita yang tertahan di redaktur itu hanya lebih soal kelengkapan informasi atau pembetulan ejaan. Meskipun memang kadang ada faktor lain di luar itu yang dapat menyebabkan sebuah berita batal untuk tayang,”ujarnya.

Editor memang bisa melakukan pengayaan naskah atau menggabung dengan berita lain yang berkaitan dengan itu. Namun, jika

ada perubahan perspektif tulisan, biasanya akan dikomunikasikan kepada wartawan penulisnya. Dalam kasus tertentu, editor yang menambahi data dan informasi sehingga mengubah bingkai tulisan, akan mencantumkan inisial atau namanya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berita tersebut. Penuturan DY sebagaimana yang dijelaskan Mark Firsman dalam Eriyanto(2002) bahwa ada dua kecenderungan studi bagaimana proses berita dilihat. Pertama adalah sering disebut dengan pandangan seleksi berita(*selectivity of news*), bentuknya seringkali melahirkan teori seperti *gate keeper*.

Redaktur bertugas menyaring maupun mengedit berita politik dari empat wartawan Rakyat Sulsel sendiri terdiri dari tiga redaktur, masing-masing adalah DY(Penanggung jawab halaman 1), RL (bertugas menangani isu politik di daerah), dan MS adalah editor halaman Pilgub Sulsel. Proses produksi berita dimulai dari listing berita masing-masing wartawan politik, kemudian dibahas dalam rapat redaktur politik untuk kemudian diajukan dalam rapat redaksi antar desk (biasanya dipimpin oleh redaktur pelaksana) untuk diputuskan isu yang tepat dalam sajian berita. Sebagaimana konsep pemingkaiian yang disarankan Gamson dan Modigliani(1993) untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika memilih isu dan menulis berita, maka jumlah (aspek kuantitatif) berita bukanlah tujuan kajian ini. Sebagai alat penyelidikan isi berita secara

kualitatif, pemingkaan lebih memberi perhatian kepada proses terciptanya berita. Jadi, yang dilihat bukan jumlahnya, tetapi bagaimana peristiwa itu dikonstruksi menjadi teks. Dalam penelitian ini akan dianalisis tulisan dari tiap wartawan.

Berbeda dengan harian Rakyat Sulsel, Radar Makassar dalam menyajikan berita politik, terkait empat pasang calon yang berlaga di Pilgub Sulsel tidak membagi wartawannya dalam mengawal setiap kegiatan dan isu-isu yang berkembang pada masing-masing calon. Mengingat segmen Radar Makassar adalah koran umum dengan jumlah halaman untuk rubrik politik yang terbatas, yakni hanya satu halaman dan terbit hanya lima kali dalam seminggu. Berbeda ketika ada isu yang dianggap menarik seputar perhelatan Pilgub Sulsel, biasanya berita tersebut akan ditarik ke halaman satu, dengan memberikan penugasan kepada wartawan spesialis halaman satu. Wartawan yang bertanggung jawab untuk halaman satu di harian Radar Makassar yakni : CT, MCM, dan RA, sedang penanggung jawab atau redaktur untuk halaman satu yakni AS. Sementara wartawan yang bertanggung jawab pada halaman politik adalah KS, dan RA sebagai penanggung jawab halaman dengan status sebagai asisten redaktur (Asred).

Secara lebih sederhana arah pemberitaan dari masing-masing wartawan di harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar dapat digambarkan melalui

tabel di bawah ini, yang kemudian akan diikuti penjelasan dari hasil wawancara pada halaman berikutnya.

Arah Pemberitaan Paslon di Pilgub Sulsel

Awak Rakyat Sulsel			
➤ Reporter			
Inisial	Tugas Utama	Keterikatan dengan Paslon	Efek Pemberitaan
IK	Mengawal setiap pemberitaan IYL-Cakka	IK juga diberi mandat khusus dari tim IYL-Cakka menjadi wartawan khusus yang bertugas membuat rilies berita.	Berita yang dibuat cenderung positif dan lebih diprioritaskan
FH	Mengawal setiap pemberitaan NA-ASS	FH tidak memiliki hubungan atau kedekatan emosional dengan paslon	Berita yang dibuat cenderung negatif dan lebih mudah diterima oleh redaktur
AAM	Mengawal setiap pemberitaan Agus-TBL	AAM memiliki kedekatan emosional dengan Agus-TBL	Berita cenderung positif namun sulit untuk tayang
SM	Mengawal pemberitaan NH-Azis	SM memiliki kedekatan emosional dengan NH-Azis	Berita yang dibuat cenderung positif, kadang kala naik namun beberapa berita juga negative

Awak Radar Makassar			
➤ Reporter			
KS	Reporter politik	Secara emosional dekat dengan NH-Azis, orang yang meloloskan kerjasama NH-Azis di perusahaan. Memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan tim IYL-Cakka	Lebih berpihak ke NH-Azis, dan berita terkait IYL-Cakka cenderung negative
CT MCM RA	Spesialis halaman satu	Tidak memiliki kedekatan emosional	Arah pemberitaan netral, kecuali berita yang dirumuskan berdasarkan hasil perencanaan redaksi
FD	Spesialis halaman satu dan halaman daerah	Dekat dengan Agus serta menjadi bagian dari tim media Agus-TBL	Arah pemberitaan menunjukkan keberpihakan kepada Agus-TBL, meski hal itu baru diakomodir pimpinan redaksi saat kerjasama Agus-TBL masuk.

Tabel 5.1

Sumber : Berdasarkan Hasil Penelitian

1. Pemihakan dan Pembelahan Berita

Berita di harian Rakyat Sulsel dengan bingkai mendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut empat, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar(IYL-

Cakka)di Pilgub Sulsel semuanya ditulis oleh IK dan dibantu oleh wartawan deks politik yang lain, dalam kurung waktu Agustus 2017 hingga 15 Februari setelah penetapan calon oleh KPU Sulsel. Dalam karirnya sebagai wartawan di Rakyat Sulsel sejak tahun 2016, IK mulai deks halaman politik pada pertengahan tahun 2017. Salah satu yang ditulisnya mengenai IYL-Cakka adalah berita yang diberi judul "Kekuatan Besar Jegal Punggawa," terbit pada 22 September 2017 di halaman pertama. Dalam penelitian ini akan dianalisis perbandingan berita yang terbit di halaman satu Radar Makassar dengan judul yang berseberangan,yakni "Risman :Siapa yang Jegal IYL ?,". Berita ini ditulis oleh tiga wartawan yang memang menjadi spesialis halaman satu di Radar Makassar. Ketiganya adalah peneliti sendiri, dan KS.

Berita dengan bingkai pro terhadap IYL-Cakka yang terbit di harian Rakyat Sulsel pada halaman pertama dengan judul “Kekuatan Besar Jegal Punggawa,” sebagaimana terlampir pada gambar 5.1 di bagian lampiran. Penempatan berita ini sebagai headline di halaman utama harian Rakyat Sulsel dilengkapi dengan gambar karikatur yang menggambarkan sebagai pihak yang berupaya menjegal IYL-Cakka di Pilgub Sulsel. Berita ini memiliki dua bagian yang saling menguatkan maksud penulisanya. Pertama adalah tentang adanya skenario mejegal IYL-Cakka berlaga di Pilgub dengan cara menutup pintu dukungan parpol dan adanya upaya mengganggu paslon ini maju di jalur perseorangan. Dalam hal ini penjegalan itu digambarkan melalui

dukungan parpol yang sudah menyatakan dukungan kepada IYL belakangan menarik diri dan dicarikan cara untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi usungan. Upaya penjegalan lainnya dilihat oleh wartawan yakni adanya manuver kubu tertentu yang ikut mengumpulkan dukungan KTP yang disebut-sebut ingin mengesankan nantinya terjadi dukungan ganda.

IK kemudian menggunakan ucapan Wakil Ketua DPP PPP, Amir Uskara yang mengatakan ada kandidat lain yang sengaja merecoki dukungan PPP ke IYL-Cakka melalui DPP, "Kami konsisten bersama IYL di Pilgub. Meski ada pihak sengaja merecoki PPP lewat DPP. Jelas bahwa penulis dari berita ini ingin memberikan kesan adanya upaya penjegalan kepada IYL-Cakka. Meskipun tidak jelas dalam berita ini pihak yang dimaksud melakukan penjegalan. Sementara untuk mendukung gagasan itu, IK mengutip pendapat Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto yang menilai langkah penjegalan itu sengaja dilakukan, karena ada kecenderungan takut berlawanan IYL-Cakka jika pasangan ini ditetapkan oleh KPU Sulsel.

Untuk memperkuat gagasan adanya kekuatan besar jegal Punggawa di Pilgub, IK juga mengutip pendapat Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono yang menuturkan tekanan yang terus dihadapi IYL hanyalah sebuah strategi politik kandidat lain untuk menjatuhkan mantan Bupati Gowa dua periode itu. Dalam berita ini IK ingin

menekankan bahwa ada kekuatan yang dimiliki IYL saat ini untuk maju di Pilgub cukup untuk menjadi ancaman bagi lawan politiknya."... Menurut saya itu bukan tekanan, lebih ke strategi saja. Kalaupun diterjemahkan tekanan maka bisa dikatakan bahwa lawan-lawan IYL mungkin menganggap IYL sebagai ancaman," kata Arief di kutip dalam berita yang ditulis IK. Dengan alasan-alasan inilah, maka wartawan ingin mengajak pembacanya bahwa peluang menangnya IYL-Cakka di Pilkada itu sangat besar, lantaran rivalnya takut jika IYL-Cakka sampai resmi menjadi peserta di Pilgub.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan IK tentang latar belakang berita itu muncul dan alasan mengambil angle berita seperti judul berita yang sudah diuraikan di atas, berikut adalah ulasannya :

“Jadi judul berita tersebut sebenarnya merupakan pernyataan dari Ichsan saat pidato di salah satu kesempatan acara bersama pendukung dan timnya. Pak Ichsan mengaku kalau ada pihak yang berupaya untuk menjegal dirinya, jadi kami ambil pernyataan tersebut kemudian menambah narasumber untuk mendukung pernyataan itu....Cara dan pola pikir wartawan di Rakyat Sulsel adalah bagaimana peluang berita itu bisa naik, sebab kita tidak digaji seperti karyawan lain yang memiliki gaji standar UMP, kami digaji berdasarkan jumlah berita yang terbit. Sehingga saya sebagai wartawan yang ditugaskan mendampingi IYL tentu mencari isu yang peluang berita itu bisa mengisi halaman, mengigit IYL adalah bagian dari Rakyat Sulsel sendiri yang tidak mungkin dicerca tentu untuk memudahkan berita saya dimuat adalah memberitakan hak positif dari beliau.”papar IK

Robert N. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua

faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isu beritanya. Perfektif inilah yang kemudian digunakan oleh IK dalam menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Di balik itupula, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjokan tentu melibatkan nilai dan ideology para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.

Sehari kemudian muncullah berita di harian Radar Makassar dengan judul yang berseberangan dengan yang dimuat di Rakyat Sulsel sebelumnya. Berita dengan judul "Risman :Siapa yang Jegal IYL ?", seperti gambar 5.2 yang terlampir pada laman lampiran seolah ingin membalas pernyataan narasumber yang dikutip IK dalam beritanya. Berita yang dimuat pada Senin 25 September itu di tempatkan pada halaman utama Radar Makassar, peneliti sendiri ikut andil dalam penyajian berita itu bersama dengan wartawan politik Radar, KS. Berita yang berjumlah 10 paragraf dengan bingkai kontra terhadap IYL itu menggunakan pernyataan Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel, Risman Pasigai yang mengaku heran jika ada bakal calon gubernur(sebelum penetapan) yang merasa dijegal untuk maju di Pllgub, karena menurutnya yang menentukan pilihan adalah partai. "...Siapa yang jegal yang IYL ? Yang jelas kita tidak pernah jegal calon karena yang menentukan dukungannya adalah partai masing-masing," seperti yang dikutip Kasmawati Sakka, wartawan yang saat itu ditugaskan

untuk mengkonfirmasi pihak NH-Aziz terkait pernyataan pihak IYL-Cakka yang mengaku dijegal di Pilgub.

Berita yang memang sudah masuk dalam perencanaan di redaksi itu turut melibatkan peneliti yang diberi tugas melakukan wawancara kepada pihak tim NA-ASS. Hasilnya diperoleh pernyataan yang menegaskan bahwa tidak ada satu pun rival IYL yang berupaya melakukan penjegalan. Komentar balasan itu sebagaimana yang disampaikan Juru Bicara NA, Bunyamin Arsyad. Bunyamin menegaskan tidak ada satupun upaya politik yang dilakukan NA untuk menghalang-halangi pencalonan kandidat tertentu.”...Kalau pengalihan dukungan PAN yang beralih ke NA kemudian dianggap ada upaya menjegal, silahkan Tanya ke DPP PAN. Apakah pernah pihak NA membangun komunikasi ke elit PAN di pusat,” kutip penulis.

Pesan yang ingin disampaikan dalam berita ini kepada pembaca adalah, upaya menjegal IYL di pilgub adalah tidak benar. Pengalihan dukungan parpol yang dianggap sebagai upaya penjegalan kepada IYL oleh berita yang muat di Rakyat Sulsel, digambarkan berbeda di Radar Makassar, di mana pengalihan dukungan PAN dibingkai dalam berita ini sebagai pertimbangan khusus di internal DPP dan tidak bisa dianggap sebagai sebuah penjegalan dari lawan politik. Tidak ada perdebatan yang berarti ketika berita ini diusulkan dalam rapat perencanaan di Radar Makassar. Mengingat mulai dari pimpinan redaksi , redaktur hingga ke wartawan tidak

ada satu pun yang pernah menjalin hubungan dengan pihak IYL-Cakka, termasuk orang-orang dalam struktur pemenangannya. KS sendiri sebagai wartawan politik Radar sangat senang dan mendukung pemberitaan itu dimuat. Bahkan dalam rapat sempat ada kalimat dengan nada dongkol yang keluar dari mulut KS yang bergabung di Radar sejak tahun 2015.

“Muat saja beritanya, kalau yang mau bicara kalau tidak ada upaya yang menjegal IYL-Cakka banyak dari Golkar yang bisa, termasuk dari NA pasti mau berstetmen.....IYL sama timnya itu sama saja, sombong, angkuh kalau diwawancarai,” Tukas Kasma dalam rapat yang saat itu sempat disambut dengan tawa penghuni redaksi.

Dari cerita KS selaku wartawan yang khusus ditugaskan untuk deks politik di Radar Makassar mengaku dongkol dengan juru bicara paslon IYL-Cakka, Risky Vatmala Passalo yang tidak komunikatif dengan wartawan. Risky kata KS saat dikonfirmasi perihal berita IYL-Cakka kadang tidak digubris, perlakuan Risky itulah yang membuat Kasma dibuat naik pitam. Berikut ulasan KS saat wawancara :

“Kita inikan dituntut oleh kantor untuk bisa mendapat konfirmasi dari narasumber demi memenuhi keberimbangan berita, nah jubir paling sulit untuk dikonfirmasi itu adalah tim pemenangan IYL-Cakka. Itu kadang saya emosi dan menjadi subjektif membuat berita. Apalagi memang di internal Radar Makassar saya merasa lebih leluasa membuat berita negatif IYL-Cakka karena tidak akan ada yang menahannya.

Apa yang dialami KS sebagai wartawan memberi pengaruh kepada media yang secara intens kerap menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialaminya secara subyektif. Peneliti pun secara pribadi termasuk

orang yang pernah mendapat pengalaman buruk saat melakukan wawancara dengan salah satu anggota klan YL, yang tidak lain adalah anak dari IYL, Bupati Gowa Adnan Purichta IYL. Dari pengalaman itu peneliti pun menjadi tidak respek dengan Adnan termasuk kepada ayahnya. Atas pertimbangan itu, dalam penulisan berita peneliti pun kerap subjektif.

Meskipun berita di atas merupakan diluar dari inisiasi wartawan, melainkan memang penugasan atau perencanaan dari meja redaksi yang suka tidak suka atas nama profesionalisme sebagai karyawan yang ditugaskan haruslah dikerjakan. Apa yang dialami oleh wartawan di Radar Makassar dengan segala fram , tidak dapat dilihat dengan skema individu melainkan juga hubungan dengan proses produksi berita,kerangka kerja dan rutinitas organisasi media(Eriyanto :2002). Wartawan hidup dalam institusi media dengan segala perangkat aturan, pola kerja dan aktivitas masing-masing bisa terjadi institusi media itu yang mengontrol dalam pola kerja tertentu yang mengharuskan wartawan melihat peristiwa dalam kemasam tertentu.

Sementara pada hari yang sama, Senin 25 September 2017, keterbelahan berita yang muat di harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar juga terjadi. Berita mengenai hasil survei tingkat elektabilitas empat kandidat di Pilgub oleh lembaga Poltracking Indonesia saling bertolak belakang dengan bingkai yang berbeda sebagaimana yang dituliskan wartawan kedua

media ini. Di halaman utama Rakyat Sulsel yang diberi judul “Elektabilitas Punggawa Tertinggi” seperti terlampir di Gambar 5.3. Oleh wartawan mengambil engle berita yang ingin menggambarkan bahwa elektabilitas sosok IYL sebagai calon gubernur paling tinggi tingkat keterpilihannya. IK dan SM adalah orang yang menuliskan berita ini.

Sementara Radar Makassar punya sajian berita yang berbeda mengenai hasil survei tersebut. Di tempatkan pada laman politik, berita yang diberi judul “IYL-Cakka Tertinggal Jauh dari NH-Aziz” itu ditulis oleh CT dan KS dengan mengambil engle tingkat keterpilihan pasangan bakal calon di Pilgub. Tidak ada yang salah dari kedua berita ini dalam memberikan informasi, sebab keduanya memiliki data yang benar sebagaimana yang dirilies oleh Poltracking Indonesia. Perbedaaanya adalah engle berita yang dipilih wartawan untuk dijadikan judul utama dalam pemberitaan. Wartawan Rakyat Sulsel mengangkat soal elektabilitas kandidat bakal calon gubernur ,sedang wartawan Radar Makassar memilih tingkat elektabilitas pasangan bakal calon antara IYL-Cakka dan NH-Aziz sebagai topik utama dalam berita.

Senada dengan IK, SM atas inisiatif sendiri memilih engle berita dari hasil survei Poltracking Indonesia terkait popularitas IYL yang mengalahi seluruh paslon. Meski tidak ada perintah dari pimpinan redaksi, SM mengaku paham akan tugasnya memilih berita yang memungkinkan untuk dimuat,

demi memenuhi target penghasilan sebagai wartawan di Raksul. Berikut adalah uraian hasil wawancara bersama SM :

“Berita itu saya inisiasi sendiri dan di luar dari perencanaan redaksi, kemudian ditambahkan oleh Iskanto dari hasil wawancaranya dengan pihak IYL-Cakka. Sebenarnya saya bisa-bisa saja mengambil engel lain dari isu tersebut, tetapi pasti ketika berita itu sudah ditangan redaktur yakin dan percaya isu berita itu akan berubah 180 derajat. Artinya murni bukan lagi berita yang saya tulis, karenanya untuk amannya saya tulis saja yang betul-betul sehat dengan redaksi.”

SM yang juga bertugas di desk politik, diberi mandat dari redaksi untuk mengawal setiap isu menyangkut paslon nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar (NH-Aziz). SM mengaku jika bukan karena ada penugasan atau isu tersebut menyangkut soal pencitraan IYL-Cakka, estimasi berita yang dikirim ke redaksi lebih banyak mengenai pencitraan NH-Azis. Hal itu karena selain dilatar belakangi adanya kedekatan emosional dengan tim pemenang NH-Azis, paslon juga sangat sering memanjakan para partawan politik. Berikut ulasan lebih jauh dengan SM :

“Kedekatan emosional dengan kandidat menimbulkan semacam kompromi dalam menuliskan berita, sebab rasa tidak enak kepada narasumber yang sudah sangat dekat dengan narasumber . Apalagi NH-Aziz dan timnya itu sangat loyal terhadap wartawan, sehingga itu mungkin jadi alasan saya biasa mengurungkan niat untuk menulis sesuatu yang buruk tentang beliau,”katanya.

Pernyataan itu persis yang dikatakan oleh KS. Kata dia beberapa kali awak media desk politik diajak jalan, makan dan rekreasi dengan tim. Kebaikan dari tim NH-Aziz kepada pewarta politik khusus Pilgub

menyebabkan kedekatan emosional itu terbangun dengan baik. Bahkan KS mengakui bahwa berita-berita yang ia kirimkan ke redaksi banyak soal pencitraan NH-Azis yang diperolehnya dari rilies yang dibuat oleh tim media. Bukan tanpa alasan KS menggadaikan profesionalismenya sebagai seorang jurnalis, dimana dituntut untuk independen dan tidak memihak pada salah satu paslon di Pilkada. Berikut adalah ulasan hasil pengakuan KS :

“Kita tidak boleh munafik yah, gaji sebagai reporter itu sangat kecil. Jauh dibawah UMP, dan semua wartawan saya kira punya nasib yang sama soal itu. Salah satu sumber pendapatan yang bisa menambah penghasilan adalah dari kerjasama iklan yang saya loloskan di perusahaan. Dari situ saya dapat potongan fee. Termasuk kerjasama NH-Azis adalah saya yang meloloskannya. Bahkan kontribusi NH-Azis ke Radar sangat besar hingga menjadi sponsor terbesar saat perayaan HUT Radar yang ke-3 lalu. Olehnya wajar saya kira kalau media, tempat NH-Azis bekerjasama memberikan service terbaik dan memuaskan.”papar KS

Media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi memberi peran penting dalam pembentukan opini publik. Dalam kaitannya dengan pemberitaan seputar empat paslon di Pilgub Sulsel yang ditulis awak media Radar Makassar maupun Rakyat Sulsel banyak ditemukan berita-berita yang bias memandang sebuah kasus atau isu tertentu. Sehingga terkesan adanya pretensi yang bersifat konspiratif (hidden agenda) baik yang bersifat politik maupun interest (kepentingan). Sebagaimana disinggung oleh Alex Sobur (2006) bahwa media massa sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Wartawan seperti IK dan KS bisa jadi mempunyai

pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter L Berger dalam teori konstruktivisme ekonomi politik.(Agus:2006)

Tidak hanya itu media melalui awak jurnalis secara intens kerap menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialaminya secara subyektif. Subyektivitas tersebut muncul, terutama jika terdapat tuntutan pragmatisme dari instansi media yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis. Wujudnya adalah motif kepentingan pada tingkat perorangan, diantaranya yang bersifat politis (partisan). Motif tersebut menjadikan proses dan kerja berita bukan lagi didasarkan pada landasan etis dan profesional, namun pada landasan politik. Motif politik mampu menjadi ruh sekaligus menentukan arahnya sebuah laporan. Prosesnya berdasarkan kebijakan redaksional media yang menginginkan adanya sebuah frame yang didasarkan atas kepentingan internal media. Individu atau seorang jurnalis mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksikannya dalam dunia realitas, sekaligus memantapkan realitas itu berdasarkan kepentingan institusi medianya.(Eriyanto:2002)

Itu jugalah yang menjadi latar belakang munculnya berita-berita yang cenderung membela ataupun berpihak kepada paslon NH-Aziz yang diusung oleh 8 partai pemilik kursi di legislatif. Dari banyak berita yang disajikan oleh

kedua media ini terkait empat figur yang bertarung di Pilgub Sulsel, bisa dibbilang ruang NH-Aziz lebih bisa mendapatkan tempat. Di Rakyat Sulsel misalnya, beberapa berita yang tayang masih menunjukkan tren yang positif (seperti yang terlampir pada gambar 5.6) meskipun hanya di tempatkan pada halaman dalam. Sementara pada kondisi tertentu pula NH-Aziz harus legowo menerima bahwa ada “Tuang” yang mesti diutamakan yakni IYL-Cakka di harian Rakyat Sulsel. Beberapa berita soal NH-Aziz di Raksul seperti di bawah ini . Berdasarkan informasi dari wartawan yang bertugas mendampingi setiap pemberitaan NH-Aziz, SM mengungkapkan, selain IYL-Cakka, paslon nomor urut satu ini memang masih punya tempat di halaman Rakyat Sulsel untuk setiap berita pencitraan terkait dengan pencalonannya di Pilgub Sulsel. Berikut adalah ulasan SM :

“Berita atau isu berkenaan dengan NH-Aziz memang lebih mudah tayang. Bisa dibbilang memang selain IYL-Cakka, paslon ini menjadi kandidat kedua yang dipertimbangkan untuk beritanya itu dimuat. Itu karena ada kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan....Jadi pasti kalau saya kirim rilies yang diambil dari tim media pemenangan kandidat ini jarang sekali tidak naik, kecuali mungkin saat itu koran dipenuhi iklan,”pungkas SM

Siklus pemberitaan harian Radar Makassar dengan freming cenderung menggambarkan sisi positif dari NH-Aziz ini hanya berlangsung hingga akhir tahun 2017. Arah pemberitaan kemudian berubah, setelah kerjasama NH-Aziz di Radar berakhir dan tidak kunjung dilanjutkan. Bersamaan dengan itu terjadi dael-dael kerjasama iklan antara pihak marketing di Radar dengan tim

media paslon Agus-TBL. Secara langsung perjanjian kerjasama itu mengubah arah dan freming pemberitaan di ruang redaksi Radar Makassar. Intensitas berita mengenai Agus lebih sering naik, bahkan isu mengenai Pilgub Sulsel diarahkan untuk bisa mewakili kepentingan si pengiklan. Salah satu berita bisa digambarkan seperti yang terlampir pada gambar 5.6.

Berita dengan judul “KPU : Agus-TBL Penuhi Syarat” ini ditulis oleh KS dan wartawan deks di Pemprov Sulsel, FD. Ditempatkan pada halaman satu, berita ini dianggap sangat penting untuk diketahui pembaca. Mendapatkan surat rekomendasi usungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada detik-detik akhir masa pendaftaran peserta Cagub, banyak pihak yang menganggap kalau pasangan ini tidak akan melaju. Oleh karenanya berita disajikan untuk meyakinkan pembaca bahwa Agus-TBL memenuhi syarat sebagai kandidat di pesta lima tahunan Sulsel, bersama tiga rivalnya yang lain.

Narasumber yang mengisi berita ini adalah, Agus sendiri, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif dan salah satu pimpinan partai pengusung Agus-TBL yakni, Ketua DPD Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani. KS penulis berita ini mengatakan hanya menjalankan penugasan dari pimpinan redaksi untuk melakukan wawancara dengan Ketua KPU Sulsel dan Ketua DPD Gerindra. Berikut kutipannya saat wawancara dengan KS:

“Berita ini adalah penugasan kantor. Jadi setiap malam setelah agenda liputan dan berita dikirim ke redaktur , kami reporter kembali ke kantor untuk mengikuti rapat membahas apa-apa isu yang menarik untuk disajikan di halaman satu,begitu juga dengan halaman lainnya. Pada saat itu adalah hari terakhir pendaftaran paslon, namun yang menarik itu adalah kita semua masih meraba-raba soal pencalonan Agus-TBL yang belum cukup partai, sehingga itu dianggap menarik. Selain itu memang paslon ini lebih diutamakan karena ada kerjasama. Sebagaimana arahan dan budaya yang terbangun di perusahaan.”ungkapnya.

Sementara penulis kedua dari berita ini adalah FD. FD adalah wartawan yang desk di Pemprov Sulsel sejak tahun 2016, terhitung saat kali pertama bergabung di Radar Makassar. FD termasuk wartawan yang ikut berkontribusi meloloskan kerjasama iklan Agus-TBL, mengingat hubungan emosional yang terjalin selama tiga tahun yang terbangun selama posting di Pemprov Sulsel. Dalam penulisan berita mengenai Pilgub Sulsel yang tersaji di Radar Makassar, FD hanya beberapa kali ditugaskan melakukan konfirmasi, itu pun sebatas kepada Agus-TBL saja. Sepenuhnya tanggungjawab itu lebih banyak diberikan kepada CT selaku spsialis untuk halaman utama di Radar. Sebagaimana sistem kerja redaksi untuk wartawan yang bertugas mengisi berita halaman satu, CT lebih leluasa lompat desk dari isu pemerintahan hingga isu politik. Sedang FD yang merupakan Asisten Redaktur(Asred) yang bertanggung jawab untuk halaman daerah, tidak lagi berkontribusi penuh mengirim berita halaman utama, kecuali untuk isu-isu tertentu yang membutuhkan kontribusinya. Berikut adalah kutipan Firdaus :

“Sejak saya diangkat menjadi Asred dan diberi mandat untuk menangani halaman daerah, beban kerja untuk isu politik khusus halaman satu lebih banya diberikan kepada Clara. Pun saya ke kantor Pemprov tujuan saya adalah mencari isu yang menarik untuk kemudian di muat di halaman daerah (rubrik Sulsel). Sebab wartawan atau contributor daerah tidak bisa sepenuhnya diandalkan, kadang mereka mengirim berita kadang tidak, sehingga mau tidak mau saya sendiri yang turun lapangan.Khusus untuk kerjasama iklan Agus-TBL, memang betul saya termasuk orang yang membantu meloby. Tetapi setelah memfasilitasi pihak tim Agus dan marketing di perusahaan. Kerjasama itu langsung diambil alih oleh pihak iklan.”urainya.

Salah satu berita yang bisa menggambarkan bagaimana media harus mampu melayani pihak pemberi kontribusi untuk perusahaan adalah, terkait isu mengenai penunjukan pelaksana tugas dan karateker yang kepala daerahnya ikut bertarung di gelanggang Pilkada serentak di Sulsel(Berita terlampir di gambar 5.7) Khususnya Kabupaten Bone dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di Sulsel setelah Kota Makassar. Penunjukan karateker di daerah lumbung suara di Susel secara tidak langsung ikut mempengaruhi arah politik kepada paslon mana dukungan birokrasi di pemerintahan itu disematkan. Kakak kandung IYL, yang juga tak lain adalah Gubernur Sulsel, Sahrul Yasin Limpo memiliki hak preogratif untuk menunjuk pelaksana tugas di Bone.

Isu itulah yang kemudian dijadikan frame pemberitaan yang diberi judul “Penunjukan Plt dan Karateker Jangan Ada Unsur Politis” terbit Senin 29 Januari 2018 . Dengan harapan berita ini akan mempengaruhi khalayak bahwa penunjukkan karakteker penuh dengan unsur politik di dalamnya,

sehingga hanya menguntungkan kandidat tertentu dan merugikan paslon yang menjadi “Tuang” di harian Radar Makassar, dalam hal ini adalah Agus-TBL. Berita ini ditulis oleh CT dan MCM (eks wartawan Radar Makassar) yang resaiinge dari Radar setelah penetapan paslon di Pilgub resmi diumumkan oleh KPU Sulsel. Menjadikan Pengamat Politik UIN Alauddin, Firdaus Muhammad dan Pakar Ilmu Pemerintahan Unhas, Hasrat Arief sebagai narasumber utama yang mengkritisi penunjukan karateker dengan muatan politik, ditambah narasumber anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi dan Sekretaris Daerah Provinsi(Sekprov), Abdul Latif. Menurut MCM dan CT sebagai penulis berita ini mengatakan, sebagai reporter yang bertanggung jawab penuh terhadap pemberitaan yang muat di halaman satu, dirinya sedapat mungkin mendapat narasumber yang bisa berstatmen sejalan dengan penugasan yang diperintahkan dari pimpinan redaksi. Berikut ulasan MCM :

“Berita itu sebenarnya penugasan menanggapi penunjukan karateker di Bone yang sarat dengan kepentingan. Oleh redaksi memandang kalau itu hany menguntungkan IYL-Cakka. Sebagai kita ini adalah pekerja yang harus tunduk dan wajib menjalankan perintah atasan, tentu penugasan itu menjadi prioritas kami jalankan. Pemilihan narsum pun seperti pengamat, yang kami anggap netral di Pilkada, sebab banyak juga pengamat atau akademisi yang berpihak.....Kalau dibilang kedekatan emosional dengan kandidat kemudian berita itu hadir, itu salah sebab saya sendiri memang selama menjadi wartawan sejak tahun 2014 di Raksul hingga pindah ke Radar Makassar tahun 2016 tidak pernah bergelut di peliputan politik, saya banyak ditugaskan untuk isu hukum dan kriminal. Jadi memang semata profesionalisme saja menjalankan tugas dari redaktur,”urai MCM

Proses produksi berita berdasarkan kebijakan redaksional media yang menginginkan adanya sebuah frame yang didasarkan atas kepentingan internal media. Individu atau seorang jurnalis mengkonstruksi realitas, dan merekonstruksikannya dalam dunia realitas, sekaligus memantapkan realitas itu berdasarkan kepentingan institusi medianya. Hal itu juga diperkuat oleh adanya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, etnisitas, yang kesemuanya turut mempengaruhi wartawan dalam menghasilkan sebuah liputan (media content). Akibatnya, cepat atau lambat, media terjebak ke dalam *trial by the pres*. (Jorgensen :2007).

Kondisi yang terjadi di internal harian Radar Makassar terkait kepentingan institusi media, juga dialami oleh wartawan politik harian Rakyat Sulsel. Berdasarkan penuturan wartawan politik yang khusus ditugaskan mendampingi pemberitaan dari paslon nomor urut dua yakni, Agus-TBL, AAM mengatakan jarang sekali berita seputar pencitraan mantan wakil gubernur Sulsel dua priode itu mendapat tempat di halaman Rakyat Sulsel, jika berita itu bukan penugasan. Itupun kata AMM, rerata ia baru mendapatkan penugasan untuk mengkonfirmasi pribadi Agus jika berita itu kurang sedap. Berikut pengakuan AAM :

“.....Saya bisa memahami, sebab Agus memang tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Rakyat Sulsel sehingga itu akan berdampak pada pemberitaan.....Diantara empat kandidat, bisa dibilang Agus adalah paslon yang paling dekat dengan saya, mengingat sudah bertahun-tahun saya posting di kantor Pemprov

Sulsel, bahkan sebelum saya masuk di Rakyat Sulsel pada September 2017, dan selama itu seingat saya belum ada berita soal Agus yang ditugaskan oleh kantor dan itu tidak negatif, bahkan sekalipun saya mengirim berita positif terkait Agus karena kami sudah dekat secara emosional sangat susah untuk naik.....Sejauh ini pihak kantor pun menuntut kami para wartawan untuk membantu melobi kerjasama iklan dengan para paslon yang kami ditugaskan untuk mengawal pemberitaan”..

Bagi AAM, kedekatan emosional dengan paslon di Pilkada bisa saja mempengaruhi psikologi wartawan dalam menuliskan berita, namun itu tidak akan menjadi berarti jika kandidat tidak ikut menjalin kerjasama dengan perusahaan. Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh wartawan Rakyat Sulsel yang bertugas mengawal berita NA-ASS di Pilgub, FH. NA-ASS kata FH termasuk paslon yang sama sekali tidak mendapatkan ruang untuk berita pencitraan tentangnya naik di halaman Rakyat Sulsel, selain karena tidak ada kerjasama berupa iklan, NA-ASS bukan sosok orang yang akrab dengan awak media di Rakyat Sulsel, terlpas NA adalah Bupati dua periode di Bantaeng. Berikut penuturan FH :

“Saya pribadi sama sekali tidak pernah bertemu, kadang katika ada penugasan dari kantor untuk mengkonfirmasi pihak NA-ASS saya hanya melakukan wawancara melalui via telepon, jadi sama sekali tidak pernah bertemu langsung.....Kalau soal berita, memang mayoritas berita yang dimuat soal NA-ASS banyakan berita negatif, yah wajar saya bilang karena sejauh ini sepertinya belum ada kontrak dengan perusahaan untuk kerjasama iklan,”tutur FH

FH juga mengaku jarang sekali membuat berita soal NA-ASS jika bukan karena penugasan, adapun rilies yang ia dapatkan dari tim lalu dikirim kembali ke redaktur, juga tidak pernah mendapatkan tempat. Berikut

beberapa contoh berita yang dimuat soal NA-ASS dapat dilihat di lampiran pada gambar 5.8 dan 5.9. Berita seperti pada gambar 5.8 dengan judul “NA Takut Layani Tantangan *Head to Head* IYL” adalah salah satu contoh berita yang melibatkan FH. Kontribusi FH dalam berita ini dikatakannya hanya bertugas mengkonfirmasi pihak dari NA terkait prediksi IYL kalau pertarungan Pilgub Sulsel hanya akan diikuti oleh dua kandidat saja, yakni dirinya dan NA. “Ini firasat saya . Akan terjadi head to head di Pilgub Sulsel, yakni saya dan Nurdin Abdullah,” kata IYL.

Pernyataan itupun digoreng ke dalam sebuah frame seolah NA takut untuk head to head bersama IYL atas jawaban NA yang dikonfirmasi oleh Fahrullah yang mengatakan “Kalau banyak calon, pasti pilihan masyarakat juga banyak,” kata NA. Pernyataan itulah yang ditafsirkan oleh FH sebagai bentuk ketakutan NA melawan IYL di Pilgub Sulsel. Berdasarkan wawancara bersama FH yang bergabung di Rakyat Sulsel sejak tahun 2016 dapat dikutip sebagai berikut :

“Berita itu adalah berita yang digabung dengan berita yang ditulis oleh Iskanto yang bertugas mendampingi IYL, terkait prediksi hanya akan ada dua paslon saja di Pilgub Sulsel. Oleh redaktur itu mungkin menarik, lalu saya diminta untuk mengkonfirmasi pribadi NA dan mendapatkan jawaban seperti itu.....NA memang termasuk paslon yang kurang mendapat tempat di Rakyat Sulsel, selain karena tidak ada kerjasama dengan perusahaan, secara pribadi sebagai wartawan yang bertugas untuk deks NA-ASS tidak terlalu kenal, jadi secara emosional tidak ada beban bagi saya menulis berita itu,” katanya.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh peneliti dan wartawan politik Radar Makassar KS tentang berita soal paslon nomor urut tiga, NA-ASS di Pilgub Sulsel. Akibat ketiadaan kerjasama dengan perusahaan menyebabkan berita seputar pencitraan NA-ASS sangat sulit naik. Sabang hari peneliti menaikkan berita yang dibuat oleh KS tentang dukungan keluarga kerajaan Gowa kepada paslon NA-ASS. Esoknya kami mendapat teguran keras dari pimpinan redaksi. Padahal berdasarkan cerita dari KS, alasan berita itu ia tulis adalah tidak lebih agar pihak tim NA-ASS mau menjalin kerjasama. Berikut penuturannya :

“Sebenarnya pihak NA-ASS bersedia bekerjasama, asalkan kita service dulu beritanya, tetapi bos besar tidak mau kalau nilai kontraknya itu kecil, ditambah lagi NA-ASS tidak bersedia membayar dimuka. Tentu perusahaan berfikir bagaimana jika nanti NA-ASS kalah, siapa yang mau bertanggung jawab jika iklan yang sudah terpasang tidak dibayar.? Saya juga tidak mau mengambil risiko,”papar KS

Maka tidak heranlah jika di harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar berita yang lebih sering muncul soal NA-ASS adalah berita yang sifatnya negatif. Dari analisis pembedahan teks-teks pada koran harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel di atas ditemukan fragmentasi wacana. Terdapat pembelahan berita yang disajikan oleh kedua media, keterbelahan dan pemihakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan media pada salah satu kandidat tertentu yang disalurkan oleh masing-masing aktor di redaksi yang terlibat dalam proses pemberitaan. Penelitian-penelitian

dengan metode analisis wacana yang dilakukan sebelumnya, termasuk di antaranya menggunakan analisis pemingkai, seperti dilakukan Zulhasri Nasir (2011) dan Hamad (2004), tidak bisa menangkap fragmentasi di dalam media. Namun, penelitian ini bisa membuktikan bahwa, di dalam satu media atau dua media yang berbeda bisa terdapat pemingkai yang berbeda pula.

Di sisi lain, temuan adanya fragmentasi wacana ini menunjukkan bahwa kedua media ini tidak memiliki sikap yang tunggal atas satu persoalan. Secara konsisten terlihat bahwa wacana yang mendukung NH-Azis di harian Radar Makassar misalnya banyak ditulis oleh KS sedangkan untuk pemberitaan soal Agus-TBL lebih didominasi oleh CT. Sementara pemberitaan di Raksul yang pro terhadap paslon nomor urut 1 lebih banyak disuplai oleh SM, sedang berita pro terhadap paslon nomor urut dua ditulis oleh AAM, FH lebih banyak mengirim berita soal NA-ASS, sementara khusus paslon nomor urut 4, IYL-Cakka seluruh wartawan di Rakyat Sulsel sudah paham posisi dan kewajiban mereka sebagai "anak buah" kepada seorang majikan.

Berdasarkan keterangan Wakil Pemimpin Redaksi harian Rakyat Sulsel, LK mengaku kalau berita yang dikirimkan oleh empat wartawan deks politik cenderung mengirim berita pro dari masing-masing kandidat yang mereka dampingi. Hanya saja kata dia, berita itu tidak lantas dinaikkan begitu saja,

melainkan terlebih dahulu harus melewati tahap penyaringan oleh penanggung jawab halaman sebelum berita tersebut diputuskan mendapat tempat di rubrik Rakyat Sulsel.

“.....Dari sisi reporter mereka memang lebih dekat dengan narasumber, tentunya dalam hal ini kandidat ,tim dan tokoh -tokoh di lingkaran tim pemenangan kandidat tertentu . Setiap reporter punya karakter dan kandidatnya masing-masing.....mereka punya kedekatan secara emosional. Tetapi ketika ada penugasan dari kantor untuk masing-masing reporter, mereka tetap profesional melakukan tugasnya dengan baik, meskipun ada kedekatan secara emosional,....dan saya bertanggung jawab untuk memantau berita-berita mana yang bisa dan tidak bisa di naikkan, sebelum berita itu dikirim ke percetakan,”ungkap LK

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Pimpinan Redaksi Radar Makassar, AS saat rapat redaksi pada Senin 17 September 2017. Ketika itu ia menyampaikan kepada awak media untuk tetap profesional dalam menjalankan setiap penugasan soal Pilgub Sulsel, meskipun secara emosional wartawan memiliki kedekatan dengan kandidat atau tim yang tergabung di dalamnya.

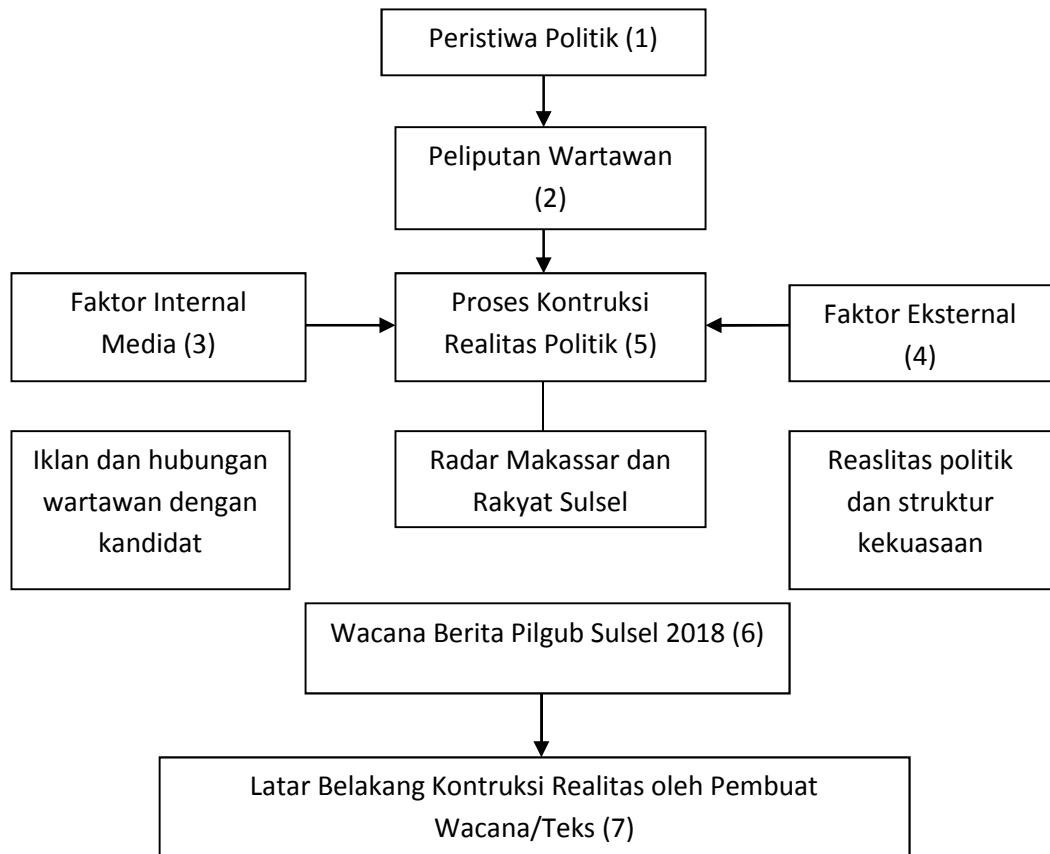
“Teman-teman silahkan dekat dengan siapa pun(Kandidat), tapi harus ingat satu hal penugasan kantor harus tetap menjadi yang utama.....Tidak akan ada berita yang bisa lolos dari pantauan saya, jika berita itu soal pencitraan kandidat yang tidak memberikan sumbangsih untuk perusahaan”kata Awi sapaan akrab Suaib.

Hal ini menunjukkan bahwa wacana di harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar tentang empat kandidat di Pilgub Sulsel dipengaruhi oleh siapa wartawan yang menulisnya dan bagaimana sudut pandanginya. Padahal,

sudut pandang (engle) seorang wartawan biasanya dipengaruhi oleh norma dan nilai yang dipegangnya atau oleh ideologi profesionalnya (Hall,1975; Fowler, 1991). Nilai dan ideologi yang dipegang wartawan ini akan dinegosiasikan dengan budaya tempat mereka bekerja dan juga oleh konteks ekonomi politik. Fragmentasi wacana ini menunjukkan bahwa masing-masing aktor atau wartawan di kedua media ini telah melakukan tafsir yang berbeda terhadap nilai budaya organisasi dan konteks ekonomi politik.

Sebagaimana disebutkan Shoemaker dan Reese (1996), pemingkaian suatu wacana di suatu media telah dimulai sejak dari proses pencarian fakta sosial, penentuan sumber berita, pengumpulan, penyortiran, dan penyeleksian, hingga akhirnya pemuatan berita sebagai realitas simbolik di media. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan dipaparkan kisah di balik keterbelahan berita ,pemuatan maupun tidak dimuatnya berita terkait kandidat Pilgun Sulsel. Dengan memaparkan narasi di balik produksi teks, diharapkan akan diketahui posisi dan relasi para aktor yang mengkonstruksi teks ini, serta situasi institusi tempat subyek membangun diskursus, sehingga pola-pola relasi kuasa dan kontestasinya bisa digambarkan melalui bagan berikut ini :

Proses Produksi Berita di Ruang Redaksi :



Bagan 5.1

Sumber :Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa wacana atau teks berita kampanye mengenai Pilgub Sulsel 2018 terjadi (6) berdasarkan realitas politik dalam peristiwa kampanye (1) yang dilakukan oleh para pasangan calon, diliput oleh wartawan(2) berdasarkan pertimbangan ke "menarik" an berita. Berita yang akan dimuat media mengalami proses kontruksi realitas oleh media(wartawan-redaktur-pemimpin media) (5).

Konstruksi realitas tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa kebijakan bisnis media dan kedekatan hubungan emosional wartawan dengan paslon yang memberi pengaruh pada pemberitaan (3) di samping itu dipengaruhi pula oleh faktor eksternal berupa fakta realitas politik dan struktur kekuasaan (4) yang pada ujungnya akan memunculkan berita dan konstruksi realitas dari pembuat teks berita(7).

a. Aktor di Ruang Redaksi Atas Pebelahan Berita

Pembahasan sebelumnya telah memetakan pola pemberitaan pada kedua media antara harian Raksul dan Radar Makassar terkait pemberitaan kandidat peserta Pilgub Sulsel 2018. Pola ini ternyata tidak hanya terkait sosok wartawan yang menuliskannya, namun ada kuasa yang lebih kuat di meja redaksi. Sehingga meskipun wartawan memiliki jagoan masing-masing di Pilgub dan secara tidak langsung mempengaruhi berita yang mereka tuliskan, namun oleh kuasa aktor di redaksi berita itu juga tidak akan bisa lolos untuk dikonsumsi pembaca. Untuk mengetahui latar belakang kemunculan dan adanya sejumlah berita yang di censure, akan dikisahkan pandangan dari dalam masing-masing aktor ini.

1. Aktor di Ruang Redaksi Harian Rakyat Sulsel

Keredaksian harian Rakyat Sulsel di pimpin oleh MA sejak tahun 2017. MA sendiri mulai bergabung di Rakyat Sulsel pada saat koran ini berdiri

tahun 2012 lalu, namun profesi sebagai seorang jurnalis sudah MA lakoni sejak tahun 2009, mulai dari menjadi jurnalis TV di SCTV, lalu ke koran Ujungpandang Ekspres(Upkes), tidak lama di sana MA hengkang dan bergabung di surat kabar Berita Kota Makassar(BKM) lalu ke harian Cakrawala sebelum akhirnya meniti karir sebagai wartawan di Rakyat Sulsel. Sebagai jurnalis yang sudah lama melintang di media, sudah barang tentu MA kenal dan punya kedekatan dengan paslon di Pilgub, termasuk tokoh-tokoh yang masuk dalam tim pemenangan paslon. Pernah bergabung di salah satu lembaga survei politik, menjadi faktor kuatnya kedekatan Asri dengan para elit partai dan politisi di Sulsel, khususnya terhadap IYL. Seperti yang dijelaskannya sebagai berikut :

"Sebelum di media saya pernah bekerja di lembaga survei selama dua tahun sebagai konsultan politik. Di sana pula saya kenal dengan IYL dan para keluarga-keluarganya,....saya banyak membantu keluarga YL di setiap kontestasi Pilkada Di Sulsel. Sehingga meskipun tanpa bagroun kepemilikan saham dan kerjasama iklan di Rakyat Sulsel, saya memang sudah memiliki kedekatan emosional dengan IYL,"akunya.

Selain punya kedekatan emosional dengan IYL, MA juga mengaku dekat dengan Cagub lainnya, adalah Agus Arifin Nu'mang. MA mengaku kedekatan dirinya dengan Agus berawal sejak masih menjadi wartawan Upeks, kala itu ia di tempatkan sebagai wartawan yang deks di Pemprov Sulsel. Berikut adalah kutipannya :

“Agus dekatnya karena saya pernah posting di Pemprov saat masih jadi wartawan Upeks, kami intens komunikasi. Apalagi beliau dua periode berpasangan dengan pak Syahrul itu juga yang membuat saya dekat. Sementara dengan NH, kenal tetapi tidak dekat mengingat beliau lama di nasional. Sama halnya dengan NA.”

Banyak sedikitnya kata MA, kedekatan emosional itu ikut memberi pengaruh terhadap dirinya dalam merumuskan dan mengontrol setiap sajian berita yang diproduksi di redaksi mengenai Pilgub Sulsel. Misalnya kata dia, ketika wartawan mengirimkan berita yang kurang mengena tentang IYL ataupun Agus, biasanya ia akan bolak-balik mencerna isi berita itu, atau mencari jalan agar judul berita yang ditampilkan tidak terlalu fulgar menyudutkan keduanya. Berbeda ketika berita itu soal NA ataupun NH, kadang tidak terlalu dihiraukan oleh MA. Kedekatan emosional itu menjadi persoalan lain ketika berbicara soal kepentingan ekonomi perusahaan. Seperti yang dijelaskan MA saat wawancara :

“Terlepas dari kedekatan emosional dengan beberapa kandidat seperti IYL dan Agus, saya kira itu bukan faktor utama seandainya IYL bukan pemilik saham di Rakyat Sulsel sekaligus paslon yang menjalin kerjasama di Rakyat Sulsel....Dan memang ada aturan di kantor bahwa siapa pun yang bekerjasama dengan perusahaan wajib kita jaga. Namun tetap kita lihat dari jumlah atau nilai kerjasamanya. Semakin besar nilai kerjasamanya, maka porsi pemberitaan atau service melalui berita juga akan semakin intens. IYL pun sebagai pemilik saham sekaligus salah satu paslon di kontestasi Pilgub Sulsel tidak keberatan jika Rakyat Sulsel memberi ruang kepada paslon yang menjalin kerjasama. Misalnya berita pencitraan pak Nurdin beberapa kali naik tetapi tidak disoal. IYL profesional soal bisnis.” papar MA.

Budaya keredaksian itulah yang menjadi salah satu faktor munculnya berita-berita pembelahan di Rakyat Sulsel terhadap paslon yang telah menjalin kerja sama. Menurut MA hal itu sudah lumrah dan umum terjadi di semua media ,dimana ada berita yang terkesan memihak :

“Saya kira soal adanya berita yang dianggap membela atau berupaya menjawab isi berita yang sebelumnya naik di media lain, itu memang sering terjadi. Dan biasanya itu adalah inisiatif dari teman-teman redaktur saat rapat.

Keredaksian Rakyat Sulsel juga dibantu oleh Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimpred) yang dijabat oleh LK sejak Agustus tahun 2017. Mulai bergabung di Rakyat Sulsel dan menjadi reporter sejak berdiri tahun 2012 lalu, Lukman telah melanglang buana di beberapa tempat postingan, tidak terkecuali deks politik. Itu juga yang membuat LK bisa kenal dan dekat dengan sejumlah elit politik yang sekarang bergabung dalam tim pemenangan dari empat paslon di Pilgub Sulsel. Sebagai Wapimpred, LK bertanggung jawab menyusun perencanaan terkait isu-isu yang sedang hangat untuk disajikan. Tidak saja untuk isu politik, namun semua rubrik di halaman Rakyat Sulsel. Berikut kutipannya :

“Tugas Wapimpred adalah merancang isu-isu pemberitaan yang akan tayang untuk kemudian bisa ditindaklanjuti masing-masing penanggung jawab halaman untuk kemudian di bawah ke rapat redaksi. Saya juga bertugas melakukan pengawasan dan mengavaluasi atau memonitoring semua halaman sebelum masuk ke percetakan. Termasuk saya mengkoordinir semua redaktur-redaktur.

Konten berita yang dikirim oleh wartawan juga menjadi tugas LK sebagai Wapimred untuk memilah berita yang layak dimuat, bahkan tidak jarang ada sejumlah berita yang telah melalui penyaringan oleh Redaktur harus kembali diturunkan oleh LK saat di meja *lay out*, ketika berita itu menciderai atau cenderung tendensius terhadap paslon tertentu.

“Semua berita yang dimuat di Rakyat Sulsel harus melalui klarifikasi. Sebab ada banyak berita yang masuk dari reporter namun tidak semua layak untuk dimuat, seperti berita itu kurang menarik atau misalnya ada berita yang menyerang dan sifatnya tendensius biasanya akan ditunda untuk kemudian dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Selain kurang bermutu, biasanya berita menyerang akan saya pending jika itu menyerang paslon tertentu yang sudah menjalin kerja sama dengan Raksul. Bahkan Paslon yang sudah bekerja sama tentu memiliki space yang lebih banyak ketimbang paslon yang tidak bekerja sama, misalnya intensitas berita bagi paslon yang memiliki hubungan kerja sama beritanya itu bisa dua sampai tiga berita per hari, tergantung nilai kerja sama, sementara paslon yang sama sekali tidak punya kontribusi ke Raksul bisa satu bahkan tidak ada sama sekali tidak kita muat beritanya. Yang ada berita-berita negatif lebih leluasa tayang,”ungkap LK

Kedekatan emosional dengan elit parpol dimanfaatkan LK untuk melakukan loby penawaran iklan. LK mengaku termasuk pihak yang ikut meloloskan sejumlah iklan paslon di Rakyat Sulsel. Kerjasama iklan paslon di Rakyat Sulsel sendiri selain IYL, NH dan NA juga termasuk paslon yang memberi kontribusi ekonomi di koran ini, dengan nilai kerjasama yang berbeda. Secara tidak langsung kedekatan emosional dan kerjasama iklan yang LK loloskan tersebut memberi pengaruh terhadap sikap ketika mengambil keputusan terkait pemberitaan yang tayang di Rakyat Sulsel.

“Minus Agus, semua kandidat menjalin kerjasama dengan Rakyat Sulsel. Kerjasama NH masuk belakangan setelah ada berita terkait pencalonannya yang tidak memenuhi syarat pencalonannya. Apakah berita tendensius itu memberi pengaruh terhadap keputusan paslon untuk beriklan, bisa jadi itu dampak dari pemberitaan itu.”akunya.

Dari kutipan di atas diakui LK bahwa berita yang sifatnya menyerang sisi negatif paslon, kadangkala memberi efek terhadap keputusan paslon untuk menerima penawaran kerja sama iklan dari media. Bahkan tanpa penawaran yang diajukan sebelumnya oleh perusahaan media, sebagai politisi selevel NH sudah peka dan mengerti kalau itu adalah kode “media” agar pihak yang diberitakan itu menginginkan adanya kerjasama. Sebagai orang yang tahu betul bagaimana karakter masing-masing wartawan serta redaktur yang ia komandoi di redaksi, LK mengaku ada beberapa redaktur yang juga memang dekat secara emosional dengan kandidat di Pilgub. Begitu juga dengan empat wartawan politik yang ditugaskan pengawal setiap pemberitaan paslon. Berikut pengakuan LK :

“Dari tiga redaktur memang ada satu yang punya kedekatan emosional dengan kandidat tertentu. Sementara dari sisi reporter mereka tentu yang paling memiliki kedekatan, bahkan bisa dibilang masing-masing reporter memiliki jagoan dan jagoannya itu sudah pasti kandidat yang mereka damping. Karena kedekatan yang telah terbangun itulah hampir tidak pernah ditemukan berita reporter yang bertugas mendampingi paslon terkait sisi negatif kandidat yang dikirim ke redaksi,”paparnya.

Redaktur yang dimaksud LK memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan paslon di Pilgub adalah penanggung jawab halaman satu

di Rakyat Sulsel, DY. DY sendiri bergabung di harian Rakyat Sulsel sejak tahun 2012 dengan status kala itu baru sebagai reporter. Pernah bertugas di Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel penyebab kedekatan dirinya dengan Agus Arifin Nu'mang dan sejumlah elit politik di Sulsel. Sementara kedekatan DY dengan Cagub nomor empat di Pilgub Sulsel, IYL oleh karena latar belakang DY yang pernah tergabung dalam tim media pemenangan Sayang Jilid II, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang di Pilgub Sulsel tahun 2013 lalu. Kedekatan DY dengan SYL dan sejumlah keluarga YL lainnya, menjadi pintu masuk ia juga bisa mengenal dan dekat dengan IYL. Terlepas dari DY memiliki hubungan kerja dengan IYL, mengingat 30 saham yang turut berkontribusi membesarkan harian Rakyat Sulsel dikuasi oleh mantan Bupati Gowa dua periode itu selama enam tahun sejak berdiri tahun 2012. Berikut adalah ulasan wawancara peneliti dengan DY selaku penanggung jawab untuk halaman satu terhitung sejak Agustus 2017 lalu.

“Sebagai penanggung jawab halaman satu, tugas saya tidak hanya melakukan editing berita yang dikirim oleh reporter. Karena saya juga rangkap sebagai redaktur pelaksana (Redpel), maka tugas saya adalah mengkoordinir liputan dan memilih isu yang akan disajikan pada setiap halaman di Raksul, berdasarkan yang kami ramu bersama di redaksi. Dari rapat bersama para redaktur itu pula yang akan menjadi penentuan isu apa yang akan kita tarik untuk disajikan di halaman satu Raksul. Dari hasil rapat perencanaan redaktur, isu itulah yang kami lempar ke reporter sebagai penugasa.....Perdebatan antara redaktur kerap terjadi di rapat saat merumuskan isu, dan tidak jarang perdebatan itu kadang muncul ketika ada isu yang akan kita garap lantas negatif bagi calon yang juga punya kedekatan dengan salah satu redaktur, biasanya pembahasan itu akan panjang dan sengit.....disisi lain hubungan

kerjasama dengan paslon akan menjadi pertimbangan berita itu akan dikompromikan,” papar DY.

Lanjut DY meski beberapa pihak di redaksi memiliki kedekatan dengan paslon, termasuk dirinya, perdebatan itu akan berhenti jika perkara yang akan menjadi sajian berita di Rakyat Sulsel memang rasional dan memenuhi unsur jurnalistik untuk dimuat. Khusus di halaman satu kata DY, isu-isu yang dianggap menarik dan memiliki daya tarik yang tinggi untuk pembaca mencari berita itu akan lebih diprioritaskan, meski subjek yang akan diberitakan menjalin hubungan kerja sama.

“Khusus untuk halaman utama menjadi kewenangan penuh redaksi dan saya sebagai penanggung jawabnya sama sekali tidak mau diinterupsi soal itu. Sebab untuk kerja sama iklan ada tempatnya sendiri, bukan di halaman satu. Paling penting adalah berita itu tidak sampai melukai pihak yang beritakan. Berimbang, adil dan semua pihak telah dikonfirmasi itu yang harus dipenuhi dalam berita. Itulah mengapa kadang kala kita menemukan berita yang menyorot kandidat tertentu di Raksul meskipun sudah bekerja sama.” katanya.

Selain IYL, dan Agus, DY mengaku juga dekat dengan Tanri Balilamo (TBL) wakil dari Cagub Agus di Pilgub. Kedekatan itu bermula saat DY masih menjadi reporter pada majalah mingguan dan posting di Pemprov, lalu TBL menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel peralihan masa pemerintahan Amin Syam ke SYL. Kedekatan emosional itu berlanjut hingga TBL menyelesaikan masa kerjanya di Pemprov Sulsel dan kembali ke Jakarta. Bahkan kata DY jauh sebelum Pilgub Sulsel 2018 ini, TBL ketika berkunjung ke Makassar tidak akan lupa menghubungi dirinya, baik itu

sekedar menanyakan kabar hingga mengajak makan atau ngopi. DY mengaku juga dekat dengan keluarga inti dari TBL, beberapa kali istri TBL mengundang langsung DY untuk makan malam di kediamannya. DY mengaku meskipun dekat dengan tokoh-tokoh politik, namun kedekatan itu tidak pernah ia mamfaatkan untuk menggarap kerja sama berupa iklan, begitu juga iklan yang berkaitan dengan pencalonan Cagub yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Hal itu kata dia dilakukannya untuk tetap bisa profesional menjalankan profesinya sebagai jurnalis, meski dengan sedikit kompromis.

“Kedekatan saya dengan IYL, Agus dan TBL bukan lagi kedekatan antara wartawan dan narasumbernya. Kami sudah menjadi teman diskusi politik hingga diskusi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Di Pilgub hanya NH dan NA yang memang saya sama sakali tidak pernah berkomunikasi langsung dengan mereka.....Terkait dengan pengaruh terhadap pemberitaan, yah memang sedikitnya pasti ada, sebagai sesama manusia apalagi hubungan kami sudah seperti keluarga tentu saya berupaya agar naskah dari berita itu tidak terlalu melukai.....Sehingga kadang jika ketemu beliau kadang mempertanyakan berita itu namun dengan nada yang bercanda....Kalau soal iklan saya tidak pernah mengurusinya, biasanya kalau mereka(Cagub) mau beriklan saya langsung teruskan ke bagian marketing” tuturnya.

DY bukanlah satu-satunya editor untuk rubrik politik di harian Rakyat Sulsel, karena koran ini mengusung segmen politik, maka porsi untuk halaman politik pun lebih banyak di banding surat kabar segmen umum seperti Radar Makassar. Ada empat halaman yang disediakan untuk isu politik di Rakyat Sulsel yakni halaman khusus kontestasi politik di daerah,

Pilgub Sulsel, Pilwali Makassar dan halaman satu yang khusus mengangkat isu terkini seputar kontestasi politik di Sulsel secara umum. Selain DY, penanggung jawab halaman politik lainnya adalah, SY. SY bergabung di harian Rakyat Sulsel pada Januari tahun 2016 lalu. Kala itu SY yang memang sudah punya bekal dan pengalaman sebagai jurnalis membuatnya mendapatkan perlakuan khusus dari redaksi dengan dijadikannya reporter tanpa melalui status magang sebelumnya.

SY termasuk wartawan beruntung di Rakyat Sulsel, tidak lama setelah ia bergabung sebagai reporter, ia sudah diangkat menjadi Asisten Redaktur(Asred) April tahun 2017, lalu menjadi Redaktur dan menangani dua halaman politik satu bulan kemudian, tepatnya Mei pada tahun yang sama. Sebagai redaktur ia bertugas untuk melakukan editing terhadap berita yang dikirimkan oleh reporter, ia juga bertugas mengarahkan wartawan terkait isu-isu yang menarik untuk diberitakan. Berikut ulasannya :

“Jadi di Raksul itu kita rapat redaksi setiap Selasa malam. Di rapat itu semua reporter, redaktur, Redpel, dan Wapimred hadir. Di sanalah dibahas apa-apa saja isu yang sedang hangat dan dibutuhkan oleh pembaca, termasuk isu soal Pilgub di Sulsel semua direncanakan dan dibahas di rapat redaksi.....Walau reporter sudah dibekali oleh redaktornya masing-masing, reporter juga diminta untuk sensitif terhadap isu dan selama ini reporter tanpa diminta oleh redaktur jika ada isu yang lebih menarik di lapangan mereka pasti akan membuat sendiri berita itu.Kalau hubungan dengan para paslon di Pilgub, satu pun saya tidak dekat. Termasuk dengan IYL. Hubungan saya sebatas mereka adalah narasumber. Pernah beberapa kali diajak ngopi,tapi tidak ada hubungan yang spesial setelah itu. “paparnya.

SY juga mengaku kerap menerima permintaan baik dari internal redaksi maupun dari pihak marketing di perusahaan, untuk dimuat berita paslon tertentu di Pilgub, tentunya kandidat tersebut memang sudah menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan. Terkhusus di halaman yang SY ditugaskan untuk berita IYL kata dia, jarang dimuat. Itu karena selain berita IYL lebih banyak di tempatkan di halaman satu, SY juga mengaku lebih banyak memprioritaskan berita-berita yang dianggap menarik bukan berita seremonial yang banyak diperoleh wartawan melalui rilies dari tim media paslon di Pilgub.

Satu redaktur politik lagi adalah, RL. RL tidak jauh berbeda dengan SY yang punya karakter apatis terhadap pergolakan di Pilgub. Secara emosional ,RL juga tidak memiliki kedekatan pribadi dari keempat kandidat di Pilgub Sulsel. Kondisi ini oleh karena RL memang tidak pernah terlibat dan berada di pusaran kepentingan politik Sulsel, mengingat RL tidak pernah merasakan posting di deks politik, atas latar belakang itulah wajar bila RL tidak kenal dengan elit politik . Perjalanan RL di Rakyat Sulsel yang bergabung tahun 2013 lalu dan ditugaskan di Balaikota saat pertama kali menjadi jurnalis, lalu dipindah tugaskan ke kriminal sebelum akhirnya RL diangkat menjadi Asred tahun 2015 dan 2016 RL resmi menjadi Redaktur.

2. Aktor Lain di Redaksi Harian Radar Makassar

Sejak harian Radar Makassar berdiri April tahun 2014 lalu, hingga kini Pimpinan Redaksi(Pimpred)yang dijabat oleh AS tidak pernah direposisi. Sebagai Pimred AS juga masih tetap menjadi penanggung jawab halaman satu hingga edisi 17 Februari tahun 2018. Pada periode tahun 2015, sejumlah awak media di redaksi Radar Makassar diberhentikan secara tidak hormat oleh perusahaan, termasuk di dalamnya adalah Kordinator Liputan (Korlap) yang dijabat oleh AM. Selain korlap, dua Asred dan satu reporter ikut dipecat. Sejak saat ini, keredaksian Radar Makassar berjalan tanpa struktur redaksi yang utuh, layaknya media pada umumnya. Kondisi itu membuat AS berkuasa penuh terhadap keredaksian dan segala pemberitaan yang disajikan oleh Radar Makassar, tanpa pengaruh dari pihak yang lain selain dari pada aktor redaktur dan wartawan.

AS merupakan wartawan harian Ujungpadang Ekspres(Upkes) sejak tahun 2012, dan resinge tahun 2014 menyusul didirikannya Radar Makassar untuk kemudian pindah dan meniti karir kewartawanannya di surat kabar ini. Sebagai Wakil Direktur sekaligus Pimpred, AS bertanggung jawab penuh terhadap segala berita yang disajikan di Radar Makassar. AS akan langsung mengintruksikan kepada redaktur untuk berita itu diturunkan jika menemukan ada berita positif entah itu soal kandidat tertentu di Pilgub maupun berita prodak pada rubrik yang lain, jika tidak memberi kontribusi terhadap

perusahaan. Pernah sewaktu-waktu penelitik dikirim berita soal pencitraan NA oleh wartawan politik, KS, di mana pada saat itu Prof Andalan tagline NA masih menggandeng TBL sebagai wakilnya. Namun karena pasangan ini tidak bekerjasama dengan Radar, oleh AS berita itu diminta diturunkan dan mencari berita lain untuk dimuat di halama politik.

Prinsip AS dalam menjalankan keredaksian Radar Makassar, termasuk syarat berita itu tayang atau tidak hanya ada dua pertimbangan yakni, ketika berita atau pihak yang diberitakan memberi keuntungan bagi perusahaan dan kedua adalah ketika berita tersebut berkaitan soal kepentingan orang banyak. AS juga sering mengingatkan wartawan agar tidak asal meliput di lapangan, harus ada pemberitahuan kepada pihak redaksi ketika ada agenda semisal *press compres* yang dilakukan kandidat dan ingin diliput oleh reporter politik. Sebab AS tidak mau reporter yang meliput sia-sia lantaran pada akhirnya berita yang reporter kirim harus berhenti di tangan redaktur. Berikut adalah kutipan pada suatu kesempatan rapat di redaksi :

“Di Radar Makassar iklan gratis melalui berita haram untuk dinaikkan, kecuali itu berkaitan dengan hajat orang banyak. Radar Makassar tidak boleh menjadi koran murahan, dengan menaikkan berita apa saja tanpa disaring berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kerja sama dengan perusahaan. Sebagai koran dengan pembaca terbesar ketiga di Makassar setelah Fajar dan Tribun, Radar sudah harus punya daya tawar yang tinggi kepada siapa pun pihak yang meminta untuk diberikan. Semiminalnya mereka berlangganan, borong koran atau beriklan. Sebaliknya pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengan Radar wajib kita perjuangkan melalui pemberitaan,”pungkas AS.

AS mengaku tidak memiliki kedekatan khusus dengan salah satu paslon yang berlaga di Pilgub, baik NA, Agus, NA apalagi IYL. Kondisi itu bisa dipahami, mengingat AS adalah wartawan yang banyak bersentuhan dengan isu ekonomi dan bisnis semasa di Upeks lalu, yang memang merupakan koran ekonomi. Bahkan selama di Upeks, AS mengaku tidak pernah ditempatkan di deks politik, hal itu yang membuat jejaring AS antara elite politik di Sulsel sangatlah sempit.

“Kalau hubungan langsung dengan paslon tidak yah, mengingat memang saya tidak pernah wawancara langsung dengan mereka karena jejak kewartawanan saya sebelum akhirnya jadi Pimpred lebih banyak liputan ekonomi dan bisnis. Kalau dengan tim-timnya ada beberapa yang kenal tetapi tidak sampai dekat.”ujarnya .

Merupakan surat kabar yang mengusung segmen umum, Radar Makassar hanya memiliki satu redaktur yang bertanggung jawab pada satu halaman untuk rubrik politik. Itulah yang membedakan harian Rakyat Sulsel sebagai koran politik dengan Radar Makassar. Sehingga berita-berita yang memuat soal isu di Pilgub Sulsel lebih banyak ditampung di halaman satu. Sementara sebagai penanggung jawab halaman politik sejak pertengahan tahun 2017, peneliti tahu betul bagaimana pergolakan di meja redaksi saat merumuskan berita-berita yang akan disajikan. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti di harian Rakyat Sulsel tentang bagaimana proses berita itu diproduksi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di meja

redaksi harian Radar Makassar, sebagaimana yang dihadapi oleh peneliti selama empat tahun di perusahaan ini.

Empat tahun di Radar Makassar, peneliti beberapa kali pindah desk hingga kemudian diangkat sebagai asisten redaktur(Asred) lalu naik pangkat menjadi redaktur. Bergabung di Radar Makassar sejak awal berdiri, saat itu peneliti di tempatkan di kantor Balaikota Makassar, tidak cukup satu tahun di sana peneliti lalu pindah postingan ke kantor DPRD Makassar. Tahun 2016 ditugaskan di kantor DPRD Sulsel, namun tidak cukup tiga bulan peneliti kembali desk di kantor DPRD Makassar hingga diangkat menjadi Asred awal tahun 2017 dan menangani halaman sekolah dan RT/RW Smart. Baru pada pertengahan 2017 seiring ditambahnya rubrikasi untuk halaman politik di Radar, peneliti mendapat tambahan tugas untuk menangani halaman ini.

Menjadi Asred, peneliti tidak lantas bebas dari penugasan-penugasan. Sebagai spesialis halaman satu di Radar sejak periode tahun 2016 hingga diangkat menjadi redaktur tahun 2018, selama itu peneliti masih tetap mengirim berita seputar kejadian di kantor DPRD Makassar dan betugas mengkonfirmasi kandidat-kandidat yang bertarung di Pilgub Sulsel dalam setiap perencanaan berita di halaman satu. Secara emosional, peneliti sebagai penanggung jawab halaman politik yang juga bertugas di pemberitaan halaman satu di Radar untuk empat kandidat di Pilgub, sama sekali tidak memiliki kedekatan bahkan tidak pernah melukan kontak secara

langsung. Peneliti lebih banyak membangun komunikasi melalui telepon, baik dengan empat kandidat maupun dengan tim pemenangan dari keempat kandidat. Sebagai jurnalis yang bergabung di organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, peneliti sangat menjaga betul independensi dan kode etik jurnalistik.

Tidak adanya hubungan emosional yang berarti itulah ditambah peneliti memiliki tanggung jawab menjalankan prinsip organisasi di AJI yang tidak boleh berafiliasi atau pun menjadi pendukung dari kandidat tertentu di Pilkada, menyebabkan peneliti tidak memiliki idola atau jagoan di Pilgub Sulsel. Semata berita mengenai empat kandidat di Pilgub Sulsel baik yang di tempatkan pada halaman satu atau di halaman politik merupakan hasil dari perencanaan di meja redaksi sebagai bentuk profesionalisme peneliti terhadap tugas selaku buruh yang diupah oleh perusahaan.

Mengacu pada konsep Foucault(2002) bahwa kekuasaan itu tidak lekat pada struktur tertentu, namun tersebar dan mewujud dalam setiap relasi sosial, maka kita bisa melihat praktik kuasa di balik kontestasi wacana pada kedua media tersebut dalam Pilgub Sulsel 2018 mulai dari level wartawan, redaktur hingga ke pimpinan di redaksi. Bisa dilihat bahwa munculnya berita-berita di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang cenderung berpihak pada salah satu kandidat di Pilgub Sulsel hingga menyebabkan terjadinya pembelahan berita, tidak bisa dilepaskan dari kedekatan emosional wartawan

hingga dijajaran redaksi terhadap kandidat. Itu diakui oleh sejumlah redaktur dan jajaran pimpinan di redaksi kedua media ini.

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) dari Michel Foucault yang digunakan dalam menganalisa teks media yang terbit di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel terkait empat paslon yang berlaga di Pilgub Sulsel 2018 berhasil membongkar bagaimana cara media mengkontruksi sebuah wacana. Analisis wacana (Eryanto, 2005) menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai praktek sosial. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Kekuasaan (power) merupakan elemen yang dipertimbangkan dalam analisis wacana kritis. Di sini, setiap wacana yang tayang di kedua media ini dalam memberitakan peserta kandidat di Pilgub Sulsel dalam suatu teks, percakapan atau apapun tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar atau pembaca, ia juga bagian dari kategori sosial tertentu, bagian dari

kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu (Eryanto:2005).

Sebagaimana yang digambarkan Foucault, dalam penelitian ini sangat tepat menggambarkan bagaimana kontestasi wacana Pilgub Sulsel tidak bisa dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi wacana merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu (Eryanto, 2005:11).

Dalam analisis wacana pendekatan Foucault, kuasa tidak dimaknai dalam terminologi “kepemilikan”, di mana redaktur dan pimpinan redaksi sebagai raja-jara kecil di kedua media ini bukanlah orang yang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain, seperti itulah yang terjadi dalam proses produksi berita di Radar Makassar dan Rakyat Sulsel. Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar

dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan(Eryanto,2005:65-66).

Mengenai hal itu, Jurgen Habermas memaparkan bahwa beberapa media telah mampu merubah panggung diskusi menjadi sesuatu yang dapat dikonsumsi sekaligus menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan(Habermas,1987). Ruang-ruang sosial hasil garapan media itu memiliki kecenderungan menjadi ruang-ruang konsumsi,baik konsumsi informasi maupun konsumsi wacana bagi publik. Media dan ragam kepentingannya secara langsung atau tidak langsung mampu melubangi ruang-ruang sosial bahkan ruang-ruang privat menjadi seolah-olah publik. Haberman mengistilahkannya dengan privat semu dan *pseudo publik*.

Berikut adalah tabel yang dapat menggambarkan peran para aktor di ruang redaksi yang ikut berkontribusi menentukan arah pemberitaan.

Peran Aktor di Meja Redaksi

Aktor di Ruang Redaksi Rakyat Sulsel			
Inisial	Jabatan/Peran	Keterikatan dengan Paslon	Efek Pemberitaan
MA	Pimpinan redaksi	Memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan IYL-Cakka	Berita yang dibuat cenderung positif dan lebih diprioritaskan
LK	Wakil pimpinan redaksi	Dekat dengan NH-Aziz(pihak yang meloloskan iklan NH-Aziz)	Atas kerjasama itu, dalam rapat redaksi LK cenderung membela NH-Aziz
DY	Kordinator Liputan Bertanggung jawab pada berita yang akan dinaikkan oleh setiap redaktur Bertanggung jawab untuk halaman utama	Dekat dengan IYL-Cakka dan Agus-TBL (Ketiadaan garapan iklan tidak mengingat dirinya dengan kandidat tertentu, meski tetap kompromis karena adanya kedekatan emosional)	Lebih cenderung ke IYL-Cakka mengingat sebagai pemilik modal perusahaan dan memiliki kedekatan emosional
RL	Redaktur Politik Bertanggungjawab untuk halaman politik daerah	-	Secara pribadi mendukung IYL-Cakka
MS	Redaktur Politik Bertanggungjawab untuk halaman politik Pilgub	-	Berita cenderung netral, namun tetap kompromi bila berita tersebut berkenaan dengan pengiklan di

			perusahaan
Aktor di Ruang Redaksi Radar Makassar			
AS	Pimpinan redaksi Penanggungjawab halaman satu	Tidak memiliki hubungan emosional dengan kandidat	Berpihak kepada paslon yang menjadi pengiklan di perusahaan
RA	Asisten Redaktur Penanggung jawab halaman politik	Tidak memiliki hubungan emosional dengan kandidat	Netral, namun tetap mengikut pada hasil perencanaan di redaksi

Tabel 5.2

Sumber : Hasil penelitian

B. Kekuatan Ekonomi di Balik Pemberitaan

Pembahasan di atas menunjukkan adanya praktik swasensor yang dilakukan jajaran redaksi pada kedua media yang menjadi objek dalam penelitian ini. Di balik kontestasi wacana pro dan kontra terhadap kandidat tertentu di Pilgub Sulsel, sensor ini awalnya bersifat individu di ruang redaksi, namun kemudian didukung oleh para jajaran pemimpin koran ini. Sesuai konsep Shoemaker dan Reese (2014) dalam model yang disebutnya sebagai *Hierarchical Influence Model*, bias dalam praktik pemberitaan di suatu media yang dipengaruhi kepentingan personal dari individu wartawan, harus juga dilihat kaitannya dengan budaya organisasi di dalam media itu sendiri dan *setting* sosial dan ekonomi di belakangnya.

Dari aspek budaya organisasi, terlihat bahwa praktik swasensor ini telah menjadi habitus pada kedua media ini sejak lama. Sedangkan dengan melihat relasi bisnis antara masing-masing media dengan para kandidat di Pilgub Sulsel, kita bisa mengetahui bahwa upaya swasensor terhadap berita-berita pembelaan terhadap paslon tertentu atau pun berita yang cenderung negatif pada rival kandidat yang menjalin kerja sama ternyata juga memiliki dimensi ekonomi politik yang kuat.

Bagi Radar Makassar dan Rakyat Sulsel, iklan merupakan bagian vital dalam menjalankan roda perusahaan karena merupakan bagian utama dari pendapatan. Harga jual koran tidak cukup untuk menutupi untuk biaya produksi. Sekalipun demikian, kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu saja bahwa dengan adanya fakta pemberitaan yang cenderung memihak pada salah satu kandidat yang memasang iklan dan menjadi sponsor kegiatan di kedua media ini, maka hal itu akan mempengaruhi pemberitaan di koran ini. Seperti pemaparan dari Direktur Utama Koran Harian Rakyat Sulsel, FP berikut ini :

“ Pada perhelatan Pilkada omset Rakyat Sulsel selalu mengalami pertumbuhan, meski tidak signifikan. Apalagi kampanye paslon berupa iklan di media telah dibatasi oleh KPU, sejak setelah penetapan kandidat....Apalagi ada beberapa petahana yang menggelar pilkada di daerah kembali maju, hal ini membuat iklan di pemerintahan yang kepala daerahnya ikut pilkada mengalami penurunan, seperti Makassar, Pare-pare dan Palopo, sehingga meskipun terjadi kenaikan iklan pada momen pilkada jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya dikisaran 20-25 persen tergantung dari seberapa seru kompetisi dalam pilkada....Kalau di Pilgub sendiri dari empat kandidat yang bertarung baru IYL, NH dan NA yang

menjalin kerja sama.... Saya sendiri selaku pimpinan perusahaan sama sekali tidak pernah mencampuri redaksi, tugas saya semata hanya mengarahkan redaksi dan fokus pada pengembangan perusahaan. Saya berpesan kepada redaksi agar memberi ruang kepada semua kandidat, meskipun salah satu pemilik saham di perusahaan adalah merupakan kandidat yang bertarung di Pilgub. "papar FP.

Bahkan kata FP, meski IYL adalah komisaris di Rakyat Sulsel, namun dalam kerjasama iklan untuk kampanye terkait pencalonannya di Pilgub Sulsel tetap harus melalui pembayaran sebagaimana mekanisme pada umumnya di perusahaan. Terkait dengan kerjasama paslon di Rakyat Sulsel, FP mengatakan itu tugas dari redaksi dan pihak manajemen iklan untuk berkordinasi, bagaimana nilai kerja sama dan berapa rasional berita seputar pencitraan kandidat harus tayang dalam sehari, termasuk di halaman mana iklan paslon itu ditempatkan.

"Saya serahkan ke tim yang ada di redaksi untuk berkoordinasi dengan pihak marketing, jadi biasanya setelah ada kesepakatan terkait kerja sama kandidat, pihak marketing menginformasikan langsung kepada pihak redaksi untuk menjaga serta melakukan service berita terhadap paslon yang telah memberi manfaat untuk perusahaan.....Bagi saya meski kandidat memasang iklan di Raksul, cukup timbal baliknya dengan menaikkan berita-berita rilies soal mereka. Jika ada sesuatu hal yang perlu untuk diberitakan meski itu pahit redaksi harus memberitakan," jelasnya.

Hal itu diakui oleh Manajer Iklan harian Rakyat Sulsel, RRS yang bergabung di Rakyat Sulsel pada tahun 2016, dipercayakan menduduki manajer marketing di awal tahun 2017. Dari hasil wawancara peneliti

dengannya, RRS membenarkan adanya peningkatan pendapatan di sektor pemasangan iklan sejak pertengahan tahun 2017, di mana masa sosialisasi dan kampanye sejumlah figur yang melirik kursi gubernur. Berikut adalah ulasannya :

“Kalau dari empat paslon, kandidat dengan nilai kerja sama paling tinggi di Pilgub Sulsel yakni IYL sebesar 50 persen, NH 30 persen, sementara Agus dan NA masing-masing hanya 10 persen, itu pun Agus baru beriklan belakangan setelah pendaftaran calon di KPU Sulsel. Sementara IYL dan NH memang sudah beriklan jauh sebelum masa pendaftaran....Iklan dari para Cagub ini selain digarap oleh bagian marketing juga tidak terlepas dari bantuan pihak redaksi....Nilai iklan untuk paslon mulai Rp15 juta sampai Rp20 juta per satu halaman untuk sekali terbit. Biasanya paslon akan memilih iklan paket sebab lebih murah yakni sebesar Rp30 juta sampai Rp40 juta per bulan.....Tentu paslon yang menjalin kerja sama dengan Raksul tidak cuma-cuma, ada service berita yang perusahaan juga berikan....Nilai iklan itu akan ditukar dengan iklan banner yang tayang setiap hari, plus berita soal pencitraan kandidat di media online Raksul maupun dicetak.”papar Rasmi.

Lebih jauh RRS mengungkapkan bahwa kerja sama berupa iklan dengan para cagub di Pilgub Sulsel tidak terlepas dari peran redaksi yang turut andil dalam meloloskan penawaran yang dimasukkan oleh manajemen marketing kepada setiap kandidat.

“Tidak jarang marketing bahkan harus ditolak dulu proposal penawaran yang kami masukkan, barulah kemudian pihak redaksi yang memang memiliki kedekatan dengan kandidat atau tim membantu kami melakukan pendekatan..... Begitu juga dengan service berita nantinya, berkoordinasi dengan pihak redaksi terus kita bangun. Interpensi kepada pihak redaksi itu pasti ada untuk mengontrol berita-berita negatif paslon yang telah menjalin kerja sama dengan perusahaan, dan saya kira semua media pun begitu pada umumnya....Misalnya ketika ada kegiatan kampanye paslon, kami minta salah satu wartawan politik di redaksi untuk meliput, atau biasa kami hanya menerima rilies dari tim media paslon

kemudian kami minta kepada pihak redaksi untuk dimuat,"paparnya.

Kondisi yang terjadi di harian Rakyat Sulsel tidak jauh berbeda dengan harian Radar Makassar, terkait kekuatan ekonomi yang mempengaruhi setiap pemberitaan mengenai cagub di Pilgub Sulsel. Berikut adalah ulasan Direktur Umum Radar Makassar, SP :

“ Momentum Pilkada termasuk juga Pilgub membawa keberkahan tersendiri untuk media menambah pendapatan. Walau peningkatannya tidak terlalu signifikan, oleh sebab paslon diikat oleh aturan KPU untuk tidak melakukan sosialisasi secara fulgar di media. Kalau dianalisis secara keseluruhan kontribusi Pilgub hanya dikisaran 20 persen. Ditambah lagi tidak semua cagub bekerjasama dengan kami.....Dari empat paslon yang tercatat uangnya pernah masuk di Radar hanya dua yakni, Agus Arifin Nu'mang dan Nurdin Halid (NH). Itu pun NH belakangan setelah penetapan calon kerjasama itu berakhir dan tidak lagi diteruskan.....Sebagai direktur, saya sama sekali tiak pernah menginterpersi pemberitaan di Radar. Mengacu pada sistem dan mekanisme di media, sebagai pimpinan posisi saya sebatas pada tataran kebijakan soal berita menjadi kewenangan penuh oleh redaksi apa-apa saja sajian yang ingin disuguhkan kepada pembaca.....Saya sendiri juga tidak memiliki hubungan emosional dengan ke empat Cagub begitu juga dengan tim media

Padahal jika melihat dari rekam jejak SP di media, 12 tahun lebih bukan waktu yang singkat untuk dapat kenal dan menjalin hubungan dekat dengan para kandidat di Pilgub Sulsel. Sebelum bergabung di harian Radar Makassar tahun 2014, SP merupakan jurnalis di harian Upeks sejak tahun 2002. Ia meninggalkan jabatan terakhirnya sebagai Pimpred di koran yang masih anak perusahaan dari Fajar Group itu untuk kemudian bergabung di Radar atas ajakan langsung dari pribadi SAH. Merasa memiliki komitmen

yang sama, menjadi dasar kuat dirinya menerima tawaran itu untuk menjadi bagian dari sejarah didirikannya Radar Makassar. SP mengaku Radar Makassar, sebagai media mainstrim yang memiliki motif bisnis ,dan hanya bisa hidup dari iklan tidak menampik adanya pemberitaan terkait paslon di Pilgub Sulsel yang cenderung memihak kepada salah satu kandidat dalam hal pemberitaan. Berikut ulasannya :

“Media ini kan bisnis tentu dalam bisnis pihak yang memberikan keuntungan untuk perusahaan tentu menginginkan asas mamfaat yang sama, caranya kalau di media adalah service melalui pemberitaan. Meski begitu berita-berita yang disuguhkan tentu tidak mengesampingkan nilai-nilai jurnalistik yakni memberikan informasi yang berimbang kepada pembaca....Saya sendiri dengan ke empat paslon tidak begitu dekat, kenalnya biasa-biasa saja begitu juga dengan para tim mereka....Secara langsung mereka juga pernah meminta kepada saya jika ada berita positif dari mereka untuk dinaikkan begitu juga kalau ada berita negatif mereka juga tidak pernah menahan-nahan itu, biasanya permintaan itu langsung kepada redaksi dan semacam itu memang biasa ada.”

Informasi menarik dari penelitian ini adalah tentang pemberitaan IYL-Cakka yang dimuat di media Radar Makassar sama sekali tidak pernah ada yang positif baik itu seputar pencitraan selama pencalonannya di Pilgub Sulsel, yang ada hanya berita negatif perihal politik dinasti, atau pun isu-isu lainnya. Selain memang karena ada sejarah yang melingkupinya antara owner Radar Makassar yang juga menjadi pemegang saham di Rakyat Sulsel seperti yang dipaparkan di atas, IYL-Cakka diketahui sama sekali tidak pernah memberikan kontribusinya kepada Radar Makassar

dalam bentuk kerjasama berupa iklan. Informasi tersebut diperoleh dari Manajer Marketing Radar Makassar, EM. Berikut pemaparannya :

“Dari empat paslon kami memang tidak pernah menggarap kerjasama dengan IYL, sebab saya dapat informasi kalau kita agak berseberangan dengan Ichsan, saya juga berkoordinasi dengan Pimpred di redaksi jawabannya juga seperti itu kalau dia mendapat petunjuk dari pemilik perusahaan ini untuk tidak dibolehkan sama sekali menggarap itu. Selain itu kami juga melihat trake record dari paslon, ada pengalaman beberapa teman yang menggarap iklan IYL pernah tidak dinayar, dan saya sendiri pernah mengalami itu saat masih di Upeks lalu....Radar Makassar khusus kerjasama kandidat di Pilkada termasuk cagub di Pilgub Sulsel kami agak memperketat sistem pengiklanan yakni pengiklan harus bayar dimuka, sebab dari pengalaman tidak dibayar itulah yang kita khawatirkan. Selain karena frekuensi iklan Pilkada yang panjang waktunya, nilainya yang juga besar membuat kami di marketing berfikir lagi mau meloby, sebab tidak ada yang menjamin dan yang bertanggung jawab tentu adalah yang memasang.”pungkas EM

EM yang bergabung di Radar Makassar 1 Oktober 2016, setelah hampir 10 tahun di Upeks itu mengaku tidak tercatatnya IYL sebagai pengiklan di Radar bisa menjadi alasan mengapa berita-berita terkait adik Syahrul Yasin Limpo itu tidak ada yang positif. Begitu halnya dengan paslon nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman(NA-ASS), yang berbeda adalah NA-ASS oleh pihak marketing Radar bukannya tidak pernah memasukkan penawaran, hanya saja NA-ASS tidak sanggup membayar di muka sebagaimana mekanisme kerjasama pemasangan iklan untuk seluruh kandidat yang bertarung di Pilkada Sulsel. Berbeda dengan pasangan Agus Arifin Nu'mang-Tanri Balilamo(Agus-TBL), paslon pemilik nomor urut dua ini

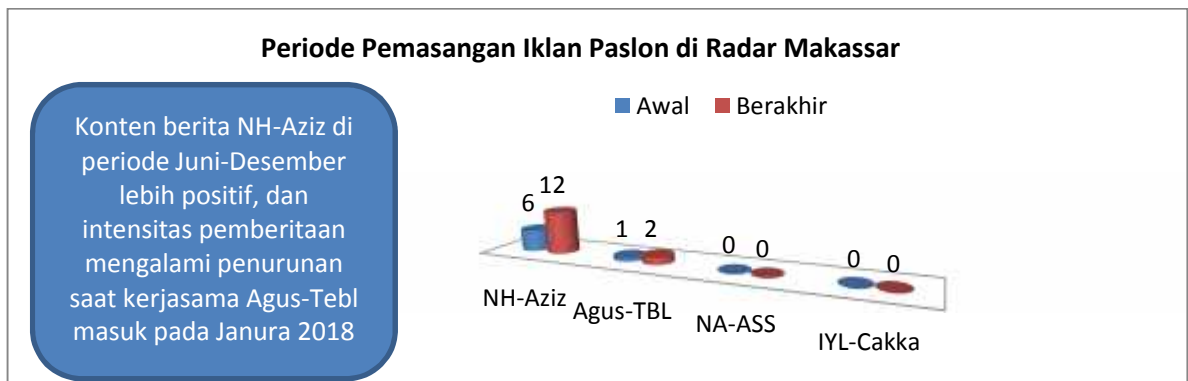
mendapat perlakuan berbeda jika dibanding dengan dua rivalnya di Radar Makassar. Dari pengakuan EM, kerjasama Agus-TBL yang masuk terhitung sejak Oktober 2017, sebenarnya tidak juga dibayar dimuka, hanya saja karena ia memberikan jaminan kepada pihak perusahaan untuk berani mengganti jika belakangan Agus-TBL lari dari kewajibannya membayar iklan yang sudah dipasang.

“Sebenarnya jika saya tidak memiliki hubungan dekat dengan beliau, tentu saya tidak seberani itu menjamin.... Di marketing yang dibutuhkan tidak saja bagaimana kemampuan kita melakukan loby, namun dibutuhkan kedekatan emosional dengan paslon atau timnya, bagi si pengiklan itu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Itulah mengapa pihak redaksi banyak meloloskan iklan baik itu iklan yang sifatnya umum maupun iklan paslon di Pilgub Sulsel, sebab mereka dekat dengan narasumber.”cerita EM

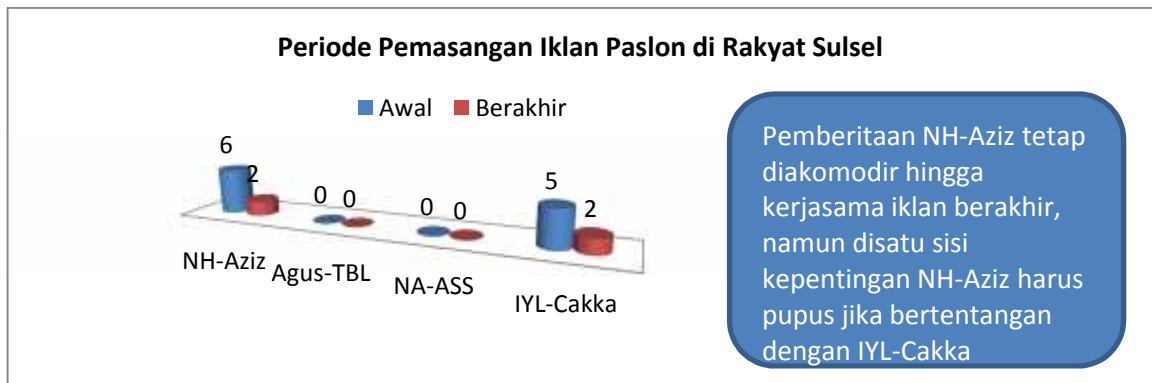
Alur pemberitaan mengenai paslon di Pilgub Sulsel pada harian Radar Makassar seperti yang telah diulas pada laman sebelumnya, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kepentingan ekonomi perusahaan yang dititipkan melalui iklan dari para kandidat. Massifnya pemberitaan mengenai NH-Aziz pada periode Agustus hingga Desember 2017 misalnya, lalu kemudian tenggelam dan berita soal NH-Aziz sama sekali tidak pernah lagi muncul. Sementara pada periode yang sama, dukungan Radar Makassar justru beralih ke paslon lain yakni Agus-TBL. Untuk mengetahui latar belakang dari pemihakan berita dari sebelumnya ke NH-Aziz lalu ke Agus-TBL berikut penuturan dari EM :

“Iklan NH itu masuk sejak pertengahan 2017 hingga akhir Desember, setelah masa kontrak habis kita berupaya untuk menawarkan lagi namun tidak ketemu soal harganya...Sementara Agus memang beriklan baru belakangan, mulai saat wacana berpaket dengan ibu Aliyah kemudian berlanjut setelah paten berpasangan dengan Tanri Balilamo hingga saat ini, namun setelah penetapan calon kerjasamanya bukan lagi dalam bentuk fisik iklan tetapi lebih pada sosialisasi kegiatannya.....Tentu ada service yang perusahaan berikan bagi kandidat yang menjalin kerjasama, yakni mereka wajib untuk kita muat dan menjaga nama baik pengiklan dalam artian menjaga berita yang sifanya tendensius dan redaksi pun paham soal itu. Di media tidak ada pelayanan lain selain menaikkan berita pencitraan dari paslon, dan redaksi tanpa diberitahu, ketika iklan itu sudah terpasang di koran akan konek sendiri mereka harus bagaimana.

Berdasarkan penjelasan hasil dari penelitian di atas, dapat digambarkan siklus pemasangan iklan yang berpengaruh pada frekuensi pemberitaan empat pasangan calon di Radar Makassar dan Rakyat Sulsel sejak Agustus 2017 (biru) hingga penetapan calon oleh KPU Sulsel pada Februari 2018(merah).



Bagan 5.2



Bagan 5.3

Nafsu media lokal seperti Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang telah melibatkan diri dalam persoalan politik demi menjaga dan memperkuat kepentingan ekonomi medianya, secara perlahan namun pasti mulai meluas dan massif. Media massa secara signifikan, mulai dari sisi jurnalistik dan jurnalismenya, sampai model pendekatan kepentingan politik dan ekonomi yang digunakan dalam menjaring calon pengiklan dengan modal besar, seperti dalam momen atau event pelgub Sulsel bertajuk Pilkada. Dugaan keberpihakan media dalam Pilgub Sulsel, serta hubungan kepemilikan media dengan berbagai hal yang terkait dengan Pilgub Sulsel, telah menjadikan media massa menjadi instrumen politik, melalui kegiatan jurnalisme politiknya, yang sangat menentukan arah kepentingan dan keberpihakan politik dalam Pilgub Sulsel.

Pada pembahasan sebelumnya telah diperlihatkan bahwa harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar mengkotruksikan secara berbeda-beda setiap paslon peserta Pilgub Sulsel 2018 dalam beritanya. Perlakuan yang

berbeda itu tidak lain karena kedua media ini memiliki pertimbangan sendiri dalam mengkonstruksi wacana yang disuguhkan kepada pembaca. Faktor kapital menjadi unsur yang esensial dalam sistem libertarian, hingga menciptakan fenomena konglomerasi media (*Media Monopoly*) proses konstruksi realitas pun diselaraskan dengan pertimbangan modal, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha yang ada di bawah konglomerasi tersebut. Konstruksi realitas lazimnya dilakukan sedemikian rupa bilamana menyangkut kasus yang akan merugikan usaha atau relasi mereka. (Hamad. 2004).

Wujud lain dari faktor ekonomi, sebagai kekuatan eksternal lain yang berpengaruh atas penampilan isi media adalah khalayak dan pengiklan. Pelaporan sebuah peristiwa, tidak terkecuali peristiwa politik, jelas harus memperhitungkan pasar. Semakin baik kualitas pelaporan (reportase), akan semakin banyak yang mengkonsumsi dan ini secara otomatis pengiklan pun cenderung akan bertambah. Hal ini ikut dipraktikkan oleh Raksul dan Radar Makassar. Sebagaimana yang dijelaskan Keller (2009) di media divisi iklan dan redaksi ditempatkan di bangunan yang berbeda, terpisah dan tidak pernah ketemu, demikian juga pimpinan redaksi. Keller juga menyebutkan bahwa wartawan-wartawan dilarang keras untuk melibatkan diri dalam pembuatan iklan. Namun demikian, situasi yang diamati Keller sudah berubah saat ini.

Memang benar, hingga saat ini divisi iklan dan redaksi masih ditempatkan dibangunan yang berbeda. Namun yang memisahkan iklan dan awak redaksi semakin padam. Seperti pengakuan wartawan dan bagian marketing yang telah dijelaskan di atas, menandakan bahwa redaksi bisa diatur oleh iklan. James Curran dalam Fuchs (2015), mengklasifikasikan kekuasaan media menjadi tiga kekuatan yakni kekuatan ekonomi, kekuasaan politik dalam media, dan kekuatan media dalam budaya. Curran menekankan bahwa kekuatan media tidak hanya simbolik, tetapi multidimensi. Kekuatan kuasa ekonomi media kata Curran tercermin dari konsentrasi perusahaan di sektor pengiklanan demi memaksimalkan pendapatan. Tingginya biaya operasional media cetak, distribusi langganan koran tidak mampu menutupinya.

Poin terpenting adalah wacana apapun di media pada dasarnya merupakan suatu konstruksi yang bersifat ideologis. Kenyataannya memang memuat sejumlah kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pengusaha media cetak dan praktisi pers. Teks-teks yang beredar di ruang public merefleksikan adanya formasi-formasi diskursif. Konteks dari perbincangan itu ada di dalam ruang public media massa. Media massa tiada lain pasar komoditi yang memperdagangkan teks-teks sejajar dengan iklan-iklan produk komersial. Cara kerja media massa terletak pada soal komoditi, perdagangan dan untung rugi.

Dalam penelitian ini, analisis Noam Chomsky yang khawatir pada gerak masyarakat kapitalis liberal, yang mulai “kong-kalingkong” dengan model propaganda baru tepat menggambarkan kondisi kedua media harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel. Gejalanya terlihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya senjata dan uang. Para elit kekuasaan dan elit bisnis berkaleborasi mengatur isi media. Akibatnya, menurut Chomsky kebebasan pers yang dijiwai demokrasi dan liberalisme, telah disusupi corong-corong propaganda segelintir orang. Setiap keping informasi telah disusupi kepentingan tertentu. Setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis. (Subiakto dan Ida. 2014).

Chomsky menganalisa adanya konspirasi para elite yang melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Dengan menggunakan istilah “manufacturing consent”, tokoh kritis ini melihat media menjadi alat kepentingan politik, ekonomi, militer, dan kultur kalangan eksklusif. Menurutnya, para *gatekeeper* media menjadi pion politisi dan industriawan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, atas nama kepentingan bangsa, para pejabat mengatur pemberitaan sesuai keinginan mereka. Adapun atas nama pertumbuhan ekonomi, para pebisnis atau pedagang melakukan hal yang sama. Inilah yang disebut sebagai kekuatan ekonomi politik dalam pemberitaan di media. Pendekatan ekonomi-politik media biasanya memusatkan perhatian pada bagaimana situasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi arah perkembangan industri media, ideologi media,

serta pemberitaannya. Situasi ekonomi ini meliputi kepemilikan dan komersialisasi media, sedangkan kondisi politik bisa berupa mekanisme perundangan dan kebijakan pemerintah.

C. Strategi Tim Kerja Pemanangan Kandidat

Media memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengkampanyekan pesan-pesan politik dari empat pasangan calon yang berlaga di kontestasi Pilgub 2018 kepada masyarakat Sulsel. Kemampuan media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki kekuatan mengkampanyekan kandidat, menyebabkan media tidak saja menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi sentral dalam menentukan arah politik. Guna memenangkan kompetisi, empat kontestan Pilgub Sulsel masih mempercayai media massa sebagai strategi dan saluran yang paling efektif dalam memsosialisasikan pencalonan maupun visi misi mereka.

1. Tim Paslon NH-Aziz

Pengaruh politik terhadap kehidupan pers akan terlihat pada dimensi hubungan pers dengan partai politik atau empat pasangan calon yang berlaga di Pilgub Sulsel. Dalam upaya memperoleh kekuasaan, tim dari masing-masing kandidat di Pilkada akan berusaha memperoleh dukungan yang seluas-luasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara , termasuk menggunakan surat kabar. Dari sinilah muncul pola hubungan antara pers dengan partai atau paslon.

Tim Media pasangan NA-Aziz, YS mengaku peran media sangat penting dalam proses kampanye kandidat di Pilgub Sulsel. Tanpa media sangat sulit mendorong popularitas pasangan calon yang diusung oleh empat partai itu di Pilgub Sulsel. Media diyakini menjadi wadah yang sangat efektif dalam melakukan sosialisasi kandidat. Berikut pemaparannya :

“Kita tidak bisa menafikkan bahwa media punya kontribusi yang sangat besar selama proses kampanye dan sosialisasi kandidat. Berdasarkan survey internal yang kita lakukan dan merujuk pada hasil survey sejumlah lembaga memperlihatkan tren yang positif terhadap tingkat popularitas dan penerimaan masyarakat terhadap NH-Aziz. Faktornya tidak lain adalah pengaruh media yang selama ini memberitakan, sehingga publik menyambutnya dengan baik....NH adalah kandidat yang paling pertama mendeglarasikan diri terkait keinginannya maju di Pilgub Sulsel, sehingga memang paket ini bisa dibilang paling siap dan paling sering dipublikasikan oleh media terkait pencalonannya.

Sebagai tim media, YS mengaku tahu betul bagaimana membangun hubungan yang baik dengan media, agar pemberitaan tetap bisa diakomodir. Sebab YS menyadari bahwa media untuk tetap bisa kokoh berdiri, pendapatan utamanya yang berasal dari iklan harus tetap lancar. Sehingga menurutnya agar berita-berita seputar pencalonan jagoannya, NH-Aziz tetap bisa diakomodir oleh media, salah satu caranya adalah dengan membangun kerjasama profesional berupa pemasangan iklan. Tidak hanya itu, YS yang sejak awal mengawal pencalonan NH-Aziz bukan saja mengikat perusahaan melalui iklan. Ia membenarkan pengakuan sejumlah wartawan politik yang turut memberikan informasi dalam penelitian ini bahwa, selain

perusahaan ia juga sebisa mungkin memberikan perlakuan yang baik pada wak media.

Sebab, tanpa mereka kata dia popularitas NH-Aziz yang diklaim meningkat itu tidak akan setinggi mengalahi tiga rivalnya yang lain. Berikut kutipannya :

“Jadi bukan ini menyogok wartawan, meskipun kami memberikan pelayanan yang baik kepada wartawan disetiap meliput NH-Aziz, namun kami juga tim media tidak pernah menginterpendensi terlalu jauh apa dan bagaimana seharusnya wartawan menuliskan beritanya tentang calon kami.”katanya.

Lebih lanjut YS menerangkan bahwa tim media NH-Aziz berupaya semaksimal mungkin menjangkau semua media lokal di Makassar, untuk bekerjasama. Sebab pihak NH-Aziz kata dia tidak ingin jika terjadi kecemburuan antara media. Beberapa media lokal yang bekerjasama dengan pihaknya adalah Tribun Timur, Fajar, Rakyat Sulsel, Radar Makassar dan beberapa koran anak perusahaan dari Fajar group. Pertimbangan memilih media tersebut menjalin kerjasama adalah jumlah pembaca, segmentasi surat kabar, dan service pemberitaan yang media tersebut berikan. Selain media cetak, tim media NH-Aziz juga bekerjasama dengan sejumlah media online di Makassar.

2. Tim Paslon Agus-TBL

Juru Bicara pasangan Agus-TBL, RS menerangkan soal peran media massa ikut andil meningkatkan popularitas dan elektabilitas jagoannya itu. Berikut pamarannya :

“Start awal kami di tim Agus-TBL efektif berkomunikasi dengan media pada tanggal 10 Februari, setelah resmi mendaftarkan diri di KPU sebagai peserta di Pilgub. Kami memilih media cetak dan beberapa media online sebagai media parner, untuk di cetak kami bekerjasama dengan tiga surat kabar yakni, Tribun Timur, harian Amanah, dan Radar Makassar. Kami memandang dalam siklus politik posisi media sebagai saluran informasi sangat penting bagi kepentingan kampanye dan sosialisasi terkait pencalonan dan menyampaikan visi misi kandidat kepada publik.....Pemilihan tiga media cetak mengacu pada oplah surat kabar yang dicetak setiap harinya, kemudian segmentasi pembaca. Misalnya kenapa kami pilih Tribun karena merupakan surat kabar dengan oplah terbanyak di Sulsel, kemudian kami pilih Radar Makassar karena pembacayanya mencakup dari kalangan menengah ke bawah, khusus di Makassar kami tahu bahwa semua RT/RW berlangganan Radar Makassar.....Bentuk kerjasama dengan ketiga media tersebut dalam bentuk perjanjian secara profesional yakni pemasangan iklan banner sebagai strategi kampanye kami melalui media,”Papar Rizal yang juga Ketua Badan Pemilihan Umum(Bapilu) DPD PPP Sulsel.

Kata RS pemasangan iklan paket Agus bersama TBL baru efektif pada 10 Februari setelah pasang ini resmi dikawinkan kemudian didaftarkan oleh tim sebagai peserta bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di KPU Sulsel. Pemasangan iklan berlangsung hingga 15 Februari setelah empat pasang cagub dan cawagub resmi diumumkan oleh KPU sebagai peserta . Meski sosialisasi kepada publik terkait pencalonan Agus-TBL terbilang singkat di media, jika dibandingkan dengan Nurdin Halid yang mulai berkampanye di media cetak sejak awal tahun 2017, namun kata Rizal kerjasama tersebut sudah sangat efektif mendongkrak popularitan dan elektabilitas Agus-TBL. Berikut uraian RS :

“Pak Agus ini kan Cagub yang berulang kali melakukan bongkar pasang pendamping di Pilgub, mulai dari Aliyah Mustika

Ilham, kemudian sempat dipasangkan dengan Lutfi A Muthi dan akhirnya memilih Tanri Balilamo. Saat paket Agus-TBL yang diusung oleh tiga partai yakni Gerindra, PPP dan PBB sosialisasi melalui media baru betul-betul efektif. Hanya dalam kurung waktu dua minggu, popularitas Agus-TBL berada di urutan kedua dengan presentase 72 persen berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Populi. Tolak ukur itulah yang kami jadikan acuan bahwa media berkontribusi besar bagaimana memenangkan kandidat melalui kampanye di media....Kami di tim juga menyiapkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kampanye di media sosial, di luar dari kerjasama iklan. Misalnya ketika ada keputusan penting tim atau partai pengusung lalu kami ingin menggelar press compres, tentukan butuh anggaran untuk makan minum serta akomodasi melakukan itu.”jelasnya.

Selaku politisi dengan posisi sebagai Ketua Badan Pemilihan Umum(Bapilu) DPD PPP Sulsel, RS mengaku di tim pemenangan Agus-TBL sendiri ada devisi media yang berfungsi untuk membuatkan rilies seputar kampanye dan visi misi kandidatnya, kemudian rilies itu dilempar kepada wartawan politik atau media yang memang telah menjalin kerjasama untuk dinaikkan. Tujuannya kata RS agar wartawan tidak memberi penafsiran lain di dalam berita. Berikut ulasannya :

“Supaya si pewarta tidak menerjemahkan lain apa yang kita sampaikan, kami di tim membuat rilies dan foto sendiri kemudian mendistribusikannya kepada wartawan, bukan saja wartawan yang medianya menjadi perusahaan yang kami bekerjasama. Rilies yang kami buat tidak menjadi kewajiban media parner yang menerbitkannya, sebab itu menjadi otoritas dari manajemen redaksi. Namun pada umumnya media memiliki kesadaran sendiri memberikan perlakuan istimewa untuk parner mereka. Sebaliknya, kandidat yang tidak bekerjasama tentu menjadi salah satu menentukan bagaimana arah pemberitaan itu dibuat, itu saya alami di Raksul. Raksul memang kami tidak bekerjasama, sebab oplahnya yang sedikit dan tidak mencakup pembaca hingga kalangan masyarakat menengah ke bawah. Saya tidak tahu apakah karena pengaruh kami tidak beriklan, sehingga berita

khusus Agus-TBL pernah beberapa kali tendensius. Seperti berita yang ditulis dengan judul “Agus Jelmaan Sahabat Nabi”, saya lupa persisnya itu terbit tanggal berapa, namun berita itu sudah salah mempresepsikan apa yang saya sampaikan saat press compres. Jadi pada saat itu saya mengatakan Agus ini merupakan menyerupai karakter Asyidik sahabat nabi. Maknanya sangat jauh berbeda. Selain itu berita yang kemudian disajikan di kedua media ini juga tergantung dari narasumbernya, kadang memang si pewarna mencari narasumber yang memang pro atau kontra terhadap kandidat sehingga menghasilkan berita positif atau negatif.

3. Tim Paslon NA-ASS

Sama halnya pasangan calon nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pllgub Sulsel, juga memiliki media parner yang turut membantu kandidat ini mensosialisasikan pencalonan dan visi misi kandidat sebagai peserta di Pilkada. Koordinator Tim Media paslon NA-ASS, HN mengaku sangat selektif memilih media parner untuk ditempati melakukan sosialisasi kandidatnya. Oplah sendiri kata dia akan menjadi pertimbangan paling utama untuk menerima kerjasama dari pihak media. Berikut adalah ulasan HN :

“Bagian media dari tim pemenang NA-ASS memiliki dua media parner, yakni Harian Tribun Timur dan Fajar. Kalau Radar Makassar dan Rakyat Sulsel kami memang tidak pernah bekerjasama. Selain media cetak kami juga menjalin kerjasama dengan media online.....Pertimbangan mengapa kami memilih media itu karena pertama jumlah oplah dan halaman, Raksul dan Radar memiliki jumlah halaman yang terbatas. Kedua khusus di Radar Makassar kami di tim media memang mengakui kalau ada komunikasi yang lambat dibangun, begitu juga dengan pihak perusahaan Radar Makassar yang tidak menindaklanjuti penawaran yang dimasukkannya. Belakangan kami baru tahu bahwa Radar Makassar termasuk media dengan jumlah pembaca terbanyak di Makassar, semua RT/RW berlangganan koran itu,

sehingga kedepan Radar Makassar menjadi salah satu koran yang kami target untuk bekerjasama....Kerja bagian media di tim pemenangan adalah mempublikasi setiap kegiatan-kegiatan dari Cagub-Cawagub kami di media. Caranya dengan membuat rilies berita kemudian mendistribusikannya ke setiap media, baik itu yang bekerjasama maupun tidak.

Kerjasama iklan di media kata HN efektif dilakukan oleh tim media pemenangan saat Prof Andalan, tagline dari pasangan NA-ASS itu memutuskan menggandeng adik Menteri Pertanian, Andi Sulaiman di Pilgub Sulsel. Diakui Khaeruddin rilies-rilies yang dilempar ke media untuk kemudian ditayangkan, tidak dengan mudah langsung dipenuhi oleh pewarta atau pun pihak redaksi. Media sebagaimana dijelaskan HN pun meminta *feedback* yang bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan. Berikut ulasannya :

“.....Terkadang itu kalau media sudah menaikkan rilies yang kami buat dua sampai tiga kali, pihak perusahaan meminta atau ada tuntutan balik dari kami untuk bisa bekerjasama secara profesional, misalnya dengan beriklan. Biasanya media memasukkan penawaran, namun tidak semua juga media bisa kami terima penawaran itu.....Itulah mengapa berita-berita yang terbit di Raksul dan Radar Makassar terbilang kurang dan kadang tendensius, mungkin karena mereka fikir kami tidak memberikan kontribusi untuk perusahaan, tetapi kami mengerti bahwa media adalah bisnis. Media yang kami punya kontrak kerjasama tentu memberi service berita.....Efek media mempengaruhi pilihan pembaca sangat besar sekali terhadap tingkat elektabilitas, bahkan kami memberikan porsi lebih besar untuk kampanye di media, ketimbang turun langsung sosialisasi,”

Dikatakan HN, salah satu kelemahan bagi tim media NA-ASS yang perlu untuk dievaluasi adalah ketidakmampuan tim untuk merangkul awak

media, baik itu personal (wartawan) maupun perusahaan media(unsur pimpinan) itu sendiri.

“Jujur memang kami lemah di media. Berbeda dengan tim media paslon lain yang sesekali mengajak wartawan minum kopi sekaligus bincang politik, kami memang hampir tidak pernah melakukan itu. Sehingga jika ada sedikit saja kesalahan NA-ASS itu sangat gampang dinaikkan oleh si pewarta karena hubungan emosional itu tidak terbagun. Bahkan beberapa wartawan sempat mengeluh dan mengatakan tim NA-ASS sangat sulit dikonfirmasi. Tetapi tetap menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki strategi kampanye di media,”

4. Tim Paslon IYL-Cakka

Juru bicara tim pasangan calon(Paslon) nomor urut empat, Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar(IYL-Cakka), HH menyebut ada empat media cetak dan lebih dari 20 media online yang menjadi media parner kadidatnya, dalam membantu sosialisasi dan kampanye selama tahapan Pilgub Sulsel. Pemilihan media parner mengacu pada survey internal yang dilakukan tim pemenangan terkait polling media dengan jumlah pembaca tertinggi di Sulsel, hasilnya harian Tribun Timur dan Fajar menempati posisi urutan tertinggi. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mengapa kedua media ini dipilih sebagai media parner di Pilgub Sulsel. HH menyebut kampanye dan sosialisasi IYL-Cakka memang lebih banyak diporsikan untuk media online, mengingat saat ini hampir seluruh masyarakat telah memanfaatkan gadget sebagai sumber informasi mereka. Berikut adalah ulasan HH :

“ Media parner kami untuk cetak ada tiga yakni Tribun Timur, Fajar dan Rakyat Sulsel. Sementara untuk online ada lebih

dari 20 media. Selain pertimbangan jumlah pembaca, segmentasi pembaca seperti Raksul yang memang koran politik juga jadi pertimbangan media tersebut kami pilih untuk kerjasama di Pilgub.... Saya kira yang namanya kerjasama misalnya pemasangan iklan, tentu ada asas manfaat baik untuk si pengiklan maupun untuk perusahaan. Biasanya dalam kontrak kerjasama itu akan diatur jumlah berita yang akan dinaikkan dalam sehari. Jadi kerjasama ini ibarat gayung bersambut, media sebagai saluran pemberitaan butuh informasi dan kandidat kami pun perlu diberitakan.

Hal yang menarik dari penelitian ini, sekaligus jawaban mengapa tim media pasangan IYL-Cakka tidak memilih Radar Makassar sebagai media parner, padahal dibandingkan jumlah pembaca yang dimiliki harian Rakyat Sulsel, Radar Makassar bisa dibilang koran dengan oplah terbanyak ke tiga, jauh di atas jumlah surat kabar yang dicetak oleh Rakyat Sulsel. Ternyata, selain karena adanya history yang melatarbelakangi hubungan yang kurang harmonis antara kubu IYL dan SAH sebagai komisaris di Rakyat Sulsel, pihak tim IYL-Cakka pun memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan salah satu pewarta di Radar Makassar, tidak lain adalah wartawan politik bernama KS. HH yang baru belakangan menjadi jubir dari pasangan IYL-Cakka, menggantikan Kay itu mengaku, sejak menjadi jubir Oktober 2017 lalu hanya ada satu media dimana wartawannya tidak pernah wawancara denganya, yakni Radar Makassar. Berikut kutipannya :

“Jujur yah Radar Makassar itu media yang sama sekali tidak pernah menghubungi saya untuk wawancara, namun berita-berita tendensius dan menyerang sangat sering kami temukan di Radar, kami pun di bagian media sempat membahas itu. Apa salah kami, kenapa Radar Makassar terus saja menyerang melalui berita-berita

negatif, padahal kami sangat terbuka untuk semua media, bahkan kalau saja ada penawaran yang pernah diajukan Radar Makassar untuk kami bekerjasama, tentu kami akan pertimbangkan itu. Mengingat memang Radar termasuk koran dengan pembaca tertinggi di Makassar. Sepertinya memang ada hubungan yang kurang harmonis yang sebelumnya pernah terjadi, tetapi saya tidak tahu karena saya pun masuk itu baru di bulan Oktober....Tetapi yang sempat saya ketahui KS wartawan Radar itu sempat dibuat dongkol sama mantan juru bicara tim sebelum saya, sehingga mungkin gegara itu mengapa sampai sekarang KS tidak pernah lagi melakukan wawancara.....Atau mungkin juga karena tim juga sudah dibuat dongkol atas pemberitaan di Radar sehingga tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki hubungan itu, bisa dibilang ada sistem yang tidak terkoneksi dengan baik.....Jadi sebenarnya butuh juga pendekatan secara emosional dengan para wartawan, tetapi khusus Radar bagaimana mau dekat kalau wawancara dengan kami tidak pernah... Jujur yah banyak juga media yang kami tidak kerjasama seperti Koran Sindo, Upkes dan BKM namun tidak setendensius Radar Makassar ketika memberitakan soal kandidat kami. Padahal salah satu komisaris di Radar itu punya hubungan yang sangat baik dengan pak IYL, namun kami juga tidak pernah memanfaatkan hubungan itu untuk meminta kepada Moh.Ramdhan Pomanto sebagai yang punya saham untuk menginterpersi pemberitaan, begitu juga kami ke harian Raksul, meskipun bapak (IYL) komisaris di sana kami juga tidak pernah meminta untuk interpnesi pemberitaan.”katanya.

Salah satu kelebihan yang HH sebutkan dengan menjalin kerjasama dengan media adalah, conter berita untuk mendapatkan pemberitaan yang lebih berimbang di media lebih terbuka. Hal itu karena terbuka kesempatan tim media pemenang untuk membuat sendiri berita rilies lalu mengirimkannya ke wartawan politik atau redaksi untuk dinaikkan.

“Jadi dalam kontrak kerjasama memang kita diberi keleluasaan untuk membuat rilies sendiri untuk dimuat. Saya kira ini adalah bagian dari strategi tim media melakukan publikasi, termasuk jika ada wacana pemberitaan yang tendensius menyerang kandidat kami, model pertahanannya itu salah satunya ada di bagian media, bagaimana memberikan klarifikasi-klarifikasi

terkait pemberitaan tersebut....Kami harus mengakui bahwa media salah satu saluran kampanye yang sangat efektif, itu bisa kita lihat trend survei IYL-Cakka yang terus naik.

Dari hasil wawancara peneliti dengan tim media dari empat pasangan calon yang bertarung di Pilgub Sulsel, melalui tabel di bawah ini dapat digambarkan strategi mereka mensosialisasikan kandidat melalui media sebagai saluran informasi masyarakat Sulsel.

Strategi Tim Media Paslon di Media :

Kandidat	Media Parner	Strategi	Dampak
NH-Aziz	Harian Fajar, Harian Tribun, Harian Radar Makassar, Rakyat Sulsel dan sejumlah media lokal lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjalin kedekatan dengan para wartawan ➤ Mengikat media melalui kerjasama iklan ➤ Menyiapkan rilies untuk didistribusikan ke wartawan 	Berita pencitraan lebih gampang diakomodir, sedang berita negatif sebisa mungkin disaring oleh redaksi media bersangkutan
Agus-TBL	Harian Tribun Timur, Harian Amanah, dan Radar Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyiapkan rilies untuk didistribusikan ke wartawan ➤ Menjalin kerjasama iklan di media 	Berita pencitraan lebih gampang diakomodir, sedang berita negatif sebisa mungkin disaring oleh redaksi media bersangkutan
NA-ASS	HarianTribun Timur dan Harian Fajar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyiapkan rilies untuk didistribusikan ke 	Berita pencitraan sulit diakomodir oleh

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjalin kerjasama iklan di media 	<p>media yang tidak memiliki hubungan kerjasama. Begitu juga dengan rilies yang dikirimkan sulit untuk diterbitkan</p>
IYL-Cakka	Harian Tribun Timur, Harian Fajar dan Harian Rakyat Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyiapkan rilies untuk didistribusikan ke wartawan ➤ Menjalin kerjasama iklan di media 	<p>Berita pencitraan sulit diakomodir oleh media yang tidak memiliki hubungan kerjasama. Begitu juga dengan rilies yang dikirimkan sulit untuk diterbitkan</p>

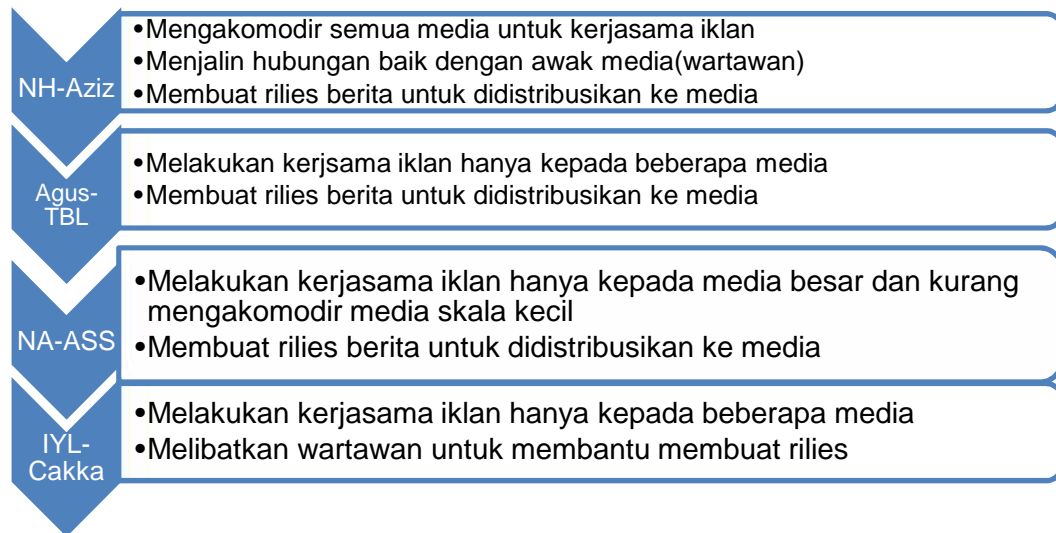
Tabel 5.3

Sumber : Hasil wawancara

Strategi yang dilakukan tim pemenangan kampanye tepatnya di bidang media untuk empat pasangan calon di Pilgub Sulsel, masing-masing memiliki media parner dan cara yang sama dalam mempublikasikan setiap kegiatan dengan membuat rilies berita untuk kemudian dikirimkan kepada masing-masing wartawan. Hanya saja tidak semua rilies berita yang dikirimkan tim media kepada wartawan Radar Makassar dan Rakyat Sulsel diterbitkan. Hanya paslon yang memiliki kerjasama pemasangan iklanlah yang boleh diakomodir oleh media yang bersangkutan. Hal lain yang tidak dilakukan oleh tiga tim media paslon selain dari NH-Aziz adalah, kemampuannya membangun hubungan emosional dengan para wartawan,

yang juga memberi dampak pada alur pemberitaan. Lebih jelasnya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini terkait persamaan dan perbedaan masing-masing tim media empat kandidat di Pilgub Sulsel 2018 :

Perbedaan Strategis Kandidat di Media



Bagan 5.4

Sumber : Analisis peneliti

Para aktor-aktor politik yang berlaga di kontestasi politik lima tahunan tidak lepas dari penggunaan media dalam menyukseskan kampanye mereka. Karena dengan adanya iklan politik dan peran media dalam kampanye politik membuat para aktor-aktor politik melakukan komunikasi politik dengan media massa sebagai alat untuk mediasi atau disebut mediated politics. Bennett dan Entman (Simarmata, 2014) media massa bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi menjadi alat dalam membangun ruang publik politik dimana warga negaranya dapat melakukan

kontrol politik, iklan politik dan partisipasi politik hal ini karena berkat kemajuan teknologi dan globalisasi media massa.

Hal ini terbukti dimana iklan politik dengan menggunakan media massa cetak telah membantu dalam mengenalkan calon aktor-aktor politik . Peran media massa sangatlah penting dalam keberhasilan kegiatan kampanye politik. Tanpa adanya dukungan media sangatlah sulit para kandidat mengenalkan program dan visi-misi mereka kepada khalayak. Menurut Norris (Simarmata, 2014) konsistensi dalam membangun relasi media dan politik sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik dan pandangan masyarakat dalam membentuk realitas politik. Media dianggap masyarakat sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat umum. pernyataan tersebut sesuai dengan konsep iklan politik menurut Philip Kotler (Wahid, 2016), iklan politik adalah kegiatan pemasaran yang mempunyai tujuan menyukseskan kandidat atau partai politik dengan cara melalui program pembangunan ekonomi atau kepedulian sosial.

Pesan yang terkandung dalam iklan politik bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik yang tinggi dan mampu mempengaruhi setiap warga negara serta lembaga/organisasi secara efektif. Iklan politik juga bergantung pada bagaimana strategi iklan politik di media massa. Karena media massa dianggap media yang wajib dan penting dalam melakukan strategi kampanye politik seperti jurnal yang ditulis oleh

Steffan Walgrave dan Peter Van Aelst yaitu *Contingency of the Mass Media's Political Agenda Setting Power : Toward a Preliminary Theory* menerangkan bahwa para politisi lebih memilih menggunakan politik media dalam menyampaikan strategi kampanye, karena dengan saluran media visi-misi sebuah kandidat partai politik akan dapat mempengaruhi khalayak secara langsung yang berdampak akan membangun persepsi dan opini publik di masyarakat (Walgrave & Van Aelst, 2006).

Posisi iklan politik di media massa dijadikan sebagai alat propaganda oleh tim pemenangan kampanye Bacagub Sulsel. Inti dari komunikasi politik adalah sebuah transfer pesan yang disampaikan dan diarahkan dengan tujuan pencapaian suatu pengaruh (Rumar, 2013). Menurut Herbert Blummer (Rumar, 2013) mengemukakan bahwa propaganda dianggap suatu bentuk kampanye politik yang dengan sengaja mengajak untuk mempengaruhi, membujuk banyak orang dengan tujuan khalayak dapat menerima suatu pandangan atau ideology.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengangkat judul Relasi Kuasa di Balik Kontestasi Wacana Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 Pada Harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel, penelitian ini berhasil mengungkap tiga masalah pokok yaitu pertama adalah bagaimana wacana kandidat yang bertarung di pemilihan gubernur(Pilgub)Sulsel dikonstruksi oleh harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel hingga menyebabkan terjadinya pembelahan berita. Kedua, bagaimana kekuatan ekonomi-politik mempengaruhi dan dinegosiasikan oleh para aktor di ruang redaksi mempengaruhi fragmentasi wacana pro dan kontra berita terhadap kandidat tertentu di Pilgub Sulsel. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi tim kerja pemenangan kandidat di Pilgub Sulsel mempengaruhi pemberitaan yang terbit pada kedua media tersebut.

Terlihat bahwa kedua surat kabar lokal ini telah mengonstruksi pertarungan politik di Pilgub Sulsel. Bingkai pertama masing-masing media memiliki kandidat yang diidolakan karenanya berita-berita yang tersaji cenderung menunjukkan keberpihakan. Sedangkan bingkai kedua baik harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel memiliki lawan politik sebagaimana lawan dari idola mereka di kontestasi Pilgub Sulsel. Pertentangan bingkai ini terkait dengan perbedaan wartawan penulisnya maupun posisinya dalam struktur birokrasi di kedua media

tersebut. Analisis aktor yang ikut berperan dalam mengkonstruksi wacana ini menemukan bahwa, pola kontestasi di harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel terjadi antar wartawan, antar desk, dan antara wartawan dengan redaktur.

Dalam penelitian ini juga bisa dilihat bahwa pembingkaiannya suatu wacana di suatu media telah dimulai sejak dari proses pencarian fakta sosial, penentuan sumber berita, pengumpulan, penyortiran, dan penyeleksian, hingga akhirnya pemuatan berita sebagai realitas simbolik di media. Dalam hal ini, posisi wartawan akan berhadapan dengan editor sebagai *gate keeper* di suatu media. Dengan melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah wartawan dan redaktur politik di harian Rakyat Sulsel dan pengamatan praktik sehari-hari di redaksi Radar Makassar dalam mengkonstruksi berita terkait kandidat di Pilgub Sulsel, peneliti berupaya menjawab pertanyaan kedua.

Ditemukan beberapa pola relasi dan lapis kuasa di balik kontestasi berita kedua media tersebut. Pola pertama adalah ditemukannya keterkaitan antara kontestasi wacana dengan praktik swasensor. Jika berita dianggap terlalu kritis menyorot kandidat yang punya kerjasama dengan perusahaan, maka swasensor akan dilakukan, bahkan juga diproduksi berita yang pro pada kandidat yang memberikan kontribusi. Belakangan, siklus keberpihakan media pada peserta Pilgub berubah seiring berubahnya kerjasama kandidat dengan perusahaan. Sekalipun terjadi penguatan praktik

sensor terhadap berita kritis oleh jajaran redaktur, namun ini tidak berarti ada dominasi sepenuhnya. Fragmentasi kuasa tetap terjadi. Dalam konteks ini, kontestasi wacana dari keberpihakan media pada salah satu kandidat tertentu di Pilgub Sulsel melahirkan praktik kuasa.

Sebagaimana dugaan penulis di awal, kontestasi wacana di Rakyat Sulsel dan di Radar Makassar ini mempresentasikan pertarungan kuasa yaitu antara wartawan yang memiliki kedekatan emosional dengan kandidat serta wartawan maupun redaktur yang memiliki garapan iklan dengan salah satu kandidat. Selain itu dilakukan analisis historis dan wawancara mendalam dengan sejumlah wartawan, redaktur, hingga jajaran pimpinan perusahaan untuk melihat keterkaitannya dengan kepentingan ekonomi politik media. Bisa disimpulkan bahwa, praktik pembelahan wacana antar berita kedua media tersebut berkaitan erat dengan kerjasama iklan kandidat di perusahaan.

Faktanya, penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa pemilik media tidak sepenuhnya bisa mengatur wacana di harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar. Ini misalnya dibuktikan dari tidak adanya intervensi dari pihak komisaris utama Radar Makassar, maupun Rakyat Sulsel, AH dan komisaris lain misalnya, dalam hal ini Moh. Ramdhan Pomanto yang punya kedekatan dengan IYL untuk menahan berita negatif terkait pencalonan rekan politiknya di Pilkada Sulsel. "Raja-raja kecil" di ruang redaksi menunjukkan adanya kuasa lain yang bisa mempengaruhi

arah pemberitaan. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa fragmentasi wacana terkait kandidat yang maju di Pilgub Sulsel 2018 pada harian Rakyat Sulsel dan Radar Makassar ternyata memiliki dimensi yang kompleks di belakangnya. Pendekatan ekonomi politik yang deterministik melihat dominasi kapital tidak akan bisa menjawab hal ini.

Sementara menjawab pertanyaan ketiga terkait strategi tim kerja pemenangan kandidat di Pilgub Sulsel mempengaruhi pemberitaan yang terbit pada kedua media tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa masing-masing tim media pasangan calon memiliki strategi kampanye dengan menggunakan media sebagai salurannya. Mulai dari mengikat awak media melalui pendekatan emosional, menjalin kerjasama berupa iklan kampanye di media, membuat rilies berita untuk kemudian dilempar kepada wartawan politik serta melakukan survei internal terkait media dengan tingkat pembaca atau oplah tertinggi untuk kemudian dijadikan dasar dari tim media paslon menawarkan ataupun menerima tawaran kerjasama di media untuk iklan politik pada pencalonan empat kandidat yang berlaga di Pilgub Sulsel.

A. Saran dan Rekomendasi

Kajian ini diharapkan bisa membuka perspektif tentang adanya masalah serius dalam praktik jurnalistiknya. Sebagai orang dalam, tentu saja ada kekhawatiran bahwa persoalan ini akan mempercepat senjakala koran. Tantangan eksternal media cetak memang sangat kompleks, terutama dari

aspek menurunnya oplah karena tiadanya regenerasi pembaca. Hal ini kemudian diikuti dengan penurunan iklan. Namun, situasi krisis ini ternyata diperdalam oleh kapasitas para pemimpin redaksi koran itu sendiri yang tidak mampu merumuskan sikap yang jelas dalam menghadapi situasi yang berubah dan justru lebih mementingkan kepentingan kapital. Akibatnya, hal ini justru mengorbankan kualitas jurnalistik.

Dibutuhkan sikap terbuka terhadap diskursus dan menggerakkan seluruh potensi yang ada, baik yang konservatif maupun progresif, untuk merumuskan jalan baru di tengah perubahan situasi. Diskusi kritis untuk mencari titik temu atas fragmentasi ideologis antara kelompok di ruang redaksi, bisa menjadi kekuatan untuk mendinamisir ruang redaksi, karena itu perlu dibuka. Namun, produk berita yang muncul di koran, sebaiknya memiliki kesamaan wajah, sehingga publik tidak dibingungkan dengan kontestasi wacana yang muncul.

Hingga saat ini, kepercayaan publik terhadap media semakin merosot, seiring dengan fragmentasi informasi yang kian marak dan mudah terbaca publik. Oleh karena itu, media dituntut berlomba-lomba dalam menarik perhatian sekaligus kepercayaan publik. Apalagi dengan brand seperti Radar Makassar dan Rakyat Sulsel yang masih dalam skala lokal. Jika kualitas jurnalistiknya terus dikorbankan demi kepentingan jangka pendek untuk mencari iklan misalnya, maka publik akan semakin meninggalkan media ini. Kepercayaan pembaca adalah modal kuat yang

harus dipegang teguh para pengelola media. Strategi banting harga, dalam hal ini, praktik menjual murah halaman koran untuk melayani kepentingan kapital, akan semakin memperdalam krisis di media cetak dan mempercepat kejatuhannya.

Pagar api yang memisahkan iklan dengan ruang redaksi harus terus dijaga. Otoritas dan independensi ruang redaksi yang menjadi ruh bagi suatu media mestinya terus dihidupkan. Redaksi media harus kembali fokus pada produk jurnalistik, bukan justru sibuk melakukan kegiatan bisnis. Apalagi, publik saat ini semakin kritis dan berpeluang mendapatkan informasi dari berbagai sumber atau media lain dengan lebih mudah. Publik akan dengan mudah membandingkan produk berita di satu media dengan media lain. Jika mereka menemukan bias pemberitaan secara vulgar, maka kepercayaan yang menjadi modal besar suatu media akan semakin hilang. Itu artinya koran ini akan semakin ditinggalkan.

Di tengah serbuan jurnalisme serba cepat dan informasi sepotong- sepotong di media online demi mengejar klik atau demi rating di media televisi, media cetak masih memiliki nilai lebih jika bisa membangun informasi secara lebih mendalam, lengkap, dan tentu enak dibaca. Dalam hal ini, peliputan- peliputan investigatif, yang ditulis dengan baik, bisa menjadi keunggulan dari suatu koran sehingga media ini tetap menjadi rujukan dan tidak ditinggalkan pembacanya. Berikutnya, menguatnya “raja-raja kecil” di ruang redaksi terbukti bisa memperburuk kualitas jurnalistik karena

mematikan praktik diskursif. Raja-raja kecil ini terlahir dari adanya dominasi struktural dibandingkan profesioalisme sebagai wartawan yang kemudian melembagakan budaya feodal dengan aparatus penilaian karya top down. Dengan membuka ruang diskusi yang sehat di ruang redaksi dan membuka sekat antar desk, keberadaan raja-raja kecil ini bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2011. *Analisis Pers Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Anwar Arifin. 2010. *Pers dan Dinamika Politik (Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia)*. Jakarta. Yarsif Watampone.
- Bungin Burhan. 2006 . *Sosiologi Komunikasi, Paradigma dan Dirkursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Bungin Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Duverger Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Terjemahan dari Daniel Dhakidae. Jakarta. Rajawali Pers.
- Eriyanto. 2005, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*. Yogyakarta. LKiS.

- Foucault, M. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*. Terjemahan dari P Rabinow, ed. Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984. Yogyakarta: Jalasutra
- Foucault, Michael. 2002. *Power /Knowledge*. Wacana Kuasa/Pengetahuan. Bentang Budaya, Jogjakarta.
- Gamson dan Modigliani. (1993). *Analisis Teks Media*, (terjemahan Alex Sobur, 2001). Bandung: Rosda Karya.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Kontribusi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta. Granit.
- Kusumaningrat, Hikma dan K. Purnama. 2012. *Jurnalistik (Teori dan Praktik)*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Jorgensen, Marianne W dan Philips Louse J. Tanpa tahun. *Analisis Wacana(Teori dan Metode)*.Terjemahan oleh Suyitno Imam dkk.2007. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jurnal Pemilu dan Demokrasi. 2015. *Evaluasi Pilkada Serentak 2015*. Jakarta. Yayasan Perluden
- Keller, Anett (2009). *Tantangan dari Dalam: Otonomi redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika*. Jakarta: Friderich Ebert

Stiftung

Maryani Eni. 2011. *Media dan Perubahan Sosial*. Bandung.

Rosda

McChesney, R.W. 2001. "Global Media, Neoliberalism, and Imperialism." Dalam *Monthly Review*, 52 (19): 1-19.

Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Nur Tanjung Bahdin, Ardial. 2005 . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(proposal, skripsi,dan tesis)*. Jakarta. Kencana

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Edisi 4. 2015. Makassar :Program Pascasarjana UNHAS

Ritzer, George. Tanpa tahun. *Teori Sosial Posmodern* . Terjemahan oleh Muhammad Taufik. 2007. Yogyakarta . Kreasi Wacana.

Salim Agus. 2006. *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Tiara Wacana.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.

Simon, Roger.2004 . *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta . Insist Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Subiakto Henry dan Ida Rachmah. 2014. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta. Kecana.

Sobur Alex. 2009 . *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Simiotik, dan Analisis Framing)*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Jorgensen ,W Marianne dan J Lauise, Philips. 2007. *Analisis Wacana (Teori dan Metode)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Kurniawan. 2013. *Kontruksi Wacana Politik Akun Official Twitter*. Tesis yang tidak diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjasan Fisip. UNHAS.

Tesis :

Darma Riza R. 2013. *Headline Politik dan Politik Headline dalam Harian Fajar dan Tribun(Studi Kebijakan Editorial Surat Kabar di Makassar)*. Tesis yang tidak diterbitkan. Makassar :Program Pascasarjana Fisip .UNHAS.

Jurnal :

- Halwati, Umi.2013. Analisis Foucault Dalam Membedah wacana Taks Dakwah di Media Massa. *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. Volume 1, Nomor 1. 156-157.
- Haryadi, Didik, S. 2015. *Media dan Politik: Pertarungan Ruang dan Kuasa Media Menjelang Pemilihan presiden*.Jurnal Simbolika.1:1-5
- Hanitzcsh, T. (2005). "Journalist in Indonesia: Educated but Timed Watchdogs. *Journalism Studies*, Volume 6, Nomor 4, 2005, pp. 493-508
- Hanitzcsh, T. (2006). "Mapping Journalisme Culture: Teoritical Taxonomy and Case Studies from Indonesia." *Asian Journal of Communication*. Vol. 16
- Hidayat, Deddy, N. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah "Multi-Pradigm Science," dalam *Mediator*, 3 (2), 197-220
- Kristen, Fuchs. 2015. *Power in the Age of Social Media*. Heathwood Journal of Critical Theory 1 (1) : 12-16)
- Sudiby, A., & Patria, N. (2013). "The Television Industry in Post Authoritarian Indoensia." Dalam *Journal of Contemporary Asia*, doi.10.1080/00472336.2012.757434
- Wijayanto. (2015). "Old Practice in a New Era: Rasa as Basis of Self-Cenconship in Kompas Daily Newspaper". *GSTF Journal on Media &*

Communcations (JMC), Vol. 2, No. 2, September 2015. Pp 66 - 74

Koran :

Radar Makassar. 7 Juli 2017. ASN Mulai Berpolitik Praktis. 1

Radar Makassar. 31 Juli 2017. *Jumlah Pemilih Sulsel Melonjak.*

8

Radar Makassar. 28 Agustus, 2017. *PPP Ogah Usung IYL.* 8

Radar Makassar. 23 Agustus. 2017. Jalan IYL-Cakka Makin

Terjal. 1

Radar Makassar, 25 September 2017. Risman :Siapa yang
Jegal IYL. 1

Radar Makassar. 29 Agustus 2017. Koalisi Istana Berpeluang ke
NH-Aziz.8

Sofyan Basri. 11. Agustus .2017. Amir Pastikan PPP Dukung
IYL-Cakka. *Harian Rakyat Sulsel.* 3

Fahrullah. Iskanto. dan Suryadi. 21 Agustus 2017. Ada Skenario
Jegal Punggawa di Pilgub. *Harian Rakyat Sulsel.* 1

Iskanto dan Suryadi. 22 September 2017. Kekuatan Besar Jegal
Punggawa. *Harian Rakyat Sulsel.* 1

Rakyat Sulsel. 1 Agustus 2017. Hanura Condong ke IYL. 1

Online :

(13 September 2017)

Belarminus Robertus . 13. Juni. 2017. Survei Poltracking: Peta Politik
Pilkada Sulsel Masih Dinamis.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/13/20272821/survei.poltracking.peta.politik.pilkada.sulsel.masih.dinamis>.

(16 September 2017)

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/12562431/tahapan.pilkada.serentak.2018.dimulai.ini.jadwal.lengkapnya>.

<https://data.kpu.go.id/ss8.php>.

<http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/pilkada-serentak-ajang- pesta-demokrasi-rakyat.html>

<https://pilkada2017.kpu.go.id/>)

(17 September 2017)

<http://news.metrotvnews.com/read/2017/07/25/734414/sulsel-putuskan-anggaran-pilkada-rp456-miliar>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Sulawesi_Selatan

Lampiran

1. Gambar 5.1



2. Gambar 5.2



3. Gambar 5.3



4. Gambar 5.4



5. Lampiran 5.5



6. Lampiran 5.6



7. Gambar 5.7



8. Gambar 5.8



9. Gambar 5.9

